

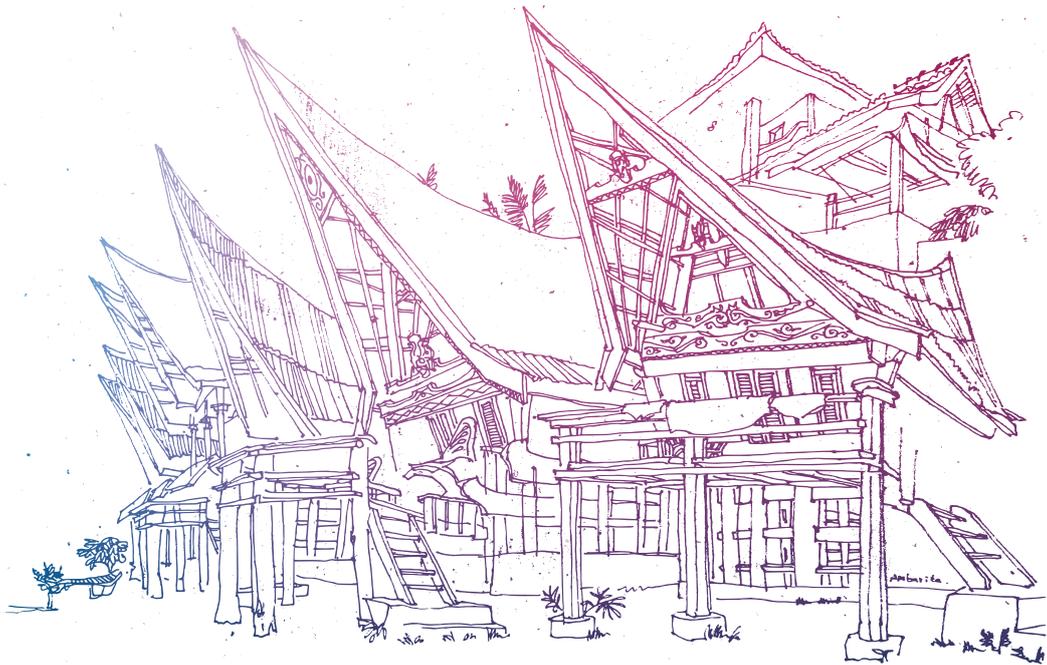


# LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sumatera Utara

Mei 2024





# Laporan Perekonomian **PROVINSI SUMATERA UTARA**

Mei 2024



# Visi, Misi, & Nilai-nilai Strategis

## Visi Bank Indonesia

---

“Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju”

## Misi Bank Indonesia

---

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

## Nilai-nilai Strategis

### Organisasi Bank Indonesia

---

1. Kejujuran dan integritas (*trust and integrity*);
2. Profesionalisme (*professionalism*);
3. Keunggulan (*excellence*);
4. Mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan
5. Koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).



# Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

## Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

---

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

## Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

---

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan kehandalan Sistem Pembayaran (SP) untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.





## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara Periode Mei 2024. Laporan ini memuat evaluasi perkembangan ekonomi Sumatera Utara triwulan I 2024, serta prospek keseluruhan tahun 2024. Publikasi laporan ini sekaligus menjadi bagian dari visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah.

Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa **perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,88% (yoy), relatif tumbuh tinggi meskipun melambat dari triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy)**. Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Sumatera Utara disebabkan oleh perlambatan kinerja konsumsi pemerintah dan investasi seiring dengan siklus penyerapan anggaran belanja pemerintah yang masih rendah di awal tahun, sikap *wait and see* investor di tengah berlangsungnya Pemilu 2024, serta penurunan volume penjualan semen domestik. Meski demikian, perekonomian Sumatera Utara tetap kuat ditopang oleh masih meningkatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekspor impor. Hal ini sejalan dengan perayaan Tahun Baru Imlek dan indikasi pergeseran pola konsumsi menjelang bulan Ramadhan, peningkatan permintaan ekspor, dan pemulihan harga komoditas internasional. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU Konstruksi, Perdagangan, serta Transportasi dan Pergudangan mengalami perlambatan pada triwulan I 2024 seiring *wait and see* sektor swasta di tengah berlangsungnya Pemilu, progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah memasuki tahap akhir, terbatasnya pertumbuhan volume ekspor komoditas unggulan, serta normalisasi pertumbuhan aktivitas wisata. Kendati demikian, moderasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang lebih dalam mampu tertahan oleh akselerasi LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan ditopang oleh meningkatnya produksi padi seiring dengan masuknya periode panen, tren normalisasi harga pupuk yang mendukung keterjangkauan harga bahan baku dan mendorong perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP), serta tetap kuatnya permintaan domestik.

Kedua, tekanan **inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan di atas sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 2,5±1,0% (yoy)**. Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 3,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,25% (yoy). Inflasi Provinsi Sumatera Utara juga tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy) pada triwulan laporan. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Adapun berdasarkan komoditas, inflasi triwulan laporan utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan tata niaga beras yang belum efisien. Selanjutnya, kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh berkurangnya barang/pasokan ditengah tingginya permintaan. Kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam disebabkan oleh kenaikan biaya input. Sementara itu, peningkatan harga SKM disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di awal tahun sebesar 10%. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan *urban farming* dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

**Pada tahun 2024, ekonomi Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat pada rentang 4,5-5,3% (yoy), meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global dan konflik geopolitik.** Dari sisi pengeluaran, perekonomian Sumatera Utara untuk keseluruhan tahun 2024 diperkirakan tetap kuat didukung pemulihan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi PMTB. Sementara itu, *rebound* ekonomi Tiongkok yang tidak setinggi perkiraan akibat permasalahan struktural pada perekonomian Tiongkok, masih berlanjutnya konflik geopolitik, serta masih lemahnya aktivitas sektor manufaktur di negara-negara tujuan ekspor diperkirakan dapat menahan laju kinerja ekspor Sumatera Utara di 2024. Dari sisi lapangan usaha, akselerasi kinerja lapangan usaha (LU) Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan diperkirakan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan normalisasi harga bahan baku (pupuk), serta permintaan domestik yang tetap kuat melalui implementasi program biofuel B35 yang mendukung industri kelapa sawit. Selain itu, terdapat kecenderungan tren penurunan suku bunga perbankan di level global seiring semakin terkendalinya laju inflasi global, yang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi. Beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai seperti konflik geopolitik yang berkepanjangan sehingga menghambat aktivitas perdagangan internasional dan belum pulihnya perekonomian negara mitra dagang utama Sumatera Utara seperti Tiongkok. **Di sisi lain, stabilitas inflasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran target  $2,5 \pm 1\%$  (yoy),** dengan fokus pada sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sumatera Utara.

Akhir kata, selain sebagai referensi yang bermanfaat, kami mengharapkan buku ini dapat memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Sumatera Utara yang lebih baik ke depan. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan, antara lain, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Laporan Perekonomian Provinsi masih belum sepenuhnya sempurna sehingga saran, masukan serta dukungan informasi/data dari pembaca sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari laporan ini.

Medan, Mei 2024  
Kepala Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Sumatera Utara

ttd

**I G P Wira Kusuma**

# Daftar Isi



Visi Misi Bank Indonesia	II
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Grafik	VIII
Daftar Tabel	X
Daftar Gambar	XI
Tabel Indikator	XII
Ringkasan Umum	XVI
Daftar Istilah	91
Tim Penyusun	93

## Bab I

### Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1

1.1	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tetap Kuat	3
1.2	Kinerja Sektor Pengeluaran Tetap Kuat Didukung Permintaan yang Terjaga	4
1.3	Lapangan Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan Tumbuh Lebih Tinggi	10

#### BOKS 1

4 (Empat)	Letter Of Intent Pensutra Alliance Berhad dan North Sumatra Invest	15
-----------	--	----

## Bab II

### Keuangan Pemerintah

19

2.1	Gambaran Umum APBD 2024	21
2.2	Realisasi APBD Triwulan I 2024	22
2.3	Pagu Belanja APBN untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Lebih Rendah	25
2.4	Realisasi Belanja APBN pada Triwulan I 2024 Mengalami Peningkatan	26

## Bab III

### Perkembangan Inflasi Daerah

27

3.1	Kinerja Inflasi Triwulan I 2024	29
3.2	Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok	30
3.3	Inflasi Spasial	31
3.4	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	39
3.5	Perkembangan Inflasi Triwulan II 2024	42

#### BOKS 2

	Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Antar Daerah (KAD) Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Dairi	45
--	---	----



#### Bab IV

### Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

- |  |    |
|--|----|
| 4.1 Pembiayaan Daerah                    | 51 |
| 4.2 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM | 54 |

49

#### Bab VI

### Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

- |  |    |
|--|----|
| 6.1 Kondisi Ketenagakerjaan Sumatera Utara Mengalami Perbaikan | 71 |
| 6.2 Kesejahteraan  | 74 |

69

#### Bab V

### Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

- |   |    |
|---|----|
| 5.1 Sistem Pembayaran Menunjukkan Tren Peningkatan  | 59 |
| 5.2 Program Elektronifikasi Berjalan Lancar         | 61 |
| 5.3 Aliran Uang Kartal Mengalami <i>Net Outflow</i> | 62 |
| 5.4 Aliran Transfer Dana Lintas Negara tetap Kuat   | 62 |

57

#### Bab VII

### Prospek Perekonomian Daerah

- |                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi | 81 |
| 7.2 Prospek Inflasi             | 84 |
| 7.3 Rekomendasi                 | 85 |

79

#### BOKS 3

SEMESTA FEST 2024 (Semarak Ekonomi Syariah dan Keuangan Digital Festival) Mendorong Peningkatan Akseptasi Nontunai Di Sumatera Utara

65

# Daftar Grafik

Grafik 1.1	Perkembangan PDRB dan PDB Triwulanan	3	Grafik 1.28	Jumlah Penumpang Angkutan Udara	13
Grafik 1.2	Survei Penjualan Eceran	4	Grafik 1.29	Tingkat Penghunian Kamar	13
Grafik 1.3	Survei Konsumen Bank Indonesia	5	Grafik 1.30	Kredit Transportasi	14
Grafik 1.4	Kredit Konsumsi	5	Grafik 2.1	Perkembangan Pagu APBD di Sumatera Utara	21
Grafik 1.5	Nilai dan Volume Ekspor	5	Grafik 2.2	Derajat Otonomi Fiskal Sumatera Utara	21
Grafik 1.6	<i>Likert Scale</i> Permintaan Domestik dan Ekspor	6	Grafik 2.3	Proporsi Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara	22
Grafik 1.7	Pertumbuhan Harga Komoditas Internasional	6	Grafik 2.4	Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara	22
Grafik 1.8	<i>Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacturing</i>	6	Grafik 2.5	Realisasi Pendapatan APBD Triwulan I 2024	23
Grafik 1.9	Pangsa Komoditas Ekspor	6	Grafik 2.6	Realisasi PAD Triwulan I 2024	23
Grafik 1.10	Ekspor CPO	7	Grafik 2.7	Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2024	24
Grafik 1.11	Ekspor Karet	7	Grafik 2.8	Realisasi Belanja Operasi Triwulan I 2024	24
Grafik 1.12	Ekspor Kopi	7	Grafik 2.9	Pagu APBN Provinsi Sumatera Utara	26
Grafik 1.13	Nilai dan Volume Impor	8	Grafik 2.10	Realisasi Belanja APBN Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Belanja	26
Grafik 1.14	Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang	8	Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional	29
Grafik 1.15	Pengadaan Semen	8	Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Daerah Lainnya	29
Grafik 1.16	Realisasi Investasi	9	Grafik 3.3	Distribusi Andil Inflasi per Kelompok	30
Grafik 1.17	Pangsa Realisasi Investasi	9	Grafik 3.4	Inflasi Kabupaten Labuhanbatu per Kelompok	32
Grafik 1.18	Perkembangan Harga Pupuk	10	Grafik 3.5	Inflasi Kabupaten Karo per Kelompok	33
Grafik 1.19	Nilai Tukar Petani	10	Grafik 3.6	Inflasi Kota Sibolga per Kelompok	34
Grafik 1.20	Perkembangan Harga Gabah	11	Grafik 3.7	Inflasi Kota Padangsidimpuan per Kelompok	35
Grafik 1.21	Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit	11	Grafik 3.8	Inflasi Kota Gunungsitoli per Kelompok	36
Grafik 1.22	Kredit Pertanian	11	Grafik 3.9	Inflasi Kota Pematangsiantar per Kelompok	36
Grafik 1.23	Konsumsi Listrik Industri	11	Grafik 3.10	Inflasi Kota Gunungsitoli per Kelompok	37
Grafik 1.24	<i>Likert Scale</i> Biaya Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Energi	12	Grafik 3.11	Inflasi Kota Medan per Kelompok	38
Grafik 1.25	Kredit Industri Pengolahan	12			
Grafik 1.26	Kredit Konstruksi	12			
Grafik 1.27	Kredit Perdagangan	13			

<b>Grafik 3.12</b>	Historis Inflasi Bulanan Sumatera Utara	<b>42</b>	<b>Grafik 5.9</b>	Perkembangan <i>Inflow - Outflow</i>	<b>62</b>
<b>Grafik 3.13</b>	Historis Inflasi Tahunan Sumatera Utara	<b>43</b>	<b>Grafik 5.10</b>	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	<b>62</b>
<b>Grafik 4.1</b>	Perkembangan Kredit dan NPL Sumatera Utara	<b>51</b>	<b>Grafik 5.11</b>	Perkembangan Transaksi PJP-LR	<b>63</b>
<b>Grafik 4.2</b>	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	<b>51</b>	<b>Grafik 6.1</b>	Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara	<b>71</b>
<b>Grafik 4.3</b>	Perkembangan Kredit Multiguna	<b>52</b>	<b>Grafik 6.2</b>	TPT Menurut Jenjang Pendidikan	<b>72</b>
<b>Grafik 4.4</b>	NPL Kredit Rumah Tangga	<b>53</b>	<b>Grafik 6.3</b>	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	<b>72</b>
<b>Grafik 4.5</b>	Pertumbuhan Kredit Korporasi	<b>53</b>	<b>Grafik 6.4</b>	Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan TPAK	<b>72</b>
<b>Grafik 4.6</b>	Pertumbuhan DPK Sumatera Utara berdasarkan Sektor	<b>53</b>	<b>Grafik 6.5</b>	Pangsa Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha	<b>73</b>
<b>Grafik 4.7</b>	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan	<b>53</b>	<b>Grafik 6.6</b>	Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	<b>73</b>
<b>Grafik 4.8</b>	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha	<b>54</b>	<b>Grafik 6.7</b>	Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan	<b>74</b>
<b>Grafik 4.9</b>	NPL Kredit Korporasi	<b>54</b>	<b>Grafik 6.8</b>	Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama	<b>74</b>
<b>Grafik 4.10</b>	Pertumbuhan Kredit UMKM	<b>54</b>	<b>Grafik 6.9</b>	Perkembangan Nilai Tukar Petani	<b>74</b>
<b>Grafik 4.11</b>	Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Kredit	<b>55</b>	<b>Grafik 6.10</b>	Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan	<b>75</b>
<b>Grafik 4.12</b>	Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Segmen UMKM	<b>55</b>	<b>Grafik 6.11</b>	IT dan IB Sumatera Utara	<b>75</b>
<b>Grafik 4.13</b>	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	<b>56</b>	<b>Grafik 6.12</b>	Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara	<b>76</b>
<b>Grafik 4.14</b>	Perkembangan NPL Kredit UMKM	<b>56</b>	<b>Grafik 6.13</b>	Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan	<b>76</b>
<b>Grafik 5.1</b>	Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debit, Kartu Kredit, dan UE	<b>59</b>	<b>Grafik 6.14</b>	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	<b>76</b>
<b>Grafik 5.2</b>	Alokasi Penggunaan Kartu ATM Debit	<b>59</b>	<b>Grafik 6.15</b>	Perkembangan Rasio Gini	<b>77</b>
<b>Grafik 5.3</b>	Alokasi Penggunaan Kartu Kredit	<b>59</b>	<b>Grafik 6.16</b>	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan	<b>77</b>
<b>Grafik 5.4</b>	Perkembangan BPNT	<b>60</b>	<b>Grafik 6.17</b>	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perdesaan	<b>77</b>
<b>Grafik 5.5</b>	Perkembangan PKH	<b>60</b>	<b>Grafik 6.18</b>	Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional	<b>77</b>
<b>Grafik 5.6</b>	Perkembangan RTGS	<b>60</b>			
<b>Grafik 5.6</b>	Perkembangan RTGS	<b>60</b>			
<b>Grafik 5.7</b>	Perkembangan SKNBI	<b>61</b>			
<b>Grafik 5.8</b>	Perkembangan <i>Merchant QRIS</i>	<b>61</b>			



# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara	4
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara	9
Tabel 2.1	Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Sumatera Utara	24
Tabel 2.2	Pagu dan Realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara	25
Tabel 2.3	Pagu dan Realisasi Belanja APBN Berdasarkan Jenis Belanja (Tidak Termasuk TKDD)	25
Tabel 3.1	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan I 2024	30
Tabel 3.2	Perkembangan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional	32
Tabel 3.3	Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Sampel	39
Tabel 4.1	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor	52
Tabel 4.2	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah	52
Tabel 6.1	Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/Tidak Penuh)	74
Tabel 6.2	Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan	76
Tabel 6.3	IPM Sumut Menurut Komponen	78
Tabel 7.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	82

# Daftar Gambar

Gambar B1.1 Penandatanganan Kerja Sama NSI dengan Pensutra Malaysia	16
Gambar B1.2 <i>Investment Meeting</i> Antara NSI dengan Pensutra Malaysia	17
Gambar B2.1 Pembahasan Langkah Pengendalian Inflasi Melalui KAD, dipimpin oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara	46
Gambar B2.2 Momen Foto Bersama Pj. Gubernur Sumatera Utara, Bupati Karo, Pj. Bupati Langkat, Pj. Bupati Dairi, dan Seluruh Pihak yang Terlibat	47
Gambar B3.1 Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi	66
Gambar B3.2 Bazaar Kuliner	67

# Tabel Indikator

	2021					2022					2023					2024
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
<b>PDRB (% yoy)</b>	<b>-1,85</b>	<b>4,95</b>	<b>3,67</b>	<b>3,81</b>	<b>2,61</b>	<b>3,95</b>	<b>4,70</b>	<b>4,97</b>	<b>5,26</b>	<b>4,73</b>	<b>4,87</b>	<b>5,19</b>	<b>4,94</b>	<b>5,02</b>	<b>5,01</b>	<b>4,88</b>
<b>PENGELUARAN</b>																
Konsumsi Rumah Tangga	-4,55	5,20	3,09	3,45	1,69	3,58	4,64	4,63	5,33	4,55	5,69	6,20	6,42	5,41	5,59	5,53
Konsumsi LNPRT	-5,84	-2,71	-0,50	-1,25	-2,59	3,71	5,93	4,77	7,43	5,47	7,46	7,69	8,72	13,04	9,27	17,69
Konsumsi Pemerintah	0,03	2,99	3,57	6,82	3,46	-1,54	-0,21	-7,01	-4,23	-3,34	5,19	6,16	-0,04	4,81	3,98	2,04
PMTB	-3,96	6,27	6,07	5,82	3,47	5,95	2,12	3,90	3,36	3,80	3,37	3,36	5,28	6,21	4,48	4,38
Ekspor	7,99	19,65	19,19	13,71	15,09	12,61	11,16	12,32	9,77	11,44	2,45	-0,71	-5,11	0,28	-0,40	8,78
Impor	4,70	25,51	25,40	18,30	18,34	15,94	9,61	11,64	8,29	11,20	2,06	-2,52	-6,97	0,73	-1,70	10,42
<b>LAPANGAN USAHA</b>																
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	4,94	4,73	5,63	3,87	5,00	5,25	5,08	5,35	5,17	3,46	3,21	2,68	2,98	3,02	3,42
Pertambangan dan Penggalian	-3,14	2,89	4,21	3,90	1,92	2,20	2,83	2,54	3,15	2,69	3,78	3,49	3,37	3,23	3,46	3,91
Industri Pengolahan	1,04	2,36	1,26	1,07	1,43	0,68	2,04	2,66	2,53	1,98	2,61	4,08	3,92	3,13	3,44	3,73
Pengadaan Listrik, Gas	-0,24	5,48	4,69	9,86	4,93	7,27	7,67	4,53	0,15	4,81	0,73	2,21	2,36	3,33	2,16	3,22
Pengadaan Air	3,34	4,95	3,68	2,55	3,62	2,04	2,17	1,27	3,19	2,17	2,32	1,86	4,47	2,89	2,89	3,10
Konstruksi	-3,07	4,98	3,93	3,09	2,18	2,50	2,80	2,82	3,30	2,86	5,49	5,56	6,81	7,60	6,41	6,43
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,21	6,87	4,84	5,21	3,62	5,82	6,70	6,79	6,92	6,56	5,56	4,66	6,06	6,91	5,81	5,42
Transportasi dan Pergudangan	-18,30	5,94	-0,40	1,72	-3,63	6,16	12,10	16,28	16,02	12,69	15,64	12,29	12,41	11,38	13,12	7,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-15,11	6,49	4,13	4,17	-0,81	4,06	6,62	8,04	9,79	7,16	9,12	9,21	11,19	10,87	10,22	11,63
Informasi dan Komunikasi	4,64	6,86	7,12	7,36	6,51	7,38	7,59	7,62	7,78	7,60	7,76	7,80	7,82	7,83	7,80	7,85
Jasa Keuangan	1,53	7,87	8,43	0,33	4,46	7,54	1,35	1,07	5,43	3,81	1,60	7,57	7,68	5,29	5,50	4,25
Jasa Perantara Keuangan	5,87	11,00	12,11	0,41	7,21	9,83	0,44	0,02	6,19	4,06	0,00	0,04	7,37	3,94	4,89	2,70
Real Estate	0,52	3,70	2,89	2,89	2,50	3,11	4,59	4,60	5,75	4,52	6,66	4,74	1,85	-0,25	3,20	3,03
Jasa Perusahaan	-8,81	3,59	2,67	2,72	-0,14	6,57	8,25	9,96	10,22	8,77	11,35	8,83	3,35	3,63	6,68	3,75
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,14	6,47	-0,05	3,03	2,08	-0,44	-0,14	-0,12	-2,22	-0,74	0,67	8,95	-2,36	0,10	1,93	4,80
Jasa Pendidikan	0,36	4,70	3,28	3,88	3,05	3,86	4,52	5,86	6,20	5,13	7,16	8,78	7,27	6,37	7,39	7,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-8,34	0,50	3,79	5,41	0,25	7,78	7,87	2,80	1,29	4,82	3,59	6,00	7,33	8,70	6,43	3,69
Jasa lainnya	-6,49	5,45	3,80	3,63	1,43	5,21	7,63	9,98	11,61	8,65	9,69	10,22	10,14	8,22	9,55	4,15
<b>INFLASI</b>																
<b>INDEKS HARGA KONSUMEN</b>																
Sumatera Utara	104,50	104,83	105,35	106,26	106,26	107,91	110,71	111,82	112,77	112,77	113,09	113,54	114,22	115,30	115,30	106,59
Medan	104,18	104,50	105,03	105,92	105,92	107,45	110,24	111,34	112,38	112,38	112,58	112,96	113,64	114,84	114,84	106,21
Sibolga	105,92	106,30	107,35	108,15	108,15	110,60	113,21	114,78	115,10	115,10	116,38	117,60	118,68	118,32	118,32	107,93
Pematangsiantar	106,03	106,41	106,64	107,79	107,79	109,87	112,49	113,32	114,43	114,43	115,15	115,98	116,15	117,06	117,06	106,92
Padangsidempuan	106,58	107,28	107,77	108,68	108,68	111,29	114,48	115,93	115,64	115,64	117,27	118,04	119,00	119,05	119,05	107,75
Gunungsitoli	106,75	106,77	107,08	108,43	108,43	110,34	113,64	114,75	114,65	114,65	114,60	114,79	116,87	117,35	117,35	105,78
Karo																107,58
Deli Serdang																106,07
Labuhanbatu																110,41
Nasional	106,15	106,46	106,53	107,66	107,66	108,95	111,09	112,87	113,59	113,59	114,36	115,00	115,44	116,55	116,55	106,13

	2021					2022					2023					2024
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
<b>INFLASI</b>																
<b>LAJU INFLASI TAHUNAN (%YOY)</b>																
Sumatera Utara	1,43	1,69	2,40	1,71	1,71	3,26	5,61	6,14	6,12	6,12	4,80	2,55	2,15	2,25	2,25	3,67
Medan	1,25	1,52	2,26	1,70	1,70	3,14	5,50	6,01	6,10	6,10	4,77	2,47	2,06	2,19	2,19	3,62
Sibolga	2,08	2,82	3,87	1,86	1,86	4,42	6,50	6,92	6,42	6,42	5,22	3,88	3,40	2,80	2,80	4,28
Pematangsiantar	2,61	3,14	3,65	2,12	2,12	3,62	5,71	6,26	6,17	6,17	4,81	3,10	2,50	2,29	2,29	3,84
Padangsidempuan	1,93	1,80	2,58	1,50	1,50	4,42	6,71	7,57	6,40	6,40	5,37	3,11	2,65	2,95	2,95	4,10
Gunungsitoli	3,22	3,36	2,02	0,54	0,54	3,36	6,43	7,16	5,74	5,74	3,86	1,01	1,85	2,36	2,36	3,90
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)															4,88
Deli Serdang																2,89
Labuhanbatu																5,87
Nasional	1,37	1,33	1,60	1,87	1,87	2,64	4,35	5,95	5,51	5,51	4,97	3,52	2,28	2,61	2,61	3,05
<b>LAJU INFLASI KUMULATIF (%YTD)</b>																
Sumatera Utara	0,02	0,34	0,83	1,71	1,71	1,54	4,18	5,23	6,12	6,12	0,28	0,68	1,29	2,25	2,25	1,53
Medan	0,03	0,34	0,84	1,70	1,70	1,44	4,08	5,12	6,10	6,10	0,17	0,52	1,12	2,19	2,19	1,62
Sibolga	-0,24	0,12	1,11	1,86	1,86	2,27	4,67	6,13	6,42	6,42	1,12	2,17	3,12	2,80	2,80	2,46
Pematangsiantar	0,45	0,81	1,03	2,12	2,12	1,93	4,36	5,13	6,17	6,17	0,63	1,35	1,50	2,29	2,29	1,84
Padangsidempuan	-0,47	0,19	0,64	1,50	1,50	2,40	5,34	6,67	6,40	6,40	1,41	2,08	2,91	2,95	2,95	2,23
Gunungsitoli	-1,02	-1,00	-0,71	0,54	0,54	1,76	4,81	5,83	5,74	5,74	-0,04	0,12	1,94	2,36	2,36	1,58
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)															0,82
Deli Serdang																0,93
Labuhanbatu																3,42
Nasional	0,44	0,74	0,80	1,87	1,87	1,20	3,19	4,84	5,51	5,51	0,68	1,24	1,63	2,61	2,61	0,93
<b>LAJU INFLASI BULANAN (%MTM)</b>																
Sumatera Utara	-0,08	0,03	0,29	0,46	0,46	0,71	1,40	1,00	1,50	1,50	-0,31	0,31	0,37	0,57	0,57	0,72
Medan	-0,03	0,03	0,31	0,44	0,44	0,68	1,39	0,98	1,54	1,54	-0,30	0,29	0,38	0,61	0,61	0,73
Sibolga	-0,29	0,31	0,31	0,17	0,17	0,93	1,12	0,33	1,44	1,44	-0,66	0,62	0,44	0,08	0,08	0,72
Pematangsiantar	-0,23	0,23	0,32	0,85	0,85	0,77	1,36	1,50	1,61	1,61	-0,30	0,52	0,16	0,56	0,56	0,61
Padangsidempuan	-0,57	-0,26	0,04	0,35	0,35	1,11	1,29	0,99	0,63	0,63	-0,18	0,21	0,49	0,21	0,21	0,97
Gunungsitoli	-0,54	-0,28	-0,13	0,62	0,62	0,39	2,72	0,61	1,79	1,79	-0,91	0,21	0,38	0,21	0,21	0,37
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)															0,12
Deli Serdang																0,61
Labuhanbatu																1,62
Nasional	0,08	-0,16	-0,04	0,57	0,57	0,66	0,61	1,17	0,66	0,66	0,18	0,14	0,19	0,41	0,41	0,52

# Tabel Indikator

	2021				2022				2023				2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<b>Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)</b>	<b>267,95</b>	<b>279,66</b>	<b>285,15</b>	<b>293,09</b>	<b>302,26</b>	<b>298,79</b>	<b>303,13</b>	<b>305,72</b>	<b>303,31</b>	<b>302,79</b>	<b>306,71</b>	<b>318,32</b>	<b>320,60</b>
Giro	41,95	47,37	49,24	47,33	58,56	54,29	58,90	53,27	53,98	47,48	52,65	52,77	55,82
Tabungan	112,21	119,27	121,01	128,98	130,78	134,21	133,54	136,30	133,11	137,01	134,61	137,84	137,71
Deposito	113,79	113,03	114,90	116,78	112,93	110,29	110,69	116,15	116,22	118,30	119,45	127,71	127,16
<b>Kredit (Rp triliun)</b>	<b>230,92</b>	<b>235,44</b>	<b>230,33</b>	<b>237,79</b>	<b>243,35</b>	<b>253,87</b>	<b>255,92</b>	<b>253,50</b>	<b>249,86</b>	<b>247,67</b>	<b>253,65</b>	<b>257,44</b>	<b>262,50</b>
Modal Kerja	109,39	115,13	112,70	109,11	111,66	118,21	114,33	112,34	108,51	105,73	116,11	117,35	118,02
Investasi	58,48	57,75	53,50	64,02	65,32	68,54	73,02	70,99	70,40	69,86	63,11	62,99	65,17
Konsumsi	63,06	62,55	64,13	64,66	66,37	67,12	68,58	70,18	70,94	72,08	74,43	77,10	79,32
<b>Loan to Deposit Ratio (%)</b>	<b>86,2%</b>	<b>84,2%</b>	<b>80,8%</b>	<b>81,1%</b>	<b>80,5%</b>	<b>85,0%</b>	<b>84,7%</b>	<b>82,9%</b>	<b>82,4%</b>	<b>81,8%</b>	<b>82,7%</b>	<b>80,9%</b>	<b>81,9%</b>
<b>NPL Kredit (%)</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,26%</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,76%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,43%</b>	<b>2,46%</b>	<b>2,44%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,39%</b>	<b>2,03%</b>	<b>1,81%</b>	<b>1,92%</b>

Sumber: Data Bank Umum Sumatera Utara Menurut Lokasi Proyek

SISTEM PEMBAYARAN	2021				2022				2023				2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<b>SP TUNAI</b>													
<i>Inflow</i> (Satker Kas- dlm juta)	14.640.646	12.370.252	8.242.936	6.772.770	11.260.835	12.472.201	9.543.674	6.153.405	13.385.862	10.844.317	9.543.674	4.498.681	12.800.416
<i>Outflow</i> (Satker Kas- dlm juta)	(4.775.401)	(12.883.954)	(7.944.287)	(14.006.024)	(6.142.670)	(9.224.180)	(6.933.616)	(12.132.195)	(6.212.541)	(9.939.636)	(6.933.616)	(13.867.608)	(7.329.219)
<i>Netflow</i> (Satker Kas- dlm juta)	9.865.245	(513.702)	298.649	(7.233.254)	5.118.165	3.248.021	2.610.058	(5.978.790)	7.173.321	904.680	2.610.058	(9.368.927)	5.471.198
<b>SP NON TUNAI</b>													
RTGS- volume	69.323	70.891	72.764	82.477	70.653	68.855	63.383	70.181	57.147	53.965	63.383	62.901	52.795
RTGS- nominal (Rp milyar)	233.777	256.453	218.342	232.096	219.297	228.638	202.965	233.040	185.521	175.577	202.965	211.583	178.232
SKNBI- volume	692.628	672.999	637.212	718.199	605.239	602.556	593.057	607.008	500.721	502.369	593.057	559.675	435.213
SKNBI- nominal (Rp milyar)	38.565	37.735	36.757	42.526	36.793	36.235	33.734	34.540	30.656	27.983	33.734	30.812	26.894



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## ASESMEN MAKRO EKONOMI REGIONAL

**Perekonomian Sumatera Utara tetap kuat, meskipun relatif melambat di triwulan I 2024.** Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,88% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 5,02% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Sumatera Utara disebabkan oleh perlambatan kinerja konsumsi pemerintah dan investasi seiring sikap *wait and see* investor dan masih terfokusnya kegiatan pemerintah pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Meski demikian, perekonomian Sumatera Utara tetap tumbuh kuat ditopang konsumsi rumah tangga seiring perayaan Tahun Baru Imlek serta pemulihan aktivitas ekspor impor ditengah tren pemulihan harga komoditas.

Dari sisi lapangan usaha (LU), LU Konstruksi mengalami perlambatan pada triwulan I 2024 seiring *wait and see* sektor swasta di tengah berlangsungnya Pemilu serta progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah memasuki tahap akhir. Selain itu, LU Perdagangan serta Transportasi dan Pergudangan melambat seiring normalisasi pertumbuhan aktivitas wisata dan lemahnya aktivitas ekspor CPO seiring penurunan produksi Tandan Buah Segar (TBS). Kendati demikian, moderasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang lebih dalam mampu tertahan oleh akselerasi LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan ditopang oleh meningkatnya produksi padi seiring dengan masuknya periode panen, tren normalisasi harga pupuk yang mendukung keterjangkauan harga bahan baku dan mendorong perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP), serta tetap kuatnya permintaan domestik.

## ASESMEN KEUANGAN DAERAH

**Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dari sisi pendapatan, namun menurun dari sisi penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.** Realisasi pendapatan pada triwulan I 2024 sebesar 20,44% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi triwulan I 2023 sebesar 19,29% yang utamanya didorong oleh meningkatnya realisasi di komponen Pendapatan Transfer. Di sisi lain, realisasi belanja APBD pada triwulan I 2024 mengalami penurunan didorong oleh penurunan realisasi pada hampir seluruh komponen belanja utamanya Belanja Modal seiring dengan masih minimnya progres lelang seiring fokus Pemerintah Daerah yang masih terpusat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak serta penggunaan fasilitas eksisting untuk *venue* Pekan Olahraga Nasional (PON) XIII Aceh-Sumut 2024. Lebih lanjut, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2024 terpantau sedikit menurun hingga -1,82% (yoy) dari tahun 2023. Sementara itu, realisasinya pada triwulan I 2024 adalah sebesar 22,45% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2023 sebesar 14,67% dari pagu. Peningkatan realisasi belanja APBN di Sumatera Utara terjadi pada seluruh komponen belanja kecuali Belanja Modal.



## ASESMEN INFLASI

**Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan di atas sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 2,5±1,0% (yoy).** Inflasi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 3,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,25% (yoy). Inflasi Sumatera Utara juga tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy) pada triwulan laporan. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Adapun berdasarkan komoditas, inflasi triwulan laporan utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan tata niaga beras yang belum efisien. Selanjutnya, kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh berkurangnya pasokan ditengah tingginya permintaan. Kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam disebabkan oleh kenaikan biaya input. Sementara itu, peningkatan harga SKM disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di awal tahun sebesar 10%. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan *urban farming* dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

## ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN SERTA UMKM

**Penyaluran kredit di Sumatera Utara terakselerasi dengan risiko yang terjaga.** Pada triwulan I 2024, penyaluran kredit di Sumatera Utara tumbuh menguat sebesar 5,06% yoy dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,55% yoy. Hal ini didorong oleh tetap kuatnya pertumbuhan kredit Konsumsi dan Modal Kerja di tengah masih lemahnya kredit Investasi. Kredit Rumah Tangga Sumatera Utara tumbuh solid seiring dengan perayaan Imlek serta berlanjutnya insentif makroprudensial dan fiskal dalam mendorong pembelian perumahan dan kendaraan bermotor. Penyaluran kredit kepada UMKM juga tetap solid dan berimbang antara kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Kinerja kredit korporasi di sektor konstruksi, industri dan perdagangan tumbuh kuat seiring berlanjutnya investasi sektor swasta dan tingginya permintaan jelang HBKN Idul Fitri. Meski demikian, kredit di sektor pertanian masih tertahan seiring dana internal sektor swasta yang masih memadai. Di satu sisi, risiko kredit cenderung stabil di tengah kesehatan perbankan yang terjaga. Secara keseluruhan, intermediasi perbankan terjaga dalam kondisi sehat dengan LDR sebesar 81,7% di tengah suku bunga yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.



## **ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH**

**Pada triwulan I 2024, transaksi sistem pembayaran terus terakselerasi khususnya pada pembayaran nontunai tunai sejalan dengan meningkatnya akseptasi keuangan digital Masyarakat Sumatera Utara.** Hal tersebut terkonfirmasi dari terus meningkatnya transaksi non tunai seperti kartu kredit tumbuh 18,60 (yoy), Uang Elektronik 16,38% (yoy), penyaluran bantuan sosial nontunai tunai yang masih berjalan dengan lancar, serta akselerasi perluasan implementasi *Quick Response Code* Indonesia yang masih berlanjut. Dari sisi transaksi antar negara di Provinsi Sumatera Utara juga masih berlanjut yang tercermin dari masih tumbuhnya transaksi KUPVA maupun PJP LR sejalan dengan mobilitas Masyarakat yang meningkat pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Upaya perluasan implementasi non tunai terus dilakukan melalui kolaborasi program yang dilakukan bersama mitra strategi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Jasa Pembayaran baik bank dan nonbank bank seperti salah satunya melalui program *road to FEKDI: SEMESTA FEST* Tahun 2024.

## **ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN**

**Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian.** Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat yang tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2024 menjadi 5,10% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,24%. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 8,15% dari 8,33% pada bulan September 2022. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio Gini pun turut membaik. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian.



## PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

**Pada tahun 2024, ekonomi Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat pada rentang 4,5-5,3% (yoy), meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global dan konflik geopolitik.** Dari sisi pengeluaran, perekonomian Sumatera Utara untuk keseluruhan tahun 2024 diperkirakan tetap kuat didukung pemulihan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi PMTB. Sementara itu, *rebound* ekonomi Tiongkok yang tidak setinggi perkiraan akibat permasalahan struktural pada perekonomian Tiongkok, masih berlanjutnya konflik geopolitik, serta masih lemahnya aktivitas sektor manufaktur di negara-negara tujuan ekspor diperkirakan dapat menahan laju kinerja ekspor Sumatera Utara di 2024. Dari sisi lapangan usaha, akselerasi kinerja lapangan usaha (LU) Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan diperkirakan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan normalisasi harga bahan baku (pupuk), serta permintaan domestik yang tetap kuat melalui implementasi program biofuel B35 dan B40 yang mendukung industri kelapa sawit. Selain itu, terdapat kecenderungan tren penurunan suku bunga perbankan di level global seiring semakin terkendalinya laju inflasi global, yang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi. Beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai seperti konflik geopolitik yang berkepanjangan sehingga menghambat aktivitas perdagangan internasional dan belum pulihnya perekonomian negara mitra dagang utama Sumatera Utara seperti Tiongkok. **Di sisi lain, stabilitas inflasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran target  $2,5\pm 1\%$  (yoy)**, dengan fokus pada sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sumatera Utara.





Foto : Candi Bahal, Padang Lawas, Sumatera Utara  
Sumber : Shutterstock



## Bab I

# Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

### **Perekonomian Sumatera Utara tetap kuat, meskipun relatif melambat di triwulan I 2024.**

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,88% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 5,02% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Sumatera Utara disebabkan oleh perlambatan kinerja konsumsi pemerintah dan investasi seiring sikap *wait and see* investor dan masih terfokusnya kegiatan pemerintah pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Meski demikian, perekonomian Sumatera Utara tetap tumbuh kuat ditopang konsumsi rumah tangga seiring perayaan Tahun Baru Imlek serta pemulihan aktivitas ekspor impor ditengah tren pemulihan harga komoditas. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU Konstruksi mengalami perlambatan pada triwulan I 2024 seiring *wait and see* sektor swasta di tengah berlangsungnya Pemilu serta progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah memasuki tahap akhir. Selain itu, LU Perdagangan serta Transportasi dan Pergudangan melambat seiring normalisasi pertumbuhan aktivitas wisata dan lemahnya aktivitas ekspor CPO seiring penurunan produksi Tandan Buah Segar (TBS). Kendati demikian, moderasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang lebih dalam mampu tertahan oleh akselerasi LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan ditopang oleh meningkatnya produksi padi seiring dengan masuknya periode panen, tren normalisasi harga pupuk yang mendukung keterjangkauan harga bahan baku dan mendorong perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP), serta tetap kuatnya permintaan domestik.



## 1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA TETAP KUAT



### PERTUMBUHAN EKONOMI % (yoy)

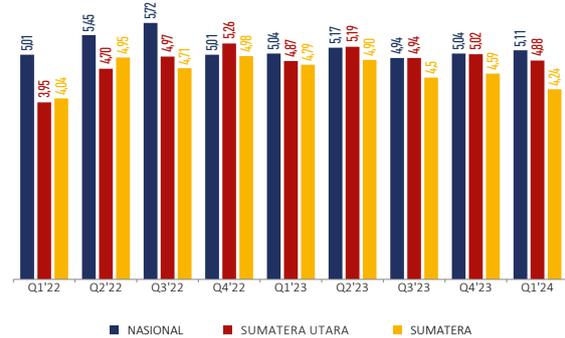
SUMATERA UTARA **5,02** ▼ **4,88**

■ Triwulan IV 2023 ■ Triwulan I 2024

NASIONAL **5,04** ▲ **5,11**

**Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tetap kuat, meskipun relatif melambat di triwulan I 2024.** Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,88% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 5,02% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera yang tumbuh sebesar 4,24% (yoy) – (Grafik 1.1). Adapun pada triwulan I 2024, posisi andil terbesar perekonomian Sumatera masih dipegang oleh Sumatera Utara.

**Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah dan investasi mengalami perlambatan di tengah kuatnya konsumsi rumah tangga dan ekspor.** Kinerja konsumsi pemerintah mengalami perlambatan seiring siklus penyerapan anggaran belanja pemerintah yang masih rendah di awal tahun. Investasi juga melambat sejalan dengan sikap *wait and see* investor di tengah berlangsungnya Pemilu 2024, serta pelemahan kinerja sektor konstruksi dan volume penjualan semen domestik. Di sisi lain, perlambatan ekonomi Sumatera Utara lebih dalam tertahan oleh akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tetap kuatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan perayaan Tahun Baru Imlek dan indikasi pergeseran pola konsumsi menjelang bulan Ramadhan. Hal tersebut terkonfirmasi dari Survei Penjualan Eceran



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1 Perkembangan PDRB dan PDB Triwulanan

(SPE), Survei Konsumen (SK), dan kredit rumah tangga yang meningkat. Selanjutnya, kinerja ekspor masih membukukan pertumbuhan positif. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan ekspor dan pemulihan harga komoditas ekspor utama Sumatera Utara pada triwulan I 2024.

**Dari sisi lapangan usaha (LU), LU Konstruksi, Perdagangan, serta Transportasi dan Pergudangan mengalami perlambatan di tengah akselerasi LU Pertanian dan Industri Pengolahan.** LU Konstruksi mengalami perlambatan seiring *wait and see* sektor swasta di tengah berlangsungnya Pemilu yang tecermin dari perlambatan penjualan semen. Selain itu, progres konstruksi proyek pemerintah juga mengalami perlambatan seiring progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah memasuki tahap akhir serta masih minimnya progres lelang seiring fokus Pemerintah Daerah yang masih terpusat pada penyelenggaraan Pemilu. Selanjutnya, di tengah kuatnya permintaan domestik, perlambatan LU Perdagangan serta Transportasi dan Pergudangan didorong oleh terbatasnya pertumbuhan volume ekspor komoditas unggulan serta normalisasi pertumbuhan aktivitas wisata. Di sisi lain, LU Pertanian dan Industri Pengolahan mengalami akselerasi pada triwulan I 2024. Pertanian tumbuh meningkat ditopang oleh meningkatnya produksi padi seiring dengan masuknya periode panen dan tren normalisasi harga pupuk yang mendukung keterjangkauan harga bahan baku dan mendorong perbaikan Nilai Tukar



**Tabel 1.1** Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara

	2021					2022					2023					2024
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
<b>PDRB</b>	<b>-1,85</b>	<b>4,95</b>	<b>3,67</b>	<b>3,81</b>	<b>2,61</b>	<b>3,95</b>	<b>4,70</b>	<b>4,97</b>	<b>5,26</b>	<b>4,73</b>	<b>4,87</b>	<b>5,19</b>	<b>4,94</b>	<b>5,02</b>	<b>5,01</b>	<b>4,88</b>
<b>PENGELUARAN</b>																
Konsumsi Rumah Tangga	-4,55	5,20	3,09	3,45	1,69	3,58	4,64	4,63	5,33	4,55	5,69	6,20	6,42	5,41	5,59	5,53
Konsumsi LNPRT	-5,84	-2,71	-0,50	-1,25	-2,59	3,71	5,93	4,77	7,43	5,47	7,46	7,69	8,72	13,04	9,27	17,69
Konsumsi Pemerintah	0,03	2,99	3,57	6,82	3,46	-1,54	-0,21	-7,01	-4,23	-3,34	5,19	6,16	-0,04	4,81	3,98	2,04
PMTB	-3,96	6,27	6,07	5,82	3,47	5,95	2,12	3,90	3,36	3,80	3,37	3,36	5,28	6,21	4,48	4,38
Ekspor	7,99	19,65	19,19	13,71	15,09	12,61	11,16	12,32	9,77	11,44	2,45	-0,71	-5,11	0,28	-0,40	8,78
Impor	4,70	25,51	25,40	18,30	18,34	15,94	9,61	11,64	8,29	11,20	2,06	-2,52	-6,97	0,73	-1,70	10,42

Sumber: BPS (diolah)

Petani Perkebunan Rakyat (NTPR), Hortikultura (NTPH), dan Tanaman Pangan (NTPP). Selanjutnya, akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan seiring dengan tetap kuatnya permintaan.

(SPE) yang konsisten meningkat dari triwulan III 2023 khususnya untuk makanan, minuman dan tembakau yang naik menjadi 464,2 pada periode laporan – (Grafik 1.2).

## 1.2 KINERJA SEKTOR PENGELUARAN TETAP KUAT DIDUKUNG PERMINTAAN YANG TERJAGA



**KONSUMSI RUMAH TANGGA**  
%(YOY)

**5,41**

■ Triwulan IV 2023

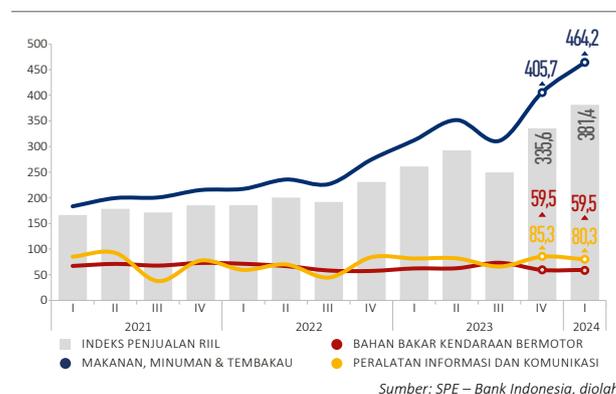


**5,53**

■ Triwulan I 2024

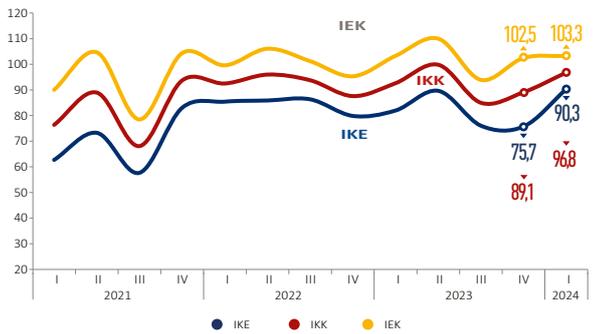
Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2024 menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, yakni tumbuh sebesar 4,88% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (yoy). Tetap kuatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan meningkatnya permintaan pada perayaan Tahun Baru Imlek dan indikasi pergeseran konsumsi menjelang bulan Ramadhan sehingga permintaan konsumsi terserap di triwulan I 2024. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga juga tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) hasil Survei Penjualan Eceran

Sejalan dengan SPE, Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pada periode laporan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatatkan angka 96,8 pada triwulan I 2024, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 89,1 – (Grafik 1.3). Kenaikan IKK didorong oleh peningkatan baik Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) maupun Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE). Daya beli masyarakat yang meningkat tercermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 3,67% pada tahun 2024, diiringi dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi, mendorong optimisme penghasilan masyarakat pada 6 bulan mendatang dan meningkatkan IEK. Selanjutnya kenaikan IKE didorong oleh keyakinan masyarakat terhadap kegiatan usaha



Sumber: SPE – Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.2** Survei Penjualan Eceran

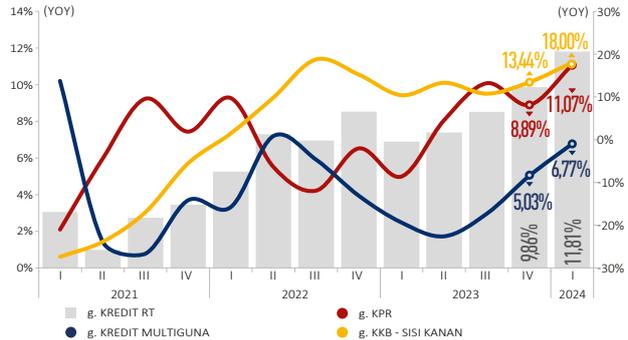


Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.3** Survei Konsumen Bank Indonesia

yang lebih baik pada 6 bulan mendatang. Alasan utama optimisme IKE tersebut yakni kenaikan harga yang terkendali.

**Penyaluran kredit rumah tangga juga terpantau meningkat pada triwulan laporan.** Kredit rumah tangga tumbuh 11,81% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 9,86% (yoy) - (Grafik 1.4). Berdasarkan segmennya, pertumbuhan kredit rumah tangga tetap kuat baik dari jenis kredit KPR (4,99%, yoy), KKB (10,40%, yoy), dan Multiguna (2,48%, yoy).



Sumber: LBU – Bank Indonesia diolah

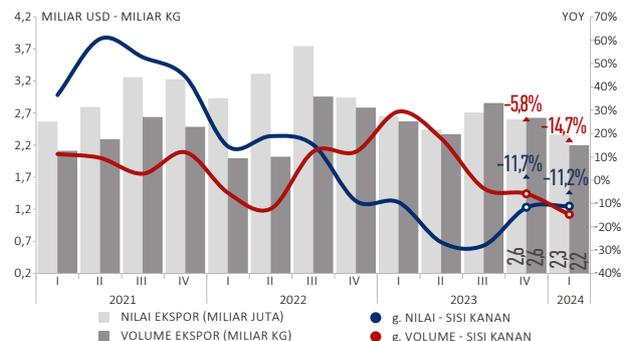
**Grafik 1.4** Kredit Konsumsi

(Grafik 1.6) dan peningkatan harga komoditas ekspor utama di pasar internasional, utamanya komoditas karet dan kopi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, harga komoditas CPO masih berada pada level yang rendah seiring dengan upaya menjaga daya saing ekspor ditengah harga komoditas substitusi seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai yang masih sangat terjangkau – (Grafik 1.7).

**Di sisi lain, meskipun kinerja ekspor Sumatera Utara membaik namun belum sepenuhnya pulih. Hal ini tecermin dari aktivitas bisnis dan industri sebagian besar negara mitra dagang utama yang berada di bawah zona ekspansif pada periode laporan.** Aktivitas bisnis di negara mitra seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Zona Eropa, dan Amerika Serikat terpantau masih tertahan, tecermin dari indikator *Purchasing Managers' Index* (PMI) *Manufacturing* negara tersebut yang berada di bawah level ekspansi pada triwulan I 2024. Di sisi lain, PMI India yang melanjutkan tren ekspansi sejak triwulan



**Komponen ekspor menguat seiring pemulihan harga komoditas di tengah risiko berlanjutnya konflik geopolitik.** Pada triwulan I 2024, ekspor mengalami pemulihan dari 0,28% (yoy) menjadi 8,78% (yoy) seiring dengan tren pemulihan nilai ekspor luar negeri serta masih kuatnya kinerja ekspor antara-daerah – (Grafik 1.5). Hal ini juga didukung oleh indikator *Likert Scale* Bank Indonesia yang menunjukkan adanya peningkatan permintaan ekspor–



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

**Grafik 1.5** Nilai dan Volume Ekspor



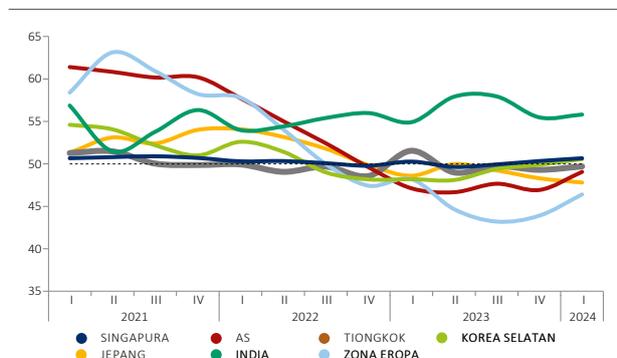
Sumber: Liaison Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.6** Likert Scale Permintaan Domestik dan Ekspor

III 2020 dan PMI Singapura yang kembali pada level ekspansi pada triwulan laporan mampu menopang kinerja ekspor lebih tinggi (Grafik 1.8).

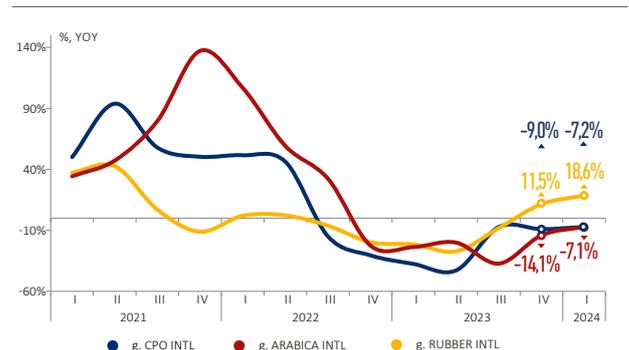
**Ditinjau dari sisi komoditas, kinerja ekspor CPO masih tertahan.**

Sebagai salah satu penghasil terbesar kelapa sawit di Indonesia, ekspor CPO berkontribusi sebesar 23,9% terhadap total ekspor Sumatera Utara– (Grafik 1.9). Meski demikian, harga CPO di pasar internasional masih lemah ditengah harga minyak substitusi (minyak bunga matahari dan minyak kedelai) yang relatif lebih bersaing dibandingkan CPO. Di satu sisi, curah hujan yang tinggi disertai jumlah hari hujan yang terbatas menyebabkan produksi Tandan Buah Segar (TBS) mengalami penurunan. Ditengah kebutuhan CPO nasional yang mencapai 40% dari total produksi, volume ekspor CPO mengalami penurunan. Adapun nilai ekspor CPO tercatat turun -34,1% (yoy), lebih dalam dari triwulan IV 2023 yang berkontraksi -28,5% (yoy). Sejalan dengan penurunan nilai ekspor CPO, volume ekspor CPO pada triwulan I



Sumber: Tradingeconomics, Bloomberg, diolah

**Grafik 1.8** Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacturing



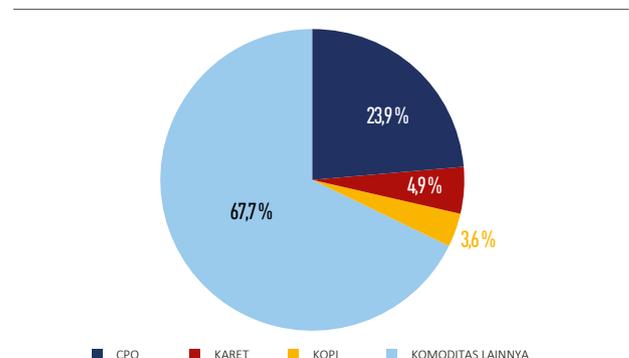
Sumber: Bloomberg, diolah

**Grafik 1.7** Pertumbuhan Harga Komoditas Internasional

2024 turun lebih dalam menjadi -35,5% (yoy), dengan realisasi volume tercatat sebesar 626,3 ton lebih rendah dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 883,1 ton – (Grafik 1.10).

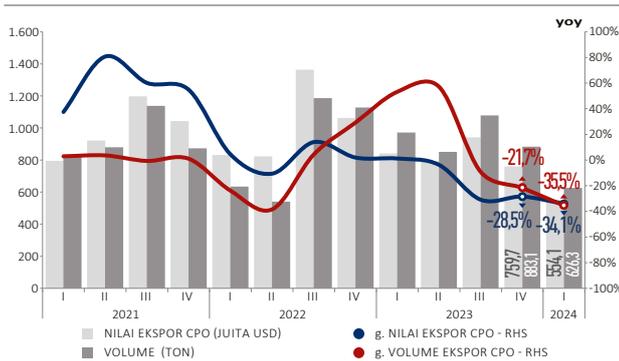
Sejalan dengan perlambatan ekspor CPO, ekspor komoditas karet juga mencatat penurunan pada triwulan I 2024. Pada triwulan laporan, ekspor karet mencatatkan pangsa sebesar 4,9% – (Grafik 1.9). Di tengah perbaikan harga karet internasional, nilai dan volume ekspor karet masing-masing berkontraksi sebesar -17,9% (yoy) dan -27,4% (yoy) di triwulan I 2024 – (Grafik 1.11). Hal ini ditengarai dampak dari berkurangnya produksi karet seiring peningkatan alih fungsi lahan dan penurunan produktivitas lahan karet – (Grafik 1.8).

Berbeda dengan ekspor CPO dan karet, kinerja ekspor komoditas kopi pada triwulan I 2024 menunjukkan perbaikan dengan nilai ekspor kopi mencapai 73,3% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya



Sumber: Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.9** Pangsa Komoditas Ekspor



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.10 Ekspor CPO

yang masih berkontraksi sebesar -21,1% (yoy). Harga kopi di pasar internasional yang mulai pulih terbatas pada triwulan I 2024 berdampak pada peningkatan nilai ekspor kopi. Nilai ekspor kopi pada periode laporan tercatat sebesar USD82,4 juta, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD53,4 juta. Nilai ekspor yang meningkat juga sejalan dengan volume ekspor yang meningkat. Volume ekspor kopi pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 11,0 ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan volume ekspor sebesar 7,8 ton – (Grafik 1.12).



IMPOR  
%(YOY)

0,73

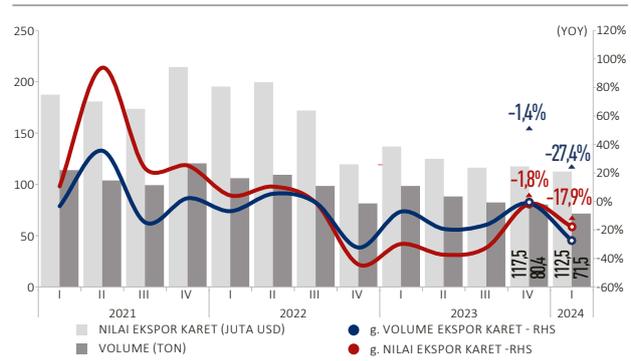
■ Triwulan IV 2023



10,42

■ Triwulan I 2024

**Sejalan dengan kinerja ekspor, komponen impor triwulan I 2024 mengalami peningkatan.** Kinerja impor Sumatera Utara triwulan I 2024 tumbuh 10,42% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,73% (yoy). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, nilai impor berkontraksi sebesar -0,2% (yoy) pada triwulan laporan, membaik dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -3,5% (yoy). Kenaikan nilai impor mengindikasikan aktivitas ekonomi yang

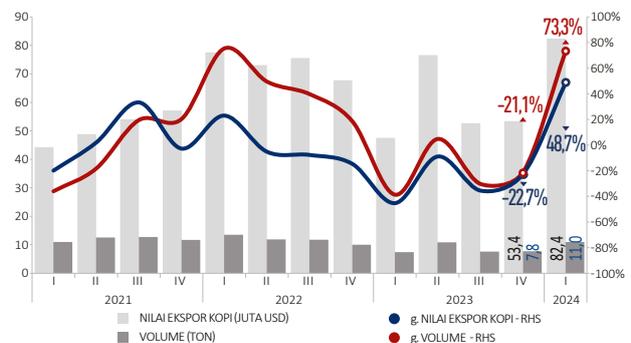


Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.11 Ekspor Karet

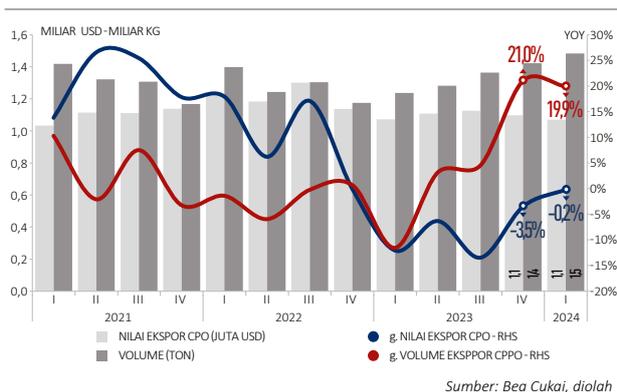
meningkat pada periode laporan pasca HBKN Natal dan Tahun Baru. Adapun pertumbuhan volume impor pada triwulan laporan sebesar 19,9% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 21,0% (yoy) – (Grafik 1.13).

**Berdasarkan kelompoknya, realisasi impor bahan baku mendominasi pangsa nilai impor Sumatera Utara dengan pangsa sebesar 75,92% diikuti barang konsumsi dengan pangsa 16,47%.** Akibatnya, tetap tingginya nilai impor bahan baku menjadi USD812,4 juta dan perbaikan nilai impor barang konsumsi menjadi USD176,2 juta pada periode laporan mendorong tetap kuatnya nilai impor barang di Sumatera Utara secara umum – (Grafik 1.14). Perbaikan kinerja impor juga tecermin pada *Likert Scale* Bank Indonesia yang mencerminkan peningkatan permintaan oleh aktivitas industri dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya – (Grafik 1.6).

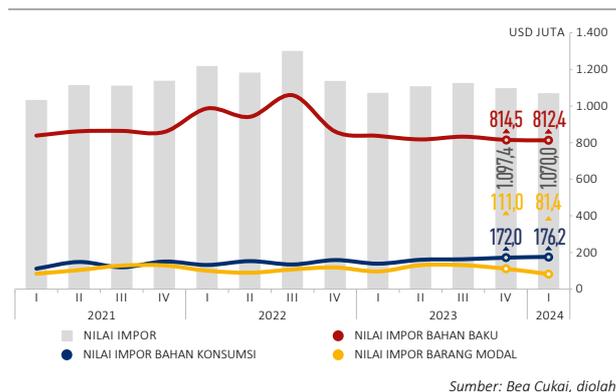


Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.12 Ekspor Kopi



Grafik 1.13 Nilai dan Volume Impor



Grafik 1.14 Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang



**KONSUMSI  
PEMERINTAH**  
%(YOY)

4,81 ▼ 2,04

■ Triwulan IV 2023

■ Triwulan I 2024

**Konsumsi pemerintah pada triwulan I 2024 tertantau mengalami perlambatan.** Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,04% (yoy), menurun dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 4,81% (yoy). Kinerja konsumsi pemerintah mengalami perlambatan seiring siklus penyerapan anggaran belanja pemerintah yang masih rendah di awal tahun.

Kondisi ini tecermin dari realisasi belanja APBD triwulan I 2024 yang mengalami penurunan, didorong oleh penurunan penyerapan pada hampir seluruh komponen belanja. Pada triwulan I 2024, realisasi belanja APBD Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp1,43 triliun atau 9,64% dari pagu belanja tahun 2024, lebih rendah dari realisasi yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,84 triliun atau terserap 12,91% dari pagu P-APBD 2023. Adapun realisasi Belanja Modal mencatatkan penurunan terdalam disebabkan oleh masih minimnya progres lelang seiring fokus Pemerintah Daerah yang masih terpusat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak serta penggunaan fasilitas eksisting untuk *venue* PON XIII Aceh-Sumut 2024.



**INVESTASI  
PMTB**  
%(YOY)

6,21 ▲ 4,38

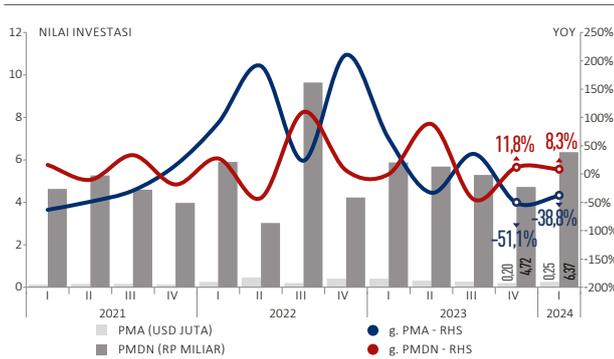
■ Triwulan IV 2023

■ Triwulan I 2024

**Kinerja investasi yang tecermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sedikit melambat mengindikasikan sikap *wait and see* investor terhadap perekonomian domestik di tengah berlangsungnya Pemilu 2024.** Kinerja investasi PMTB sedikit melambat pada triwulan I 2024 dengan capaian sebesar 4,38% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 6,21% (yoy). Melambatnya kinerja investasi juga tecermin dari pelemahan kinerja sektor konstruksi dan penurunan volume penjualan semen domestik pada triwulan laporan yang tumbuh sebesar 1,83% (yoy), menurun



Grafik 1.15 Pengadaan Semen

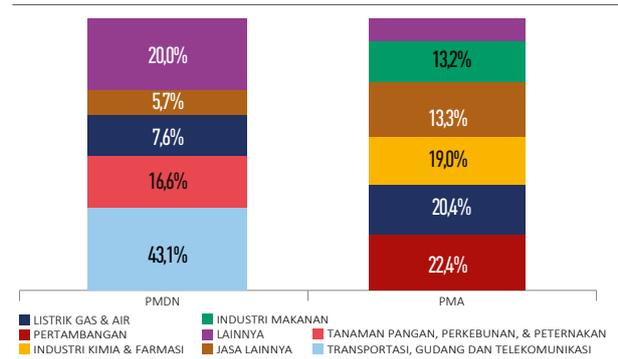


Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, diolah

Grafik 1.16 Realisasi Investasi

dari triwulan sebelumnya yang sebesar 34,59% (yoy) (Grafik 1.15).

Adapun nilai investasi PMDN pada triwulan I 2024 mencapai Rp6,37 triliun atau tumbuh sebesar 8,3% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,8% (yoy) – (Grafik 1.16). Realisasi investasi PMDN utamanya berasal dari sektor Transportasi, Gudang, dan



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, diolah

Grafik 1.17 Pangsa Realisasi Investasi

Telekomunikasi (43,1%) dan sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (16,6%) – (Grafik 1.17). Sementara itu, nilai investasi PMA pada triwulan I 2024 mengalami kontraksi sebesar -38,8% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -51,1% (yoy). Perbaikan PMA ini utamanya disebabkan oleh investasi di sektor Pertambangan (22,4%) serta sektor Listrik, Gas, dan Air (20,4%).

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara

	2021					2022					2023					2024
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
<b>PDRB</b>	-1,85	4,95	3,67	3,81	2,61	3,95	4,70	4,97	5,26	4,73	4,87	5,19	4,94	5,02	5,01	4,88
<b>LAPANGAN USAHA</b>																
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	4,94	4,73	5,63	3,87	5,00	5,25	5,08	5,35	5,17	3,46	3,21	2,68	2,98	3,02	3,42
Pertambangan dan Penggalan	-3,14	2,89	4,21	3,90	1,92	2,20	2,83	2,54	3,15	2,69	3,78	3,49	3,37	3,23	3,46	3,91
Industri Pengolahan	1,04	2,36	1,26	1,07	1,43	0,68	2,04	2,66	2,53	1,98	2,61	4,08	3,92	3,13	3,44	3,73
Pengadaan Listrik, Gas	-0,24	5,48	4,69	9,86	4,93	7,27	7,67	4,53	0,15	4,81	0,73	2,21	2,36	3,33	2,16	3,22
Pengadaan Air	3,34	4,95	3,68	2,55	3,62	2,04	2,17	1,27	3,19	2,17	2,32	1,86	4,47	2,89	2,89	3,10
Konstruksi	-3,07	4,98	3,93	3,09	2,18	2,50	2,80	2,82	3,30	2,86	5,49	5,56	6,81	7,60	6,41	6,43
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,21	6,87	4,84	5,21	3,62	5,82	6,70	6,79	6,92	6,56	5,56	4,66	6,06	6,91	5,81	5,42
Transportasi dan Pergudangan	-18,30	5,94	-0,40	1,72	-3,63	6,16	12,10	16,28	16,02	12,69	15,64	12,29	12,41	11,38	13,12	7,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-15,11	6,49	4,13	4,17	-0,81	4,06	6,62	8,04	9,79	7,16	9,12	9,21	11,19	10,87	10,22	11,63
Informasi dan Komunikasi	4,64	6,86	7,12	7,36	6,51	7,38	7,59	7,62	7,78	7,60	7,76	7,80	7,82	7,83	7,80	7,85
Jasa Keuangan	1,53	7,87	8,43	0,33	4,46	7,54	1,35	1,07	5,43	3,81	1,60	7,57	7,68	5,29	5,50	4,25
Jasa Perantara Keuangan	5,87	11,00	12,11	0,41	7,21	9,83	0,44	0,02	6,19	4,06	0,00	0,04	7,37	3,94	4,89	2,70
Real Estate	0,52	3,70	2,89	2,89	2,50	3,11	4,59	4,60	5,75	4,52	6,66	4,74	1,85	-0,25	3,20	3,03
Jasa Perusahaan	-8,81	3,59	2,67	2,72	-0,14	6,57	8,25	9,96	10,22	8,77	11,35	8,83	3,35	3,63	6,68	3,75
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,14	6,47	-0,05	3,03	2,08	-0,44	-0,14	-0,12	-2,22	-0,74	0,67	8,95	-2,36	0,10	1,93	4,80
Jasa Pendidikan	0,36	4,70	3,28	3,88	3,05	3,86	4,52	5,86	6,20	5,13	7,16	8,78	7,27	6,37	7,39	7,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-8,34	0,50	3,79	5,41	0,25	7,78	7,87	2,80	1,29	4,82	3,59	6,00	7,33	8,70	6,43	3,69
Jasa lainnya	-6,49	5,45	3,80	3,63	1,43	5,21	7,63	9,98	11,61	8,65	9,69	10,22	10,14	8,22	9,55	4,15

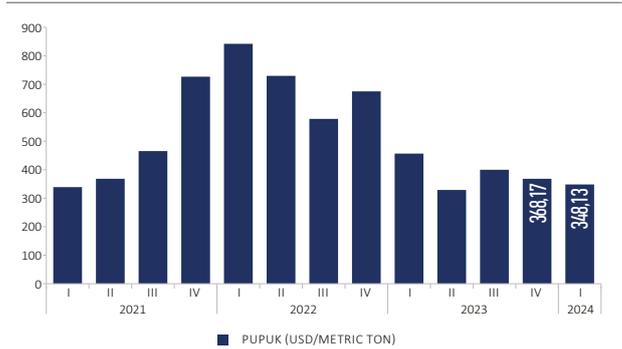
Sumber: BPS (diolah)



**Bank Indonesia bersama tim North Sumatra Invest (NSI) secara aktif terus mendorong promosi investasi di Sumatera Utara.** Pada triwulan I 2024, kegiatan tersebut di antaranya peluncuran NSI *Investment Challenge* (NICe) 2024 pada 26 Februari 2024. Kegiatan NICe 2024 bertujuan menjangkau peluang investasi di daerah yang berpotensi ditawarkan melalui kompetisi penulisan dokumen studi pendahuluan. Peluncuran NICe juga dilanjutkan dengan *capacity building* kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang membahas mengenai indikator penilaian dan pedoman penulisan dokumen studi pendahuluan. Selain itu, NSI turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan promosi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri diantaranya *bilateral meeting* dengan *Enterprise Singapore* (ESG) dan *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) pada 28 Februari 2024, *one-on-one meeting* Caldera Sobek Corp dari Bali dengan Toba *Caldera Resort* (TCR) pada 29 Februari 2024, kunjungan Pensutra Alliance Berhad Malaysia ke lokasi proyek investasi *Airport City* pada 6-7 Maret 2024, serta *bilateral meeting* bersama Konsul Kehormatan Thailand di Kota Medan dan *Thailand Board of Investment* (BOI) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, TCR, Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT), Kawasan Industri Medan (KIM), *Airport City*, *Sport Center*, dan *Bus Rapid Transit* (BRT) Mebidang pada 21 Maret 2024.

### 1.3 LAPANGAN USAHA PERTANIAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN TUMBUH LEBIH TINGGI

**Kinerja LU Pertanian melanjutkan tren akselerasi dan meningkat pada triwulan I 2024 didorong oleh pemulihan harga komoditas pangan.** Kinerja LU Pertanian pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 3,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,98% (yoy). Kondisi ini didukung oleh meningkatnya produksi padi seiring dengan masuknya periode panen dan



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.18 Perkembangan Harga Pupuk



**PERTANIAN**  
% (yoy)

2,98

■ Triwulan IV 2023

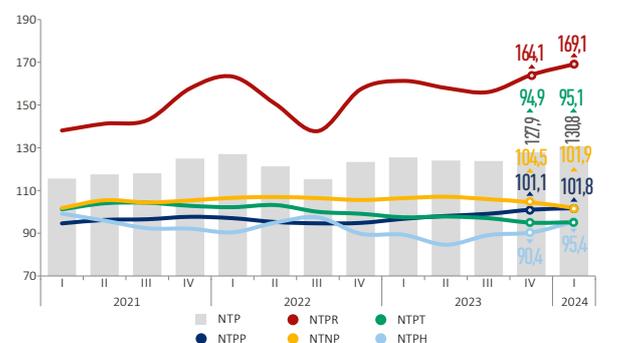


3,42

■ Triwulan I 2024

tren normalisasi harga pupuk – (Grafik 1.18) yang mendukung keterjangkauan harga bahan baku dan mendorong perbaikan NTPR, NTPH, dan NTPP – (Grafik 1.19). Adapun Nilai Tukar Petani (NTP) secara total pada triwulan I 2024 sebesar 130,8, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 sebesar 127,9.

Kenaikan NTP ini juga tecermin dari peningkatan harga gabah kering giling dan gabah kering panen pada periode laporan – (Grafik 1.20).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.19 Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS, BKP Kementan, diolah

**Grafik 1.20** Perkembangan Harga Gabah

Selain itu, kenaikan pertumbuhan LU Pertanian juga didukung oleh perbaikan harga Tandan Buah Segar (TBS). Harga TBS tumbuh mencapai 0,1% (yoy) pada triwulan I 2024, membaik dari periode sebelumnya yang berkontraksi sebesar -6,1% (Grafik 1.21).

Kinerja pembiayaan LU Pertanian juga mengalami perbaikan pada periode laporan. Pertumbuhan kredit pertanian pada triwulan I 2024 mencapai -4,4% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -9,7% (yoy) – (Grafik 1.22). Hal ini disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan perbankan pada LU Pertanian dari Rp42,6 triliun di triwulan IV 2023 menjadi Rp44,5 triliun di triwulan laporan.

**Kinerja LU Industri Pengolahan turut terakselerasi seiring dengan tetap kuatnya permintaan dari negara mitra dagang.** LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 3,73% (yoy), lebih tinggi dibandingkan



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, diolah

**Grafik 1.21** Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit

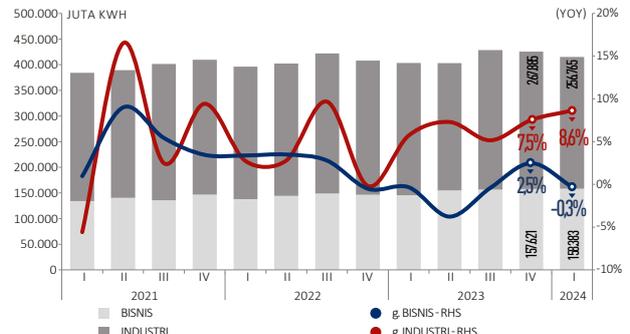


triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,13% (yoy). Aktivitas industri negara mitra dagang utama seperti India dan Singapura yang berada di zona ekspansif – (Grafik 1.8) meningkatkan kinerja industri pengolahan. Kinerja LU Industri Pengolahan yang lebih baik ini turut tercermin dari konsumsi listrik bisnis di Sumatera Utara yang mengalami kenaikan pada triwulan I 2024 – (Grafik 1.23) disertai adanya kenaikan biaya bahan baku yang turut mendorong kenaikan biaya produksi – (Grafik 1.24).



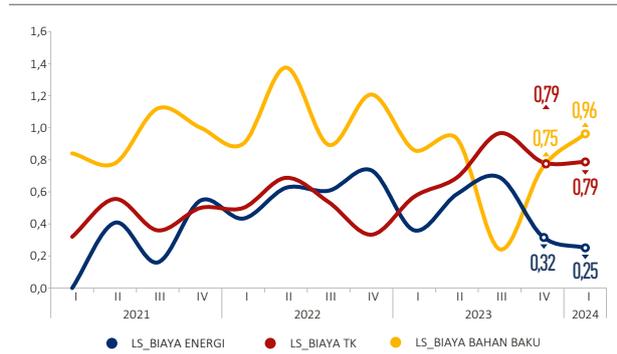
Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.22** Kredit Pertanian



Sumber: PLN, diolah

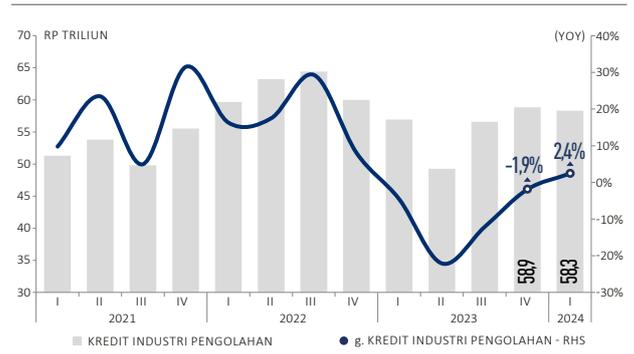
**Grafik 1.23** Konsumsi Listrik Industri



Sumber: Liaison Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.24** Likert Scale Biaya Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Energi

Selain itu, pembiayaan perbankan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2024 terpantau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Kredit perbankan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2024 tumbuh 2,4% (yoy), dari triwulan IV 2023 yang terkontraksi sebesar -1,9% (yoy) – (Grafik 1.25). Kebutuhan pembiayaan korporasi meningkat terutama untuk keperluan aktivitas operasional, membayar kewajiban jatuh tempo, dan mendukung aktivitas investasi.



Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.25** Kredit Industri Pengolahan

sebesar 1,83% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang sebesar 34,59% (yoy) (Grafik 1.15).

Meski demikian, pembiayaan pelaku usaha pada LU Konstruksi mulai mencatatkan pemulihan. Penyaluran kredit LU Konstruksi tumbuh meningkat dari terkontraksi -8,7% (yoy) pada triwulan IV 2023, menjadi 3,0% (yoy) pada periode laporan – (Grafik 1.26).



**KONSTRUKSI**  
% (yoy)



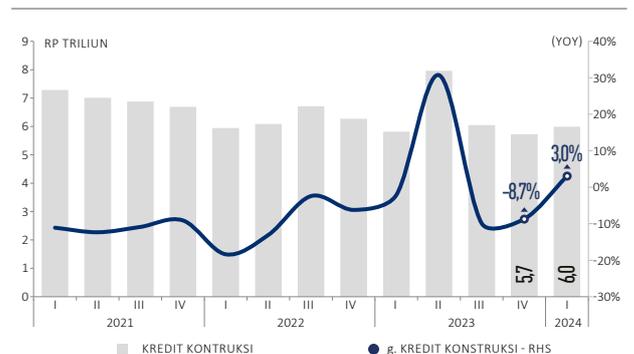
Di sisi lain, LU Konstruksi terpantau mengalami penurunan pada triwulan I 2024. Pertumbuhan LU Konstruksi tercatat 6,43% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 7,60% (yoy) seiring *wait and see* sektor swasta di tengah berlangsungnya Pemilu 2024. Selain itu, progres konstruksi pemerintah juga mengalami perlambatan seiring progres pembangunan PSN JTTS yang telah memasuki tahap akhir serta masih minimnya progres lelang seiring fokus Pemerintah Daerah yang masih terpusat pada penyelenggaraan Pemilu. Perlambatan kinerja konstruksi ini turut terlihat pada penurunan pertumbuhan konsumsi semen pada triwulan laporan



**PERDAGANGAN**  
% (yoy)

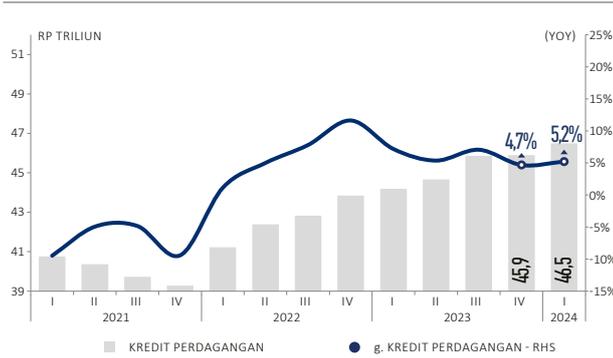


Kinerja LU Perdagangan pada triwulan I 2024 turut tumbuh melambat dibanding triwulan



Sumber: LBU - Bank Indonesia, diolah

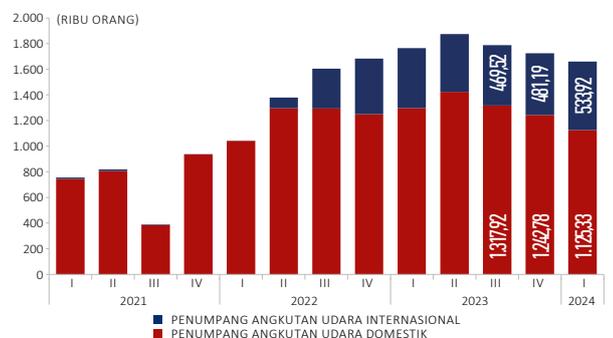
**Grafik 1.26** Kredit Konstruksi



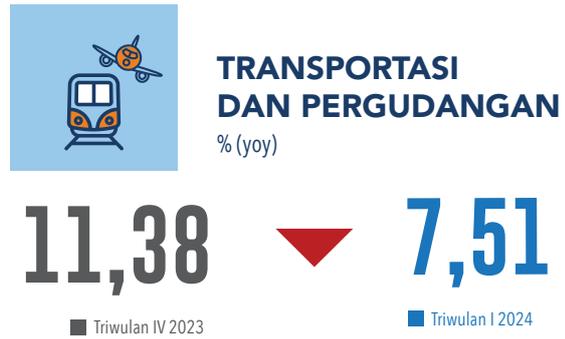
Grafik 1.27 Kredit Perdagangan

sebelumnya. Kinerja LU Perdagangan tumbuh sebesar 5,42% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,91% (yoy). Meski indikator konsumsi rumah tangga, seperti Indeks Penjualan Riil – (Grafik 1.2) dan Indeks Keyakinan Konsumen – (Grafik 1.3) mengalami peningkatan pada periode laporan, namun terbatasnya pertumbuhan volume ekspor dari sektor LU perdagangan berdampak kinerja LU Perdagangan secara keseluruhan. Kendati demikian, tetap kuatnya pemulihan ekonomi domestik seiring dengan meningkatnya permintaan pada perayaan Tahun Baru Imlek dan indikasi pergeseran konsumsi menjelang bulan Ramadhan mampu menahan perlambatan LU Perdagangan lebih dalam.

Di sisi lain, pertumbuhan penyaluran kredit LU Perdagangan tetap kuat. Penyaluran kredit LU Perdagangan pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar



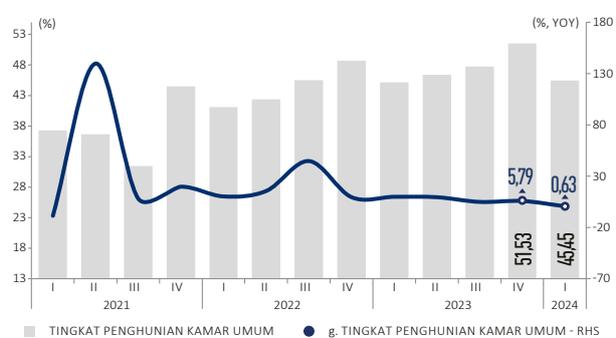
Grafik 1.28 Jumlah Penumpang Angkutan Udara



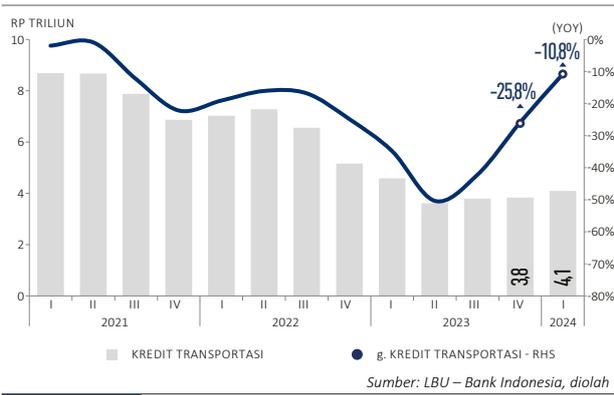
5,2% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,7 % (yoy) – (Grafik 1.27). Hal ini turut menopang kinerja LU Perdagangan pada triwulan I 2024.

**Normalisasi aktivitas wisata berdampak pada termoderasinya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan laporan.** Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan termoderasi pada triwulan I 2024 menjadi sebesar 7,51% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 11,38% (yoy). Termoderasinya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan penurunan jumlah penumpang udara khususnya domestik – (Grafik 1.28) dan penurunan Tingkat Penghujian Kamar (TPK) dari 5,79% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 0,63% (yoy) pada triwulan I 2024 – (Grafik 1.29).

Namun demikian, dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit kepada debitur usaha di LU Transportasi dan Pergudangan menunjukkan pemulihan. Pertumbuhan



Grafik 1.29 Tingkat Penghujian Kamar



**Grafik 1.30** Kredit Transportasi

kinerja kredit transportasi pada triwulan I 2024 sebesar -10,8% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi sebesar -25,8% (yoy) - (Grafik 1.30).





Sumber : Shutterstock

► BOKS 1

## **4 (Empat) *Letter Of Intent* Pensutra Alliance Berhad dan North Sumatra Invest**



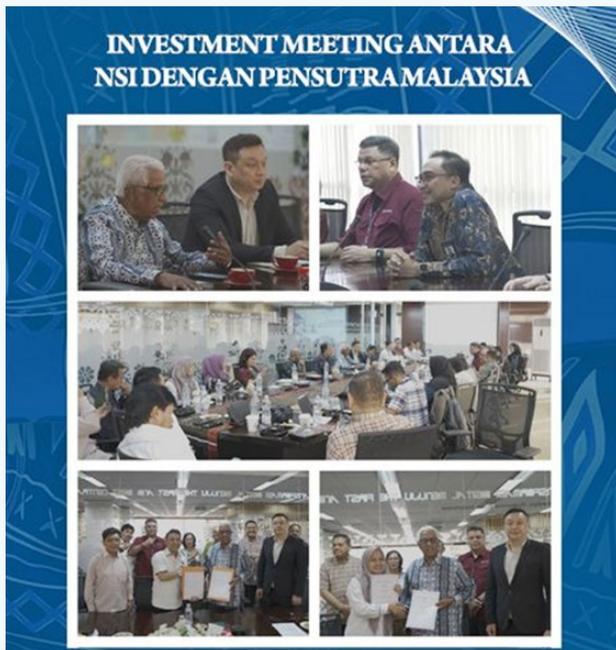
Tim North Sumatra Invest (NSI) dan Pensutra Alliance Berhad (Malaysia) menyepakati kerja sama penguatan sektor investasi bilateral baik Sumatera Utara (Indonesia) dan Malaysia. NSI merupakan forum kerja sama lintas instansi di Sumatera Utara yang bertujuan mendorong penguatan di bidang investasi, perdagangan, pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dan peran Penstrutra yakni mendorong sektor investasi dan perdagangan di ASEAN secara umum dan di Malaysia secara khusus.



Gambar B1.1 Penandatanganan Kerja Sama NSI dengan Pensutra Malaysia

Kerja sama yang telah terjalin sejak 14 Juli 2023 melalui penandatanganan perjanjian kerja sama No.1/ KS/NSI/2023 dan No.REF-20230701 tersebut berlanjut ke tahap pertemuan (*one-on-one meeting*) bersama 7 (tujuh) proyek investasi strategis di Sumatera Utara diantaranya proyek Toba Caldera Resort (Kab. Toba), KEK Sei Mangkei (Kab. Simalungun), Kawasan Industri Kuala Tanjung (Kab. Batu Bara), Kawasan Industri Medan (Kab. Deli Serdang), Airport City (Kab. Deli Serdang), Sport Center (Kab. Deli Serdang), dan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang). Selain ketujuh proyek tersebut, NSI juga turut menawarkan 5 (lima) proyek *ready next* hasil penjurangan NSI tahun 2023 diantaranya proyek Pembangunan Pusat Pasar Berastagi (Kab. Karo), Objek Wisata di Kawasan Pelabuhan Lama (Kota Sibolga), Pembangunan Pusat Perkantoran dan Bisnis Terpadu & MICE (PT Dhirga Surya), Pelabuhan Perikanan (Kab. Nias Utara), dan Taman Konservasi di Luar Habitat Alam/Ex-Situ dan Kawasan Pariwisata Bukit Lawang dan Tangkahan (Kab. Langkat).

Dalam kerja sama tersebut, Pensutra menawarkan *joint promotion* dengan NSI dengan menawarkan beberapa informasi investasi yang *suitable* dari calon



Gambar B1.2 *Investment Meeting* Antara NSI dengan Pensutra Malaysia

investor *cross border* (Penang dan Wilayah Pensutra lainnya). Berdasarkan peminatan-peminatan tersebut NSI selanjutnya mempersiapkan proyek investasi dimaksud melalui penyiapan media promosi *one page summary* dan *mapping project* se-Sumatera agar *marketable* bagi para calon investor.

Melalui penjangkaran dan penawaran oleh Pensutra kepada investor atau pelaku usaha di Malaysia terdapat sejumlah peminatan terhadap proyek investasi di Sumatera Utara. Peminatan tersebut bahkan telah dijajaki melalui penandatanganan dokumen peminatan investasi (*letter of intent*) terhadap beberapa proyek investasi diantaranya:

1. Pensutra dengan PT Dhirga Surya mengenai pembangunan *public housing*
2. Pensutra dengan Airport City untuk rencana pembangunan *semiconductor factory*
3. Pensutra dengan Balai Perkeretaapian Sumut untuk rencana pembangunan LRT Mebidang

#### 4. Pensutra dengan Real Estate Indonesia (REI)

Sebagai upaya tindak lanjut, Pensutra juga menawarkan NSI untuk ikut serta dalam pameran elektronik dan industri manufaktur yang akan dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juli di Penang dengan menghadirkan investor dari 30 negara.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



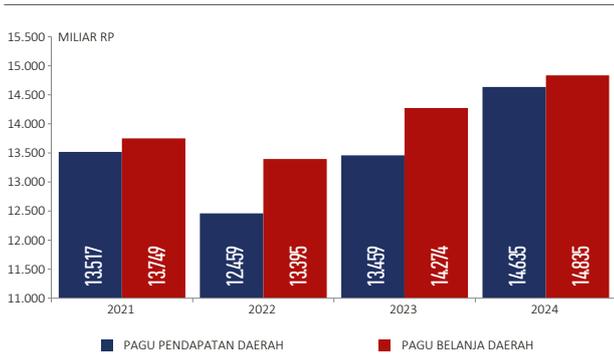


## Bab II

# Keuangan Pemerintah

**Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dari sisi pendapatan, namun menurun dari sisi penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.** Realisasi pendapatan pada triwulan I 2024 sebesar 20,44% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi triwulan I 2023 sebesar 19,29% yang utamanya didorong oleh meningkatnya realisasi di komponen Pendapatan Transfer. Di sisi lain, realisasi belanja APBD pada triwulan I 2024 mengalami penurunan didorong oleh penurunan realisasi pada hampir seluruh komponen belanja utamanya Belanja Modal seiring dengan masih minimnya progres lelang seiring fokus Pemerintah Daerah yang masih terpusat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak serta penggunaan fasilitas eksisting untuk venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XIII Aceh-Sumut 2024. Lebih lanjut, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2024 terpantau sedikit menurun hingga -1,82% (yoy) dari tahun 2023. Sementara itu, realisasinya pada triwulan I 2024 adalah sebesar 22,45% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2023 sebesar 14,67% dari pagu. Peningkatan realisasi belanja APBN di Sumatera Utara terjadi pada seluruh komponen belanja kecuali Belanja Modal.





Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

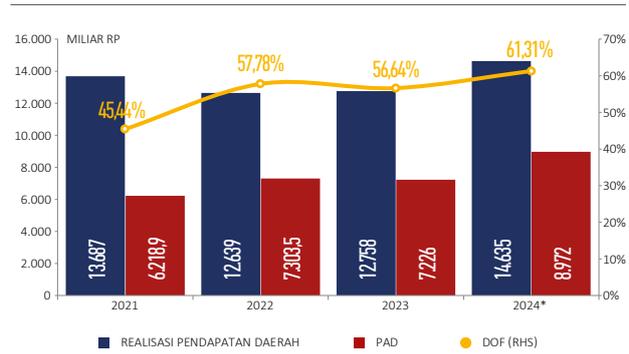
**Grafik 2.1** Perkembangan Pagu APBD di Sumatera Utara

## 2.1 GAMBARAN UMUM APBD 2024

**Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.** Struktur pendapatan mengalami peningkatan sebesar 8,74% (yoy) dari Rp13,46 triliun pada P-APBD 2023 menjadi Rp14,64 triliun. Struktur belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 3,93% (yoy) dari Rp14,27 triliun menjadi Rp14,83 triliun – (Grafik 2.1).

**Peningkatan struktur pendapatan hingga 8,74% (yoy) dalam APBD 2024 tersebut didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.** PAD mengalami peningkatan pagu sebesar 14,19% (yoy), sedangkan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 2,44% (yoy) dari P-APBD 2023. Pemerintah Daerah meyakini pendapatan Pajak Daerah di tahun 2024 akan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sementara itu, pagu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar -73,92% (yoy).

**Sejalan dengan peningkatan pagu anggaran pendapatan, pagu anggaran belanja pada APBD 2024 Provinsi Sumatera Utara turut mengalami peningkatan.** Peningkatan pagu belanja didorong oleh peningkatan pagu Belanja Operasi, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. Pagu Belanja



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

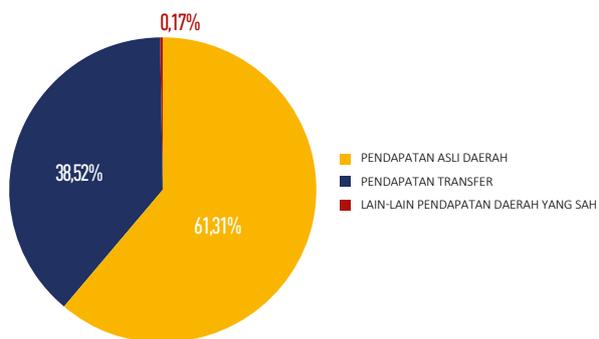
**Grafik 2.2** Derajat Otonomi Fiskal Sumatera Utara

Operasi dan Belanja Transfer masing-masing meningkat sebesar 17,63% (yoy) dan 4,30% (yoy) dari P-APBD 2023. Sementara itu, pagu Belanja Tak Terduga meningkat sebesar 42,41% (yoy) dari P-APBD 2023. Di sisi lain, komponen Belanja Modal mengalami penurunan dari pagu anggaran tahun sebelumnya.

### 2.1.1 Pagu Anggaran Pendapatan APBD 2024 Mengalami Peningkatan

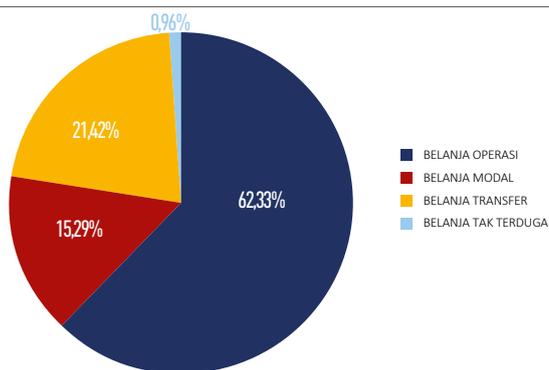
**Peningkatan penerimaan yang berasal dari PAD mencerminkan optimisme perekonomian yang tetap kuat di Provinsi Sumatera Utara.** Proyeksi kenaikan penerimaan PAD dalam APBD 2024 didorong oleh optimisme Pemerintah Daerah terhadap kenaikan penerimaan pajak seiring telah dibukanya sektor-sektor utama dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Hal ini juga tecermin dari kenaikan Derajat Otonomi Fiskal (DOF)<sup>1</sup> Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dari 56,64% pada realisasi APBD 2023 menjadi 61,31% pada pagu APBD 2024 – (Grafik 2.2). Selanjutnya, pendapatan transfer juga mencatat peningkatan sebesar 2,44% pada pagu pendapatan APBD 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatat penurunan pada APBD 2024 sebesar -73,92% (yoy). Adapun pada tahun 2024, pagu pendapatan didominasi oleh komponen PAD sebesar 61,31%, sehingga upaya mengoptimalkan potensi PAD menjadi salah satu kunci dari kinerja penerimaan daerah – (Grafik 2.3).

<sup>1</sup> DOF merupakan skala interval derajat desentralisasi fiskal untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dihitung berdasarkan perbandingan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD).



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

**Grafik 2.3** Proporsi Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

**Grafik 2.4** Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara

### 2.1.2 Sejalan dengan Pagu Pendapatan, Pagu Anggaran Belanja APBD 2024 Turut Mengalami Peningkatan

Sejalan dengan peningkatan pagu anggaran pendapatan, pagu anggaran belanja APBD 2024 di Provinsi Sumatera Utara turut mengalami peningkatan hingga 3,93% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2023. Pagu anggaran belanja APBD 2024 naik menjadi Rp14,83 triliun dari Rp14,27 triliun. Adapun peningkatan pagu belanja berasal dari komponen Belanja Operasi, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. Pagu komponen Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar 17,63% (yoy) pada APBD 2024. Peningkatan pagu Belanja Operasi pada APBD 2024 secara umum disebabkan oleh peningkatan pagu pada Belanja Pegawai 1,39% (yoy), Belanja Barang dan Jasa 38,39% (yoy), serta Belanja Operasi Lainnya 22,37% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8% pada tahun 2024 dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak yang membutuhkan dana yang besar karena mencakup biaya persiapan mulai dari pendaftaran calon hingga logistik untuk proses pemilihan dan penghitungan suara. Lebih lanjut, komponen Belanja Operasi memiliki pangsa terbesar dari pagu anggaran belanja APBD 2024, yakni Rp9,25 triliun atau setara dengan 62,33% dari total pagu anggaran belanja. Dengan demikian, peningkatan pagu Belanja Operasi turut berdampak pada peningkatan pagu belanja APBD 2024 secara

umum. Adapun peningkatan pagu Belanja Tak Terduga diperkirakan seiring dengan asumsi potensi risiko bencana di tahun 2024 dan anggaran untuk pengendalian inflasi di Sumatera Utara - (Grafik 2.4).

Di sisi lain, Belanja Modal mencatat penurunan pagu hingga -30,55% (yoy) pada APBD 2024. Hal ini diperkirakan seiring dengan masih minimnya progres lelang seiring fokus Pemerintah Daerah yang masih terpusat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak serta penggunaan fasilitas eksisting untuk *venue* Pekan Olahraga Nasional (PON) XIII Aceh-Sumut 2024.

## 2.2 REALISASI APBD TRIWULAN I 2024

### 2.2.1 Realisasi Pendapatan APBD Triwulan I 2024 Meningkat

Realisasi pendapatan pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada triwulan I 2024, realisasi pendapatan mencapai 20,44%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan di triwulan I 2023 sebesar 19,29%. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut utamanya didorong oleh meningkatnya realisasi di komponen Pendapatan Transfer dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya – (Grafik 2.5). Sementara itu, realisasi komponen PAD mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.





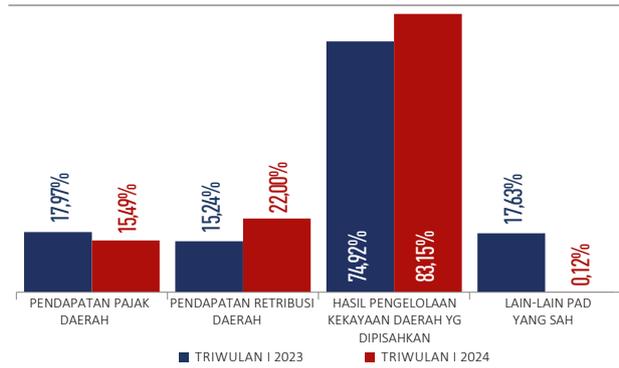
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

**Grafik 2.5** Realisasi Pendapatan APBD Triwulan I 2024

**Realisasi Pendapatan Transfer yang merupakan kontributor tertinggi penerimaan daerah triwulan I 2024 setelah PAD mengalami peningkatan dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.** Pendapatan transfer pada triwulan I 2024 terealisasi sebesar 25,76% dari pagu APBD 2024, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 17,73% – (Grafik 2.5). Meningkatnya realisasi ini sejalan dengan peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, investasi, dan mendorong Pemerintah Daerah agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.

**Lebih lanjut, pertumbuhan realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup komponen Pendapatan Hibah dan komponen Pendapatan Lainnya, juga tercatat meningkat.** Hal ini relatif didorong oleh penurunan pagu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang cukup signifikan pada APBD tahun 2024. Sementara itu, berdasarkan nominalnya, realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp5,96 miliar, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp8,82 miliar – (Tabel 2.1).

**Di sisi lain, realisasi penerimaan PAD triwulan I 2024 tercatat menurun didorong oleh penurunan realisasi dari sub komponen Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah seiring dengan peningkatan pagu sub komponen tersebut pada**



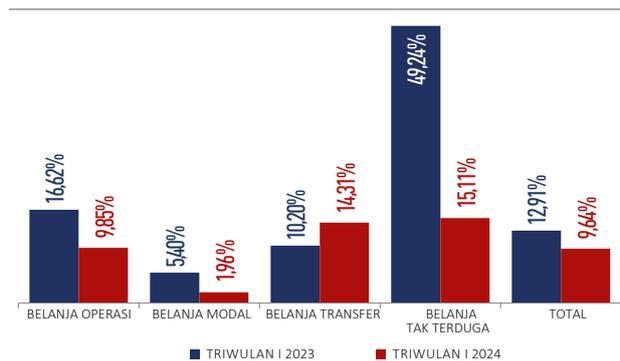
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

**Grafik 2.6** Realisasi PAD Triwulan I 2024

**tahun 2024.** – (Grafik 2.6). Realisasi PAD pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp1,53 triliun, lebih rendah dari triwulan I 2023 sebesar Rp1,61 triliun. Berdasarkan sub komponennya, Pajak Daerah secara nominal tumbuh menjadi sebesar Rp1,25 triliun pada triwulan I 2024 yang didorong oleh peningkatan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan, serta dari aktivitas konsumsi seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Selanjutnya, Retribusi Daerah tumbuh mencapai Rp8,13 miliar pada triwulan I 2024 seiring dengan kenaikan penerimaan retribusi jasa umum. Selain itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh secara nominal menjadi Rp275,98 miliar pada triwulan I 2024 karena ada peningkatan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD. Di sisi lain, realisasi Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp57,15 miliar pada triwulan I 2023 menjadi Rp0,63 miliar pada triwulan I 2024.

## 2.2.2 Di Sisi Lain, Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Triwulan I 2024 Tercatat Menurun

**Realisasi belanja APBD triwulan I 2024 mengalami penurunan, didorong oleh penurunan penyerapan pada hampir seluruh komponen belanja – (Grafik 2.7).** Pada triwulan I 2024, realisasi belanja APBD Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar

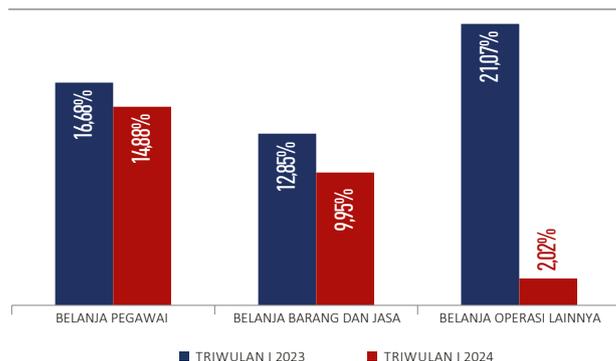


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

**Grafik 2.7** Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2024

Rp1,43 triliun atau 9,64% dari pagu belanja tahun 2024, lebih rendah dari realisasi yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,84 triliun atau terserap 12,91% dari pagu P-APBD 2023.

**Realisasi Belanja Operasi pada triwulan I 2024 menunjukkan penurunan dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.** Pada triwulan I 2024, realisasi belanja operasi mencapai Rp910,40 miliar atau setara dengan 9,85% dari pagu APBD 2024, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dirinci per sub komponen, penurunan persentase realisasi Belanja Operasi didorong oleh penurunan pada seluruh sub komponen – (Grafik 2.8). Meskipun demikian, secara nominal, realisasi Belanja Barang dan Jasa pada



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

**Grafik 2.8** Realisasi Belanja Operasi Triwulan I 2024

umumnya terpantau meningkat dari Rp302,14 miliar menjadi Rp323,72 miliar pada triwulan I 2024. Kondisi ini sejalan dengan belanja dalam rangka persiapan Pemilu dan percepatan belanja jasa.

**Selanjutnya, penurunan realisasi Belanja Modal disebabkan oleh banyak kegiatan belanja yang sedang dalam proses tender.** Realisasi Belanja Modal pada triwulan I 2024 mencapai Rp44,35 miliar atau sebesar 1,96% dari pagu Belanja Modal, lebih rendah dari triwulan yang sama tahun 2023 sebesar Rp176,23 miliar atau sebesar 5,40% dari pagu Belanja Modal P-APBD 2023. Kondisi ini diprakirakan seiring dengan masih minimnya progres lelang seiring dengan fokus Pemerintah Daerah yang masih terpusat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak serta

**Tabel 2.1** Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	2023			2024			% Pertumbuhan Pagu	% Pertumbuhan Realisasi
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	% Realisasi		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>7.857,57</b>	<b>1.612,06</b>	<b>20,52%</b>	<b>8.972,33</b>	<b>1.533,09</b>	<b>17,09%</b>	<b>14,19%</b>	<b>-4,90%</b>
Pendapatan Pajak Daerah	7.138,15	1.282,94	17,97%	8.057,91	1.248,35	15,49%	12,89%	-2,70%
Pendapatan Retribusi Daerah	40,48	6,17	15,24%	36,96	8,13	22,00%	-8,70%	31,77%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	354,76	265,80	74,92%	331,89	275,98	83,15%	-6,45%	3,83%
Lain-lain PAD yang Sah	324,19	57,15	17,63%	545,57	0,63	0,12%	68,29%	-98,90%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.502,89</b>	<b>975,52</b>	<b>17,73%</b>	<b>5.637,01</b>	<b>1.452,32</b>	<b>25,76%</b>	<b>2,44%</b>	<b>48,88%</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.502,89	975,52	17,73%	5.637,01	1.452,32	25,76%	2,44%	48,88%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>98,06</b>	<b>8,82</b>	<b>8,99%</b>	<b>25,57</b>	<b>5,96</b>	<b>23,31%</b>	<b>-73,92%</b>	<b>-32,43%</b>
Pendapatan Hibah	73,06	0,04	0,05%	7,57	0,04	0,53%	-89,64%	0,00%
Pendapatan Lainnya	25,00	8,78	35,12%	18,00	5,93	32,94%	-28,00%	-32,46%
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>13.458,52</b>	<b>2.596,39</b>	<b>19,29%</b>	<b>14.634,91</b>	<b>2.991,37</b>	<b>20,44%</b>	<b>8,74%</b>	<b>5,95%</b>

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 2.2 Pagu dan Realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	2023			2024			% Pertumbuhan Pagu	% Pertumbuhan Realisasi
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	% Realisasi		
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.860,91</b>	<b>1.306,46</b>	<b>16,62%</b>	<b>9.246,62</b>	<b>910,40</b>	<b>9,85%</b>	<b>17,63%</b>	<b>-30,32%</b>
Belanja Pegawai	3.571,41	595,85	16,68%	3.621,08	538,68	14,88%	1,39%	-9,59%
Belanja Barang dan Jasa	2.350,51	302,14	12,85%	3.252,85	323,72	9,95%	38,39%	7,14%
Belanja Operasi Lainnya	1.938,99	408,47	21,07%	2.372,69	48,00	2,02%	22,37%	-88,25%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.266,14</b>	<b>176,23</b>	<b>5,40%</b>	<b>2.268,45</b>	<b>44,35</b>	<b>1,96%</b>	<b>-30,55%</b>	<b>-74,83%</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.046,55</b>	<b>310,85</b>	<b>10,20%</b>	<b>3.177,55</b>	<b>454,55</b>	<b>14,31%</b>	<b>4,30%</b>	<b>46,23%</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>99,91</b>	<b>49,20</b>	<b>49,24%</b>	<b>142,28</b>	<b>21,50</b>	<b>15,11%</b>	<b>42,41%</b>	<b>-56,30%</b>
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>14.273,52</b>	<b>1.842,74</b>	<b>12,91%</b>	<b>14.834,91</b>	<b>1.430,79</b>	<b>9,64%</b>	<b>3,93%</b>	<b>-22,36%</b>

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

penggunaan fasilitas eksisting untuk venue PON XIII Aceh-Sumut 2024 yang berpotensi mengurangi jumlah proyek persiapan venue PON.

**Lebih lanjut, realisasi pos Belanja Tak Terduga triwulan I 2024 juga mengalami penurunan.** Realisasi Belanja Tak Terduga pada triwulan I 2024 mencapai Rp21,50 miliar atau terealisasi sebesar 15,11%, lebih rendah dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp49,20 miliar atau terealisasi sebesar 49,24% (Grafik 2.7).

**Di sisi lain, realisasi Belanja Transfer menunjukkan peningkatan.** Realisasi Belanja Transfer pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp454,55 miliar atau 14,31% dari pagu, sementara pada triwulan yang sama tahun sebelumnya realisasi Belanja Transfer mencapai sebesar Rp310,85 miliar atau 10,20% dari pagu. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan realisasi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

## 2.3 PAGU BELANJA APBN<sup>2</sup> UNTUK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 LEBIH RENDAH

Secara garis besar, pagu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2024, pagu belanja Pemerintah Pusat di Sumatera Utara sedikit menurun sebesar -1,82% (yoy) dengan nominal sebesar Rp23,83 triliun, sedikit lebih rendah dari pagu belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 sebesar Rp24,27 triliun. Untuk menghindari prinsip penghitungan ganda, realisasi APBN tidak memperhitungkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai bagian dari penerimaan APBD.

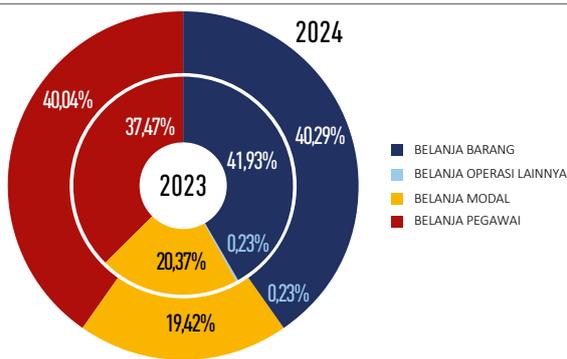
**Komponen Belanja Barang dan Belanja Modal pada umumnya mendorong penurunan pagu belanja APBN di Provinsi Sumatera Utara.** Berdasarkan persentase pangsa dari pagu, komponen Belanja Barang dan Belanja Modal memiliki pangsa yang cukup besar dalam pagu belanja APBN di Sumatera

Tabel 2.3 Pagu dan Realisasi Belanja APBN Berdasarkan Jenis Belanja (Tidak Termasuk TKDD)

URAIAN	2023			2024		
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	% Realisasi
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>19.329,12</b>	<b>2.945,97</b>	<b>15,24%</b>	<b>19.203,53</b>	<b>4.949,04</b>	<b>25,77%</b>
Belanja Pegawai	9.094,96	1.716,54	18,87%	9.542,64	2.469,77	25,88%
Belanja Barang dan Jasa	10.177,08	1.220,77	12,00%	9.602,86	2.467,19	25,69%
Belanja Operasi Lainnya	57,08	8,66	15,17%	58,03	12,08	20,82%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.943,57</b>	<b>614,43</b>	<b>12,43%</b>	<b>4.627,95</b>	<b>400,43</b>	<b>8,65%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.272,70</b>	<b>3.560,40</b>	<b>14,67%</b>	<b>23.831,49</b>	<b>5.349,46</b>	<b>22,45%</b>

Sumber: DJPb Provinsi Sumatera Utara

2 tidak termasuk TKDD



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, diolah

**Grafik 2.9** Pagu APBN Provinsi Sumatera Utara

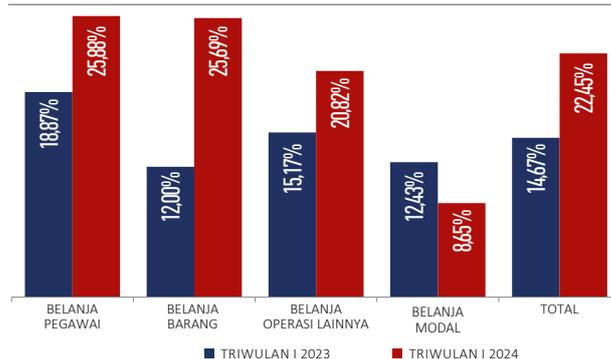
Utara yakni masing-masing sebesar 40,29% dan 19,42%. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan pagu kedua komponen belanja ini membawa dampak yang cukup signifikan dalam mendorong penurunan pagu belanja APBN di Sumatera Utara – (Grafik 2.9).

**Sementara itu, pagu Belanja Pegawai dan Belanja Operasi Lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.** Pagu Belanja Pegawai dan Belanja Operasi Lainnya masing-masing meningkat sebesar 4,92% (yoy) menjadi Rp9,54 triliun dan 1,67% (yoy) menjadi Rp58,03 miliar.

## 2.4 REALISASI BELANJA APBN PADA TRIWULAN I 2024 MENGALAMI PENINGKATAN

**Realisasi belanja APBN di Sumatera Utara pada triwulan I 2024 terpantau meningkat dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.** Realisasi belanja APBN pada triwulan berjalan tahun 2024 adalah sebesar 22,45% dari pagu, lebih tinggi daripada triwulan I 2023 sebesar 14,67% dari pagu. Adapun peningkatan realisasi belanja APBN terutama terjadi pada hampir seluruh komponen belanja – (Grafik 2.10).

**Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan pada triwulan I 2024.** Realisasi Belanja Pegawai mencatat peningkatan dari 18,87% pada triwulan I 2023 menjadi 25,88% pada triwulan berjalan. Kondisi ini sejalan dengan percepatan realisasi Belanja Pegawai seperti dalam bentuk penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR).



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, diolah

**Grafik 2.10** Realisasi Belanja APBN Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Belanja

**Realisasi Belanja Barang pada triwulan I 2024 juga terpantau meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.** Realisasi Belanja Barang tercatat 25,69% dari pagu, lebih tinggi dari triwulan I 2023 yang terealisasi sebesar 12,00% seiring dengan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan Pemilu.

**Lebih lanjut, realisasi Belanja Operasi Lainnya turut mengalami peningkatan pada triwulan I 2024.** Realisasi Belanja Operasi Lainnya pada triwulan I 2024 sebesar 20,82% dari pagu atau setara dengan Rp12,08 miliar, lebih tinggi dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 15,17% atau setara dengan Rp8,66 miliar. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya realisasi Belanja Bantuan Sosial pada triwulan berjalan.

**Lebih lanjut, realisasi Belanja Modal tercatat mengalami penurunan pada triwulan I 2024.** Realisasi Belanja Modal tercatat sebesar Rp400,43 miliar atau 8,65% dari pagu, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp614,43 miliar atau 12,43% dari pagu. Belanja Modal ini terutama digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta PSN yakni pembangunan bendungan Lau Simeme. Adapun penurunan realisasi Belanja Modal tersebut diperkirakan seiring dengan pembatalan sejumlah PSN di Provinsi Sumatera Utara seperti Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran dan Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat.





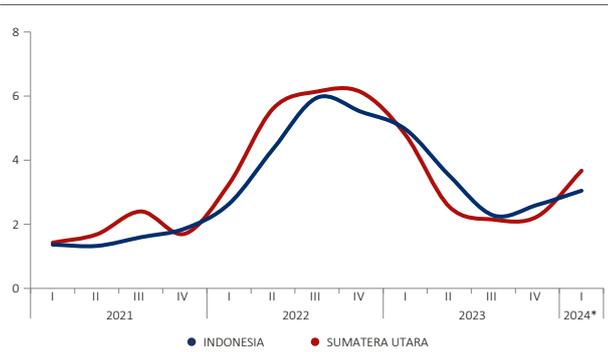


### Bab III

## Perkembangan Inflasi Daerah

**Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan di atas sasaran inflasi tahun 2024 sebesar  $2,5 \pm 1,0\%$  (yoy).** Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 3,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,25% (yoy). Inflasi Provinsi Sumatera Utara juga tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy) pada triwulan laporan. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Adapun berdasarkan komoditas, inflasi triwulan laporan utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan tata niaga beras yang belum efisien. Selanjutnya, kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh berkurangnya barang/pasokan ditengah tingginya permintaan. Kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam disebabkan oleh kenaikan biaya input. Sementara itu, peningkatan harga SKM disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di awal tahun sebesar 10%. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan *urban farming* dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).





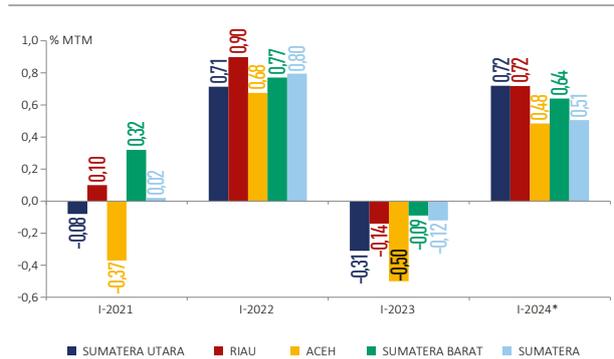
Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah  
\*) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

**Grafik 3.1** Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional

### 3.1 KINERJA INFLASI TRIWULAN I 2024

**Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.** Realisasi inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 3,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 2,25% (yoy). Inflasi Sumatera Utara juga tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 3,05% (yoy) pada triwulan laporan – (Grafik 3.1). Menanjaknya tingkat inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan kenaikan permintaan, peningkatan harga komoditas global yang tertransmisi pada komoditas domestik, serta kebijakan kenaikan cukai. Meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan laporan juga disebabkan oleh berkurangnya pasokan komoditas pangan utama, khususnya beras disebabkan kenaikan biaya produksi, fenomena El-Nino di daerah sentra dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia, cabai merah seiring kenaikan permintaan selama HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, serta daging ayam dan telur ayam ras dikarenakan kenaikan biaya input.

Sementara itu, secara spasial, inflasi Sumatera Utara mencatatkan inflasi tahunan tertinggi ketiga di wilayah Sumatera pada triwulan I 2024, di atas inflasi daerah di Wilayah Sumatera lainnya seperti Riau sebesar 3,57% (yoy), Aceh sebesar 3,26% (yoy). Meskipun masih dibawah inflasi Sumatera Barat sebesar 3,93% (yoy) – (Grafik 3.2).



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah  
\*) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

**Grafik 3.2** Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Daerah Lainnya

Secara umum, inflasi Sumatera Utara pada triwulan laporan bersumber dari kenaikan harga yang terjadi di seluruh kelompok pengeluaran. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan sumbangan inflasi sebesar 2,82% (yoy), diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang memberikan sumbangan masing-masing sebesar 0,20% (yoy) dan 0,18% (yoy). Adapun komoditas utama penyumbang inflasi antara lain beras, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,67% (yoy), 0,61% (yoy), 0,27% (yoy), 0,24% (yoy), dan 0,18% (yoy). Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi padi dan tata niaga beras yang belum efisien ditengah meningkatnya permintaan akibat periode kampanye politik. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi, serta berkurangnya produksi beras secara Nasional akibat fenomena El-Nino di daerah sentra juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, kenaikan harga cabai merah di awal tahun disebabkan oleh kelangkaan barang/pasokan dari beberapa daerah sentra yang terdampak El-Nino di Jawa sehingga meningkatkan perdagangan antar wilayah dari daerah sentra di Sumatera. Kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam disebabkan oleh tingginya biaya input terutama bibit ayam *Day Old Chick (DOC)* dan pakan yang



**Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan I 2024**

Inflasi Triwulan I 2024					
Januari		Februari		Maret	
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
TOMAT	0,16	BERAS	0,59	BERAS	0,67
BAWANG MERAH	0,08	CABAI MERAH	0,27	CABAI MERAH	0,61
DAGING AYAM RAS	0,07	SIGARET KRETEK MESIN	0,19	DAGING AYAM RAS	0,27
IKAN DENCIS	0,05	TOMAT	0,17	TELUR AYAM RAS	0,24
BERAS	0,04	DAGING AYAM RAS	0,13	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,18

Deflasi Triwulan I 2024					
Januari		Februari		Maret	
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
CABAI MERAH	-0,31	IKAN KEMBUNG/GEMBUNG	-0,14	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,11
CABAI RAWIT	-0,07	IKAN TONGKOL	-0,12	UDANG BASAH	-0,05
BENSIN	-0,03	IKAN DENCIS	-0,11	IKAN DENCIS	-0,04
KELAPA	-0,02	IKAN NILA	-0,06	TOMAT	-0,04
UDANG BASAH	-0,02	UDANG BASAH	-0,04	IKAN ASIN TERI	-0,03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

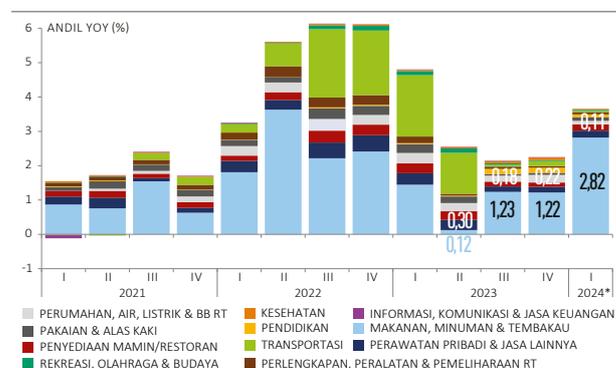
berdampak pada peningkatan harga kedua komoditas ini. Sementara itu, peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2024 sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

**Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan ke level yang lebih tinggi akibat penurunan harga sejumlah komoditas.** Berdasarkan komoditas, sejumlah komoditas menunjukkan deflasi yang cukup dalam, sehingga menahan tingkat inflasi Sumatera Utara yang lebih tinggi secara keseluruhan. Komoditas dengan andil deflasi tertinggi antara lain ikan tongkol, udang basah, ikan dencis, tomat, dan ikan asin teri dengan andil deflasi masing-masing komoditas sebesar 0,11% (yoy), 0,05% (yoy), 0,04% (yoy), 0,04% (yoy), dan 0,03% (yoy). Penurunan harga komoditas khususnya pada perikanan disebabkan oleh masuknya pasokan komoditas dari daerah sentra produksi.

## 3.2 ANDIL INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK

### 3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Memberikan Andil Inflasi Terbesar

**Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi terbesar sebesar 2,82% (yoy) pada triwulan laporan.** Andil inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,22% (yoy) (SBH 2018) (Grafik 3.3). Tekanan inflasi kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas beras, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan sigaret kretek mesin dengan andil masing-masing



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah  
\*) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

**Grafik 3.3 Distribusi Andil Inflasi per Kelompok**

sebesar 0,67% (yoy), 0,61% (yoy), 0,27% (yoy), 0,24% (yoy), dan 0,18% (yoy).

Kenaikan harga beras disebabkan oleh kenaikan harga gabah baik di tingkat petani maupun penggilingan seiring dengan kenaikan biaya produksi petani. Penyesuaian harga BBM Pertamina dan tingginya harga pupuk juga turut berdampak pada peningkatan biaya produksi tersebut. Selanjutnya, kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh menurunnya barang/pasokan di sentra produksi di Sumatera Utara seiring banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang serta kenaikan permintaan dari daerah yang terkena dampak EL-Nino yang menggerak harga cabai merah lebih tinggi. Kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam didorong kenaikan biaya input terutama bibit ayam *Day Old Chick (DOC)*. Namun demikian, peningkatan harga daging ayam ras dan telur ayam ras lebih lanjut tertahan oleh harga jagung sebagai pakan ternak yang mulai menurun pada Maret 2024 dengan rerata harga sebesar Rp8.261/kg, dari rerata harga bulan sebelumnya yang sebesar Rp8.602/kg. Penurunan harga jagung didorong oleh meningkatnya pasokan seiring dengan masuknya periode panen pada Maret 2024. Salah satu upaya pemerintah untuk menstabilkan harga telur ayam ras adalah dengan menyalurkan SPHP jagung kepada peternak mandiri. Sementara itu, peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2024 sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

### 3.2.2 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Memberikan Andil Inflasi Tertinggi Kedua

**Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil inflasi tertinggi kedua sebesar 0,20% (yoy) pada triwulan laporan.** Andil inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,16%

(yoy) – SBH 2018 (Grafik 3.3). Kenaikan andil inflasi pada kelompok ini disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan sebesar 0,11% (yoy), pasta gigi sebesar 0,02% (yoy), serta deodorant, lipstik, tarif gunting rambut pria, dan jam tangan masing-masing sebesar 0,01% (yoy). Peningkatan harga pada emas perhiasan diperkirakan karena ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik. Adapun kenaikan harga emas global juga berimbas pada harga emas di dalam negeri. Selanjutnya, peningkatan harga komoditas berkaitan dengan kebersihan didorong dari tingginya permintaan masyarakat menjelang dan selama HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.

### 3.2.3 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran Memberikan Andil Inflasi yang Cukup Signifikan

**Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran mencatatkan andil inflasi sebesar 0,18% (yoy), merupakan tertinggi ketiga pada triwulan laporan.** Andil inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang memberi andil inflasi sebesar 0,13% (yoy) (Grafik 3.3).

Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh peningkatan harga pada komoditas mie dengan andil inflasi sebesar 0,03% (yoy), serta komoditas bakso siap santap, es, dan pecel dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02% (yoy). Kenaikan harga komoditas ini diperkirakan terjadi seiring tingginya permintaan masyarakat menjelang dan selama HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.

## 3.3 INFLASI SPASIAL

**Seluruh Kota dan Kabupaten IHK di Sumatera Utara mencatatkan peningkatan tekanan inflasi pada triwulan I 2024 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Adapun tekanan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Labuhanbatu dengan angka inflasi sebesar 5,87% (yoy), kemudian diikuti Kab. Karo sebesar 4,88% (yoy), Kota Sibolga sebesar



Tabel 3.2

**Perkembangan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional**

Kota	2022				2023				2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<b>Inflasi IHK, % mtm</b>									
Sumatera Utara	0,71	1,40	1,00	1,50	-0,31	0,31	0,37	0,57	0,72
Medan	0,68	1,39	0,98	1,54	-0,30	0,29	0,38	0,61	0,73
Sibolga	0,93	1,12	0,33	1,44	-0,66	0,62	0,44	0,08	0,72
Pematangsiantar	0,77	1,36	1,50	1,61	-0,30	0,52	0,16	0,56	0,61
Padangsidempuan	1,11	1,29	0,99	0,64	-0,18	0,21	0,49	0,21	0,97
Gunungsitoli	0,39	2,72	0,61	1,79	-0,91	0,21	0,38	0,21	0,37
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)								0,12
Deli Serdang									0,61
Labuhanbatu									1,62
Nasional									0,66
<b>Inflasi IHK, % ytd</b>									
Sumatera Utara	1,54	4,18	5,23	6,12	0,28	0,68	1,29	2,25	1,53
Medan	1,44	4,08	5,12	6,10	0,17	0,52	1,12	2,19	1,62
Sibolga	2,27	4,68	6,13	6,43	1,12	2,17	3,12	2,80	2,46
Pematangsiantar	1,93	4,36	5,13	6,16	0,63	1,35	1,50	2,29	1,84
Padangsidempuan	2,40	5,34	6,67	6,40	1,41	2,08	2,91	2,95	2,23
Gunungsitoli	1,76	4,80	5,83	5,74	-0,04	0,12	1,94	2,36	1,58
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)								0,82
Deli Serdang									0,93
Labuhanbatu									3,42
Nasional									1,20
<b>Inflasi IHK, % yoy</b>									
Sumatera Utara	3,26	5,61	6,14	6,12	4,80	2,55	2,15	2,25	3,67
Medan	3,14	5,49	6,01	6,10	4,77	2,47	2,06	2,19	3,62
Sibolga	4,42	6,50	6,92	6,43	5,22	3,88	3,40	2,80	4,28
Pematangsiantar	3,62	5,71	6,26	6,16	4,81	3,10	2,50	2,29	3,84
Padangsidempuan	4,42	6,71	7,57	6,40	5,37	3,11	2,65	2,95	4,10
Gunungsitoli	3,36	6,44	7,16	5,74	3,86	1,01	1,85	2,36	3,90
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)								4,88
Deli Serdang									2,89
Labuhanbatu									5,87
Nasional									2,64

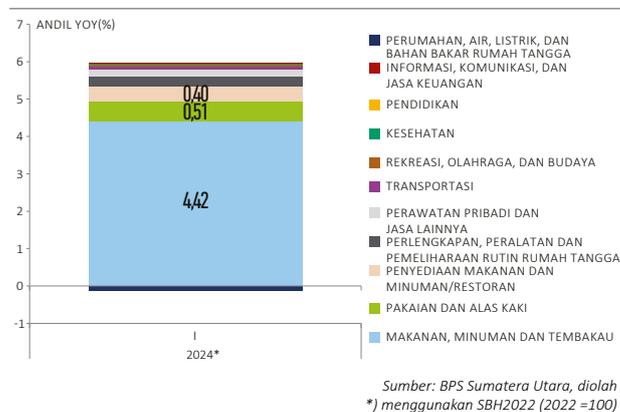
Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah \*) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

4,28% (yoy), Kota Padangsidempuan sebesar 4,10% (yoy), Kota Gunungsitoli sebesar 3,90% (yoy), Kota Pematangsiantar sebesar 3,84% (yoy), Kota Medan sebesar 3,62% (yoy), dan Kab. Deli Serdang dengan inflasi terendah sebesar 2,89% (yoy) - (Tabel 3.2). Secara umum, tingkat inflasi Sumatera Utara pada triwulan laporan sebesar 3,67% (yoy) tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy).

### 3.3.1 Kabupaten Labuhanbatu Mencatatkan Inflasi Tertinggi

Kabupaten Labuhanbatu mencatatkan inflasi tertinggi di Sumatera Utara. Pada triwulan I 2024, Kabupaten Labuhanbatu mengalami inflasi sebesar 5,87% (yoy). Sumber utama inflasi di Kabupaten Labuhanbatu didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 4,42% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, telur ayam ras, dan cabai merah, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,70% (yoy), 0,63% (yoy), dan 0,55% (yoy). Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Kenaikan harga telur ayam ras disebabkan oleh kenaikan harga pakan, sedangkan kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh kelangkaan barang/pasokan di sentra produksi di Sumatera Utara seiring banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang.

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan I 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,51% (yoy). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yakni seragam sekolah anak, baju muslim pria, serta sarung dengan andil inflasi masing-



Grafik 3.4

**Inflasi Kabupaten Labuhanbatu per Kelompok**

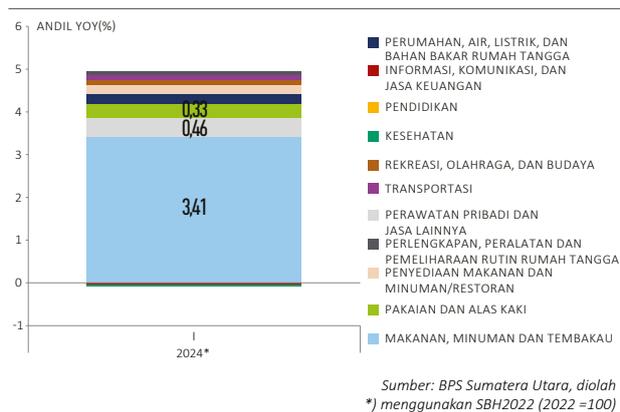
masing sebesar 0,12% (yoy), 0,06% (yoy), dan 0,05% (yoy). Kenaikan harga pakaian, khususnya pada baju muslim terjadi seiring dengan menuju perayaan HBKN Idul Fitri.

Selanjutnya, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran memberikan andil inflasi terbesar ketiga dengan angka 0,40% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas ayam goreng, ikan bakar, dan ketupat/lontong sayur dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,09% (yoy), 0,08% (yoy), dan 0,08% (yoy). Kenaikan harga ketiga komoditas tersebut diperkirakan akibat peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan konsumsi sepanjang bulan Ramadhan.

Di sisi lain, inflasi Kabupaten Labuhanbatu lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan I 2024, komoditas ikan dencis, ikan tongkol, dan ikan asin teri mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,18% (yoy), 0,16% (yoy), dan 0,12% (yoy).

### 3.3.2 Kabupaten Karo Mencatatkan Inflasi Tertinggi Kedua

**Kabupaten Karo mencatatkan inflasi tertinggi Kedua di Sumatera Utara.** Pada triwulan I 2024, Kab. Karo mengalami inflasi sebesar 4,88% (yoy). Sumber utama inflasi di Kab. Karo didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 3,41% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, bawang merah, dan cabai merah, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,06% (yoy), 0,82% (yoy), dan 0,60% (yoy). Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Kenaikan harga bawang merah disebabkan oleh penurunan pasokan dari Jawa, sedangkan kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh kelangkaan barang/pasokan di sentra



Grafik 3.5 Inflasi Kabupaten Karo per Kelompok

produksi di Sumatera Utara seiring banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan I 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,46% (yoy). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yakni emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,20% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

Selanjutnya, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki memberikan andil inflasi terbesar ketiga dengan angka 0,34% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas sandal karet pria, baju kaos tanpa kerah/t-shirt pria, dan sepatu anak dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03% (yoy). Kenaikan harga ketiga komoditas tersebut diperkirakan akibat peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan tingginya permintaan menjelang HBKN Idul Fitri.

Di sisi lain, inflasi Kab. Karo lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan I 2024, komoditas ikan dencis, tomat, dan ikan tongkol mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,52% (yoy), 0,47% (yoy), dan 0,17% (yoy).

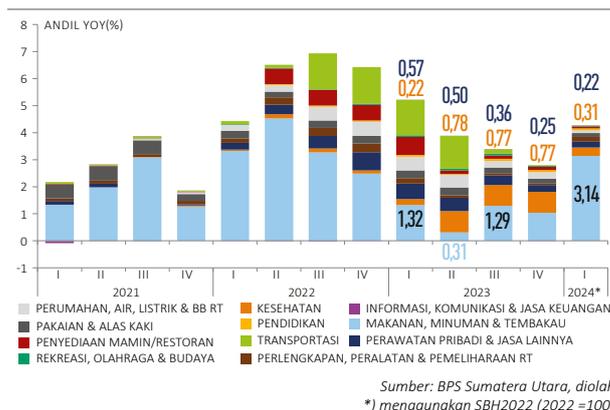


### 3.3.3 Kota Sibolga Mencatatkan Inflasi Tertinggi Ketiga

**Kota Sibolga mencatatkan inflasi tertinggi ketiga di Sumatera Utara.** Pada triwulan I 2024, Kota Sibolga mengalami inflasi sebesar 4,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar 2,80% (yoy). Sumber utama inflasi di Kota Sibolga didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 3,14% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, cabai merah, dan bawang merah, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,80% (yoy), 0,61% (yoy), dan 0,31% (yoy). Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh kelangkaan barang/pasokan di sentra produksi di Sumatera Utara seiring banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang, sedangkan kenaikan harga bawang merah disebabkan oleh penurunan pasokan dari Jawa.

Kelompok Kesehatan menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan I 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,31% (yoy). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yakni tarif rumah sakit dan tarif dokter umum dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,28% (yoy), dan 0,02% (yoy). Kenaikan harga tarif ini disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat seiring dengan: (i) terselenggaranya pemeriksaan kesehatan bagi personel yang terlibat dalam Pengamanan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024, dan (ii) implementasi “Janji Layanan” yang menjadi komitmen dari setiap fasilitas kesehatan Kota Sibolga.

Selanjutnya, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya memberikan andil inflasi terbesar ketiga dengan angka 0,22% (yoy). Adapun komoditas yang



**Grafik 3.6** Inflasi Kota Sibolga per Kelompok

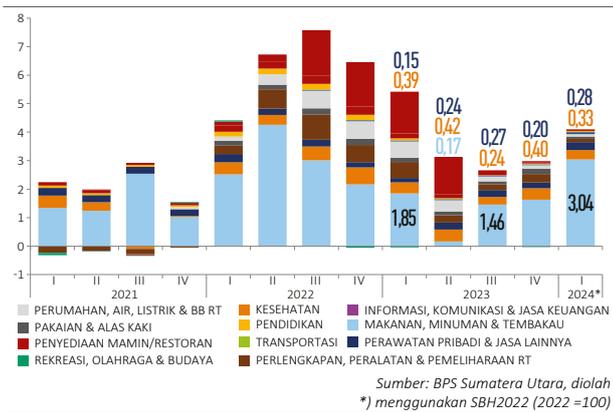
menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yakni emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,19% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

Di sisi lain, inflasi Kota Sibolga lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan I 2024, komoditas ikan cakalang, ikan asin teri, dan ikan serai mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,15% (yoy), 0,07% (yoy), dan 0,06% (yoy).

### 3.3.4 Kota Padangsidimpuan Mencatatkan Peningkatan Inflasi

**Kota Padangsidimpuan mencatatkan peningkatan inflasi pada triwulan laporan.** Pada triwulan I 2024, Kota Padangsidimpuan mengalami inflasi sebesar 4,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar 2,95% (yoy). Sumber utama inflasi di Kota Padangsidimpuan didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 3,04% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya didorong oleh kenaikan harga cabai merah, beras, dan sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,93% (yoy), 0,61% (yoy), dan 0,31% (yoy). Kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh kelangkaan barang/pasokan di





**Grafik 3.7** Inflasi Kota Padangsidimpuan per Kelompok

sentra produksi di Sumatera Utara seiring banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang. Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum, sedangkan kenaikan SKM disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan I 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,33% (yoy). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yakni emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,19% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

Selanjutnya, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki memberikan andil inflasi terbesar ketiga dengan angka 0,28% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas baju muslim wanita, baju muslim pria, dan baju tidur anak dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,06% (yoy), 0,03% (yoy), dan 0,03% (yoy). Kenaikan harga ketiga komoditas tersebut diperkirakan akibat peningkatan

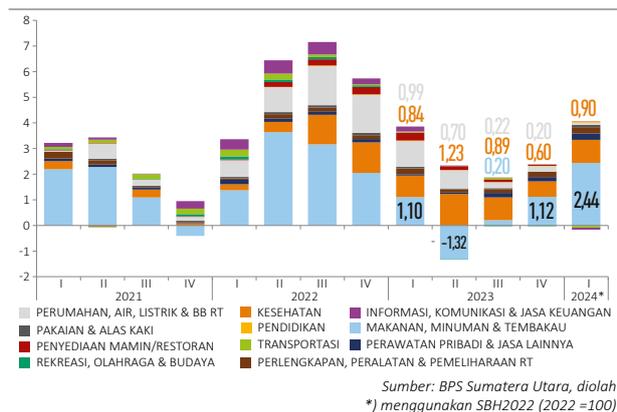
permintaan masyarakat seiring dengan masuknya HBKN Idul Fitri.

Di sisi lain, inflasi Kota Padangsidimpuan lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan I 2024, komoditas ikan dencis, udang kering, dan sabun cuci piring mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,13% (yoy), 0,07% (yoy), dan 0,06% (yoy).

### 3.3.5 Kota Gunungsitoli Turut Mencatatkan Peningkatan Inflasi

**Kota Gunungsitoli mengalami peningkatan inflasi**, yaitu tercatat sebesar 3,90% (yoy) pada triwulan I 2024, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,36% (yoy). Inflasi di Kota Sibolga didorong oleh inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 2,44% (yoy). Inflasi pada kelompok tersebut didorong oleh peningkatan harga pada komoditas beras, cabai merah, dan daging ayam ras, yang masing-masing memiliki andil inflasi sebesar 0,79% (yoy), 0,57% (yoy), dan 0,45% (yoy) pada triwulan I 2024. Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh kelangkaan barang/pasokan di sentra produksi di Sumatera Utara seiring banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang, sedangkan kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh sempat tingginya harga pakan ternak pada awal tahun yang berdampak pada peningkatan harga dari komoditas ini.

Kelompok Transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil inflasi sebesar 0,90% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong



**Grafik 3.8** Inflasi Kota Gunungsitoli per Kelompok

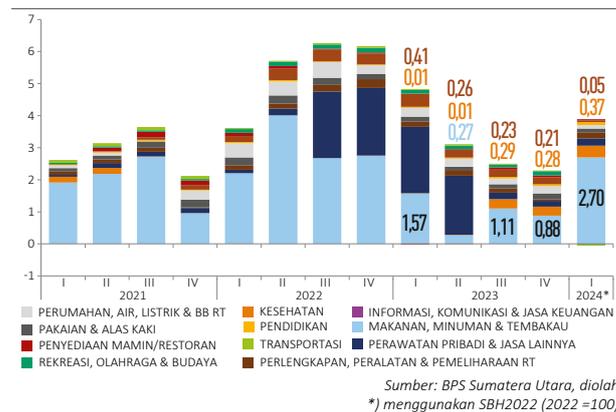
oleh kenaikan harga komoditas angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,70% (yoy). Peningkatan harga komoditas ini disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat akibat banyaknya libur dan menjelang HBKN Idul Fitri.

Selanjutnya, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran juga menjadi penyumbang inflasi Kota Gunungsitoli pada triwulan I 2024. Kelompok ini mencatatkan andil inflasi sebesar 0,25% (yoy). Adapun peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas nasi dengan lauk, ketupan/lontong sayur, dan mie dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,08% (yoy), 0,06% (yoy), dan 0,04% (yoy). Kenaikan harga komoditas ini disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat saat momen Ramadhan dan menjelang HBKN Idul Fitri.

Di sisi lain, laju inflasi Kota Gunungsitoli lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan I 2024, komoditas daging babi, ikan kembung, dan sabun detergen bubuk mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,55% (yoy), 0,12%, dan 0,09% (yoy).

### 3.3.6 Kota Pematangsiantar Mengalami Inflasi pada Triwulan Laporan

**Inflasi Kota Pematangsiantar pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,84% (yoy).** Nilai realisasi inflasi



**Grafik 3.9** Inflasi Kota Pematangsiantar per Kelompok

tersebut lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,29% (yoy). Inflasi Kota Pematangsiantar didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Pendidikan, dan Kelompok Transportasi.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan andil inflasi terbesar yakni 2,70% (yoy) pada triwulan I 2024. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga pada komoditas beras, cabai merah, dan daging ayam ras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,82% (yoy), 0,37% (yoy), dan 0,23% (yoy). Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh kelangkaan barang/pasokan di sentra produksi di Sumatera Utara seiring banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang, sedangkan kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh sempat tingginya harga pakan ternak pada awal tahun yang berdampak pada peningkatan harga dari komoditas ini.

Selanjutnya, Kelompok Pendidikan juga turut menjadi penyumbang inflasi Kota Pematangsiantar pada triwulan I 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,37%



(yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh peningkatan biaya uang kuliah akademi/PT dengan andil inflasi sebesar 0,22% (yoy). Adapun peningkatan uang kuliah akademi/perguruan tinggi seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi.

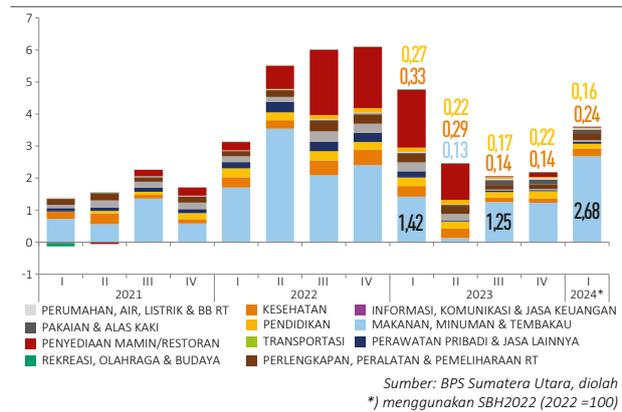
Kelompok Transportasi menjadi penyumbang inflasi Kota Pematangsiantar terbesar berikutnya dengan andil inflasi mencapai 0,23% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga mobil dan cuci kendaraan dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,07% (yoy). Kenaikan harga mobil dan cuci kendaraan ini mengindikasikan adanya perbaikan tingkat ekonomi Kota Pematangsiantar seiring dengan kenaikan UMP pada tahun 2024 yang mendorong peningkatan permintaan.

Di sisi lain, inflasi Kota Pematangsiantar lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan I 2024, komoditas ikan asin teri dan ikan tongkol mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,12% (yoy) dan 0,07% (yoy).

### 3.3.7 Kota Medan Mencatatkan Peningkatan Tekanan Inflasi

**Pada triwulan I 2024, Kota Medan mencatat inflasi 3,62% (yoy),** meningkat dari triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar 2,19% (yoy).

Sumber utama tekanan inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil inflasi sebesar 2,68% (yoy) pada triwulan I 2024. Peningkatan inflasi utamanya bersumber dari kenaikan harga beras, daging ayam ras, dan cabai merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,58% (yoy), 0,46% (yoy), dan 0,34% (yoy). Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Kenaikan harga daging ayam ras

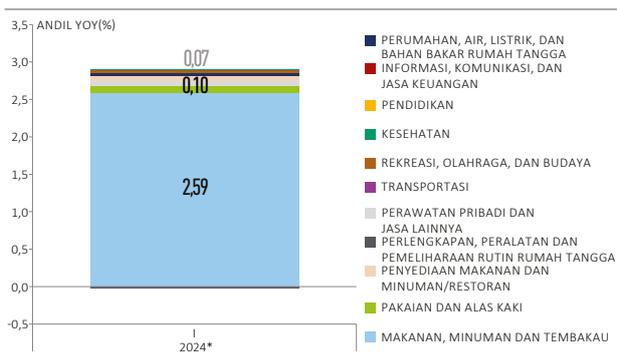


Grafik 3.10 Inflasi Kota Gunungsitoli per Kelompok

disebabkan oleh sempat tingginya harga pakan ternak pada awal tahun yang berdampak pada peningkatan harga dari komoditas ini, sedangkan kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh kelangkaan barang/pasokan di sentra produksi di Sumatera Utara seiring banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kelompok penyumbang inflasi kedua terbesar yang memberikan andil inflasi sebesar 0,24% (yoy) pada triwulan I 2024. Tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,15% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga dengan andil inflasi sebesar 0,22% (yoy) pada triwulan I 2024. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga mie, es, dan bakso siap santap dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,06% (yoy), 0,03% (yoy), dan 0,03% (yoy). Kenaikan harga ketiga komoditas ini cenderung dipengaruhi dari tingginya permintaan masyarakat saat Ramadhan dan menuju HBKN Idul Fitri.



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah  
) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

**Grafik 3.11** Inflasi Kota Medan per Kelompok

Di sisi lain, inflasi lebih tinggi di Kota Medan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Pada triwulan I 2024, komoditas ikan tongkol, pepaya, dan pir menjadi penyumbang deflasi terdalam Kota Gunungsitoli dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,09% (yoy), 0,05% (yoy), dan 0,03% (yoy).

### 3.3.8 Kabupaten Deli Serdang Mencatatkan Inflasi Terendah

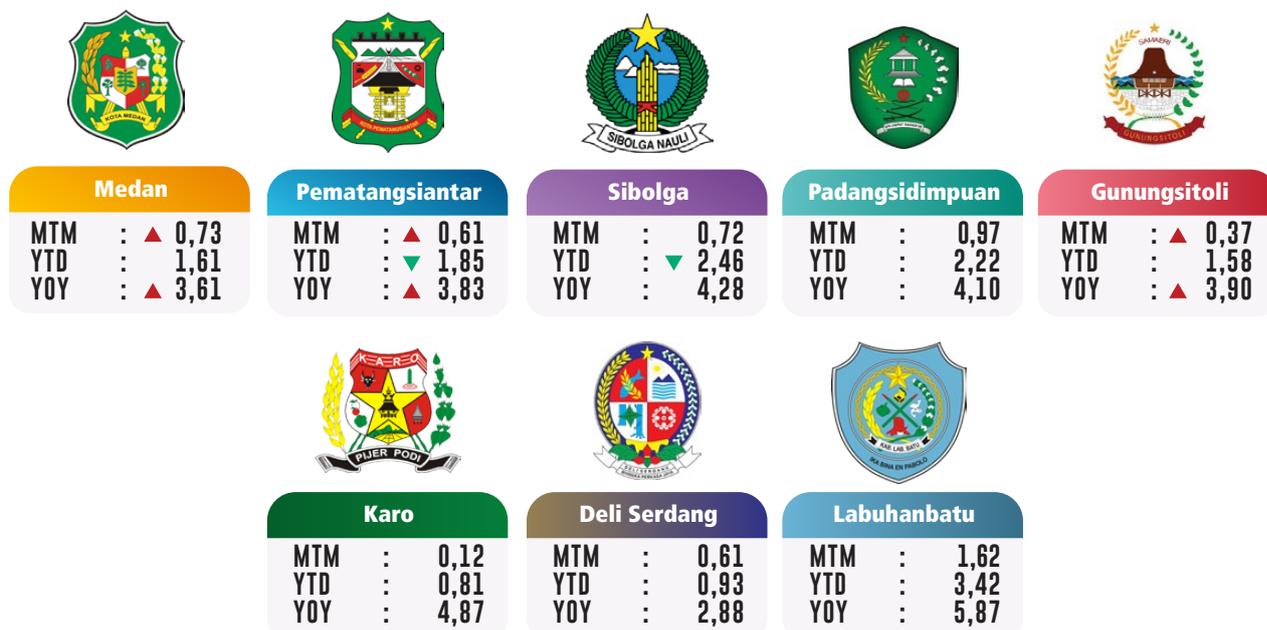
Tekanan inflasi di Kabupaten Deli Serdang tercatat mengalami inflasi terendah di antara 8 Kota/Kab IHK Sumatera Utara. Pada triwulan

laporan, inflasi Kab. Deli Serdang tercatat sebesar 2,89% (yoy). Berdasarkan kelompoknya, inflasi tersebut didorong oleh sumbangan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 2,59% (yoy), 0,10% (yoy), dan 0,07% (yoy).

Tekanan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau secara umum didorong oleh kenaikan harga cabai merah, beras, dan telur ayam ras, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,19% (yoy), 0,72% (yoy), dan 0,51% (yoy). Kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh kelangkaan barang/pasokan di sentra produksi di Sumatera Utara seiring banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang. Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Sementara, kenaikan harga telur ayam ras disebabkan oleh sempat tingginya harga pakan ternak

**Gambar 3.1** Inflasi di Kota/Kab IHK Sumatera Utara Triwulan I 2024

#### Perkembangan Inflasi secara spasial di Kota IHK Sumatera Utara



Tabel 3.3 Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Sampel

Andil Inflasi Triwulan I 2024 (yoy%)								
No.	Medan		Sibolga		Pematangsiantar		Padangsidempuan	
1	BERAS	0,580	BERAS	0,800	BERAS	0,824	CABAI MERAH	0,928
2	DAGING AYAM RAS	0,456	CABAI MERAH	0,610	CABAI MERAH	0,359	BERAS	0,612
3	CABAI MERAH	0,339	BAWANG MERAH	0,307	DAGING AYAM RAS	0,323	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,309
4	EMAS PERHIASAN	0,148	TARIF RUMAH SAKIT	0,278	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	0,216	EMAS PERHIASAN	0,191
5	MINYAK GORENG	0,139	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,240	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,166	DAGING AYAM RAS	0,168
No.	Gunungsitoli		Karo		Deli Serdang		Labuhanbatu	
1	BERAS	0,789	BERAS	1,060	CABAI MERAH	1,191	BERAS	0,704
2	ANGKUTAN UDARA	0,698	BAWANG MERAH	0,825	BERAS	0,723	TELUR AYAM RAS	0,633
3	CABAI MERAH	0,567	CABAI MERAH	0,596	TELUR AYAM RAS	0,508	CABAI MERAH	0,554
4	DAGING AYAM RAS	0,453	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,556	CABAI HIJAU	0,294	CABAI RAWIT	0,489
5	CABAI RAWIT	0,357	TELUR AYAM RAS	0,365	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,192	GULA PASIR	0,363
Andil Deflasi Triwulan I 2024 (yoy%)								
No.	Medan		Sibolga		Pematangsiantar		Padangsidempuan	
1	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,089	IKAN CAKALANG/ IKAN SISIK	-0,146	IKAN ASIN TERI	-0,123	IKAN DENCIS	-0,133
2	PEPAYA	-0,046	IKAN ASIN TERI	-0,067	KULKAS/LEMARI ES	-0,076	UDANG KERING (EBI)	-0,073
3	PIR	-0,030	IKAN SERAI	-0,062	PASTA GIGI	-0,072	SABUN CAIR/CUCI PIRING	-0,057
4	JERUK	-0,029	POPOK BAYI SEKALI PAKAI/ DIAPERS	-0,052	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,069	IKAN SALE/SALAI	-0,042
5	MASKER	-0,029	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG	-0,047	TELEVISI BERWARNA	-0,054	PIR	-0,035
No.	Gunungsitoli		Karo		Deli Serdang		Labuhanbatu	
1	DAGING BABI	-0,554	IKAN DENCIS	-0,519	TOMAT	-0,365	IKAN DENCIS	-0,177
2	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG	-0,120	TOMAT	-0,474	UDANG BASAH	-0,308	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,161
3	SABUN DETERGEN BUBUK	-0,089	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,166	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,154	IKAN ASIN TERI	-0,116
4	IKAN MERAH	-0,083	DAGING BABI	-0,146	BAWANG MERAH	-0,136	IKAN GABUS	-0,104
5	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,080	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	-0,123	KACANG PANJANG	-0,113	IKAN SENANGIN	-0,091

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

pada awal tahun yang berdampak pada peningkatan harga dari komoditas ini.

Selanjutnya, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga turut menjadi penyumbang inflasi Kab. Deli Serdang pada triwulan I 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,10% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh peningkatan harga kemeja pendek katun pria dan blus wanita dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02% (yoy). Kenaikan harga kedua komoditas ini terjadi seiring dengan tingginya permintaan masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri.

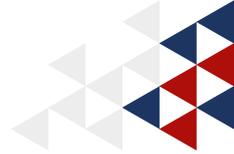
Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh peningkatan harga pada komoditas tissu, lipstik, dan jam tangan dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02% (yoy) pada

triwulan I 2024. Peningkatan biaya ini terjadi sejalan dengan tingginya permintaan masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri.

Di sisi lain, inflasi lebih tinggi di Kab. Deli Serdang tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Pada triwulan I 2024, komoditas tomat, udang basah, dan ikan tongkol mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,37% (yoy), 0,31%, dan 0,15% (yoy).

### 3.4 KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Realisasi inflasi di Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan, sebagai langkah pengendalian inflasi ke depan perlu dukungan kuat berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi



Sumatera Utara, terutama melalui GNPIP dengan mengacu pada pedoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Selama triwulan I 2024, hal-hal yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan sebagai berikut:

### **Keterjangkauan Harga**

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPID Provinsi Sumatera Utara melakukan beberapa Upaya diantaranya:

- a. Pendataan tarif angkutan udara dalam negeri dari semua maskapai yang beroperasi yang dilakukan oleh pihak otoritas bandara setiap harinya guna memantau serta mengawasi kenaikan tarif angkutan udara yang melebihi Tarif Batas Atas (TBA), berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sumatera Utara.
- b. Melakukan serangkaian pelaksanaan Operasi Pasar Murah secara masif di beberapa daerah sebagai tindak lanjut dari arahan Pj. Gubernur Sumut dalam HLM TPID untuk menyediakan pangan murah selama HBKN Ramadhan dan Idul Fitri bagi masyarakat yakni berupa peningkatan frekuensi pasar murah khususnya saat HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, sampai dengan April 2024 tercatat telah terlaksana Operasi Pasar Murah 198 titik, dan Gerakan Pangan Murah di 196 titik.
- c. Guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, Pemerintah Kota Medan melalui PUD Pasar Kota Medan juga menghadirkan 1 unit mobil pasar murah keliling pada 21 kecamatan secara bergiliran di Kota Medan yang menjajakan 3 komoditas kebutuhan pokok yakni beras, minyak goreng, dan gula pasir setiap hari kerja dengan harga subsidi Pemerintah Kota Medan.

### **Ketersediaan Pasokan**

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan, diantaranya:

- a. Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi dengan optimalisasi penggunaan pompa air PLTS untuk area persawahan tadah

hujan yang belum tersedia jaringan irigasi di Kab. Samosir, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Labuhanbatu, dan Kab. Langkat.

- b. Telah ditetapkan IP 400 di 9 desa di Kab. Langkat, 2 desa di Kab. Serdang Bedagai dan 1 desa di Kota Tebing Tinggi dengan luas lahan 1.373 Ha, yang berdampak pada peningkatan masa tanam dari 3 kali menjadi 4 kali per tahun. Dukungan yang diberikan adalah penyediaan benih, pupuk organik, NPK, dan pestisida kepada petani serta pendampingan oleh PPL.
- c. Optimalisasi realisasi pupuk subsidi kepada petani dengan hanya menggunakan KTP.
- d. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan melakukan penjajakan dan pembelian cabai merah langsung ke petani/keompok tani, dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Karo. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut rencana pengembangan KAD serta untuk menyikapi tingginya harga kebutuhan pangan di Kota Medan khususnya cabai merah.
- e. Menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di BULOG dalam jumlah yang mencukupi baik beras SPHP maupun beras komersil di bawah harga HET.
- f. Peningkatan produksi juga terus dilakukan pada komoditas yang belum mencapai swasembada seperti bawang merah dan kacang kedelai. Peningkatan produktivitas bawang merah melalui program Pangan Kita Bersama di Kabupaten Humbang Hasundutan dan di Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan teknik budidaya bawang merah dengan biji yang lebih terbebas dari risiko penyakit serta dapat memotong biaya produksi dan teknologi digital farming untuk mencapai efisiensi dalam pemupukan. Kemudian, dalam pengembangan swasembada kedelai, saat ini Pesantren Taruna Al-Qolam bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia berhasil mengembangkan budidaya kedelai di Sumatera Utara. Ke depan, akan dilakukan replikasi budidaya kedelai di lahan klaster padi Gapoktan Harapan sebagai tanaman selingan pasca panen. Selain itu, replikasi juga akan dilakukan pada pesantren binaan lainnya di Sumatera Utara sepanjang tahun



2024. Diharapkan hal ini dapat menjadi langkah awal mendukung peningkatan produktivitas kedelai yang saat ini masih didominasi impor.
- g. TPID Provinsi Sumatera Utara melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Edaran untuk mengatur pengawasan dan peruntukkan dan kuota bahan bakar subsidi, sebagai langkah antisipasi peningkatan permintaan akibat kenaikan harga bahan bakar non-subsidi.
  - h. TPID Provinsi Sumatera Utara telah membentuk satgas ternak, melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak, komunikasi informasi dan edukasi biosecurity kandang ternak, pemberian bantuan obat-obatan hewan ternak, serta verifikasi surat kesehatan sebagai antisipasi memburuknya infeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ternak di Sumatera Utara.
  - i. Dalam rangka merespon adanya kenaikan biaya saprodi untuk pupuk dan obat-obatan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pelatihan pembuatan dan penggunaan pupuk biosaka yakni pupuk cair yang dibuat dari larutan tumbuhan atau rerumputan yang diyakini mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan mampu menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90%.
  - j. Distribusi Bantuan Benih Padi pada tanggal 18 s/d 20 April 2024 di Kabupaten Labuhanbatu. Jumlah bantuan yang disalurkan adalah seluas 150 ha dengan volume 3.750 kg dengan varietas inpari 32 yang berada di Kecamatan Panai Tengah, Desa Sei Nahodaris sebanyak 6 kelompok tani.
  - k. Telah dilaksanakan Sidak Pasar dalam rangka memastikan ketersediaan bahan pokok jelang Idul Fitri pada tanggal 2 April di Pasar Petisah yg dipimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan pada tanggal 4 April di Pasar Sei Sikambang yg dipimpin oleh Pj Gubernur Sumut.

### Kelancaran Distribusi

Beberapa kegiatan untuk mendorong kelancaran distribusi adalah:

- a. Sinergi Dinas Perhubungan Sumatera Utara dan sejumlah instansi dalam mempermudah aturan lalu-lintas distribusi pangan melalui pengutamaan akses yang baik dan lancar terhadap kendaraan pengangkut bahan pangan di dalam kota. Selain itu, juga dilakukan pemantauan terhadap jalur transportasi darat yang rawan bencana alam.
- b. Melakukan sidak pasar secara berkala berkoordinasi dengan Satgas Pangan dalam rangka memastikan kelancaran distribusi khususnya menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
- c. BULOG telah memperluas distribusi bahan pangan khususnya beras SPHP hingga ke ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, Transmart, dan Indogrosir, serta kerjasama dengan Grab (Grab Benefit).

### Komunikasi Efektif

Dalam hal komunikasi efektif, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan koordinasi, serta membangun persepsi positif masyarakat diantaranya:

- a. Bank Indonesia Sumatera Utara bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan surat usulan pengendalian inflasi di daerah dan himbauan melaksanakan High Level Meeting (HLM) kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten berikut dengan evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 secara periodik.
- b. Telah diterbitkan SE Gubernur Sumut tanggal 14 Maret 2024 perihal Upaya Menjaga Inflasi Tahun 2024 serta Menjaga Stabilisasi Harga pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri I 2024. OPD terkait diminta mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan, optimalisasi operasi pasar murah, memastikan ketersediaan stok pangan, memastikan kelancaran distribusi dan melakukan moral persuasion untuk pengelolaan ekspektasi masyarakat atas ketersediaan bahan pangan pokok.
- c. Telah dilakukan Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan serta Gerakan Pangan Murah



dalam rangka menghadapi Idul Fitri pada 1 April 2024 di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.

- d. Program Mudik Gratis pada 6 April 2024 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya menekan angka kecelakaan, dan mengantisipasi dampak inflasi transportasi. Mudik gratis ini diikuti sebanyak 2.500 orang.

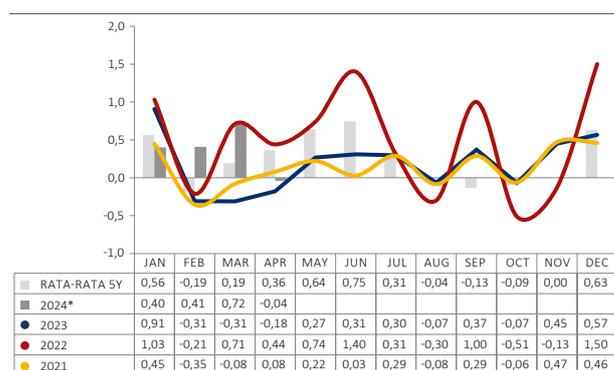
### 3.5 PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN II 2024

#### 3.5.1 Provinsi Sumatera Utara Mencatatkan Deflasi Pada April 2024

Secara bulanan, Provinsi Sumatera Utara pada April 2024 mengalami deflasi. Tingkat deflasi Provinsi Sumatera Utara pada bulan April 2024 tercatat sebesar 0,04% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (Maret 2024) yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,72% (mtm) – (Grafik 3.12). Adapun angka realisasi deflasi Provinsi Sumatera Utara pada bulan April 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang mengalami inflasi mencapai 0,25% (mtm) dan relatif lebih rendah dari rerata historis inflasi tiga tahun terakhir yang sebesar 0,11% (mtm). Sumber deflasi terutama terjadi karena penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (antara lain cabai merah, tomat, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras), sementara kelompok lainnya menahan laju deflasi terlalu dalam.

Secara spasial, dari 8 kota/kab IHK di Sumatera Utara, tercatat 6 kota/kab mengalami deflasi. Deflasi terdalam terjadi di Gunungsitoli sebesar 0,21% (mtm), diikuti Pematangsiantar 0,19%, Deli Serdang 0,14%, Sibolga 0,08%, Labuhanbatu 0,08%, dan Medan 0,03%. Di sisi lain, Padangsidempuan dan Karo mencatatkan inflasi masing-masing 0,33% dan 0,30%.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang deflasi pada April 2024. Kelompok ini mencatatkan deflasi sebesar 0,72%



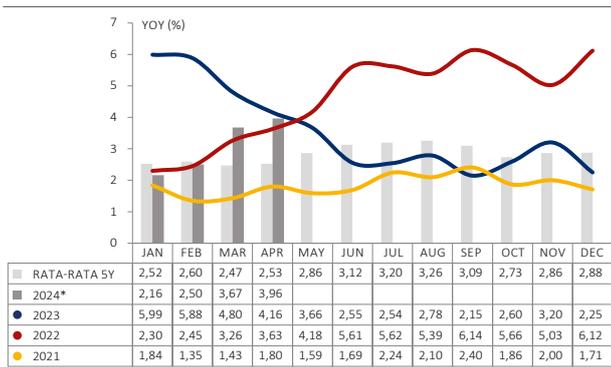
Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah \*) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

Grafik 3.12 Historis Inflasi Bulanan Sumatera Utara

(mtm), dengan andil deflasi bulanan sebesar 0,27% (mtm). Deflasi tersebut utamanya didorong oleh penurunan harga komoditas pangan seperti cabai merah, tomat, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras dengan andil deflasi bulanan masing-masing 0,39% (mtm), 0,10% (mtm), 0,09% (mtm), 0,05% (mtm), dan 0,04% (mtm). Penurunan harga aneka cabai disebabkan oleh masuknya musim panen di daerah Indrapura dan Batubara. Selanjutnya, penurunan harga tomat disebabkan oleh pasokan yang cukup melimpah dari Kabupaten Karo serta permintaan yang cenderung melemah. Sedangkan penurunan harga daging ayam ras disebabkan oleh masuknya panen pada awal April serta harga jagung sebagai pakan ternak yang mulai menurun mulai Maret dengan rerata harga sebesar Rp8.261/kg, dari rerata harga bulan sebelumnya yang sebesar Rp8.602/kg. Penurunan harga jagung didorong oleh meningkatnya pasokan seiring dengan masuknya periode panen pada Maret 2024.

Adapun secara tahunan, inflasi Provinsi Sumatera Utara pada April 2024 tercatat sebesar 3,96% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,67% (yoy) – (Grafik 3.13). Inflasi tahunan pada April 2024 juga tercatat lebih tinggi dari rata-rata inflasi tiga tahun terakhir pada periode yang sama yakni sebesar 3,20% (yoy). Dari sisi kelompok pengeluaran, laju inflasi April 2024 didorong oleh kenaikan harga sebagian besar kelompok, dengan andil inflasi terbesar berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan Kelompok Perawatan





Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah  
\*) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

Grafik 3.13 Historis Inflasi Tahunan Sumatera Utara

Pribadi dan Jasa Lainnya serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan andil inflasi masing-masing sebesar 3,03% (yoy), 0,24% (yoy), dan 0,15% (yoy). Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dipicu oleh kenaikan harga beras, cabai, dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,58% (yoy), 0,47% (yoy), dan 0,38% (yoy). Selanjutnya, inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,17% (yoy). Sementara itu, inflasi pada Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran utamanya didorong oleh kenaikan harga mie dan bakso siap santap dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02% (yoy).

### 3.5.2 Tekanan Inflasi Triwulan II 2024 Diperkirakan Tetap Tinggi

**Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II 2024 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024, dan berada di atas sasaran target inflasi tahun 2024 sebesar 2,5 ± 1,0% (yoy).** Tekanan inflasi bersumber dari akselerasi harga pada seluruh komponen disagregasi, baik *Core Inflation (CI)*, *Administered Price (AP)*, dan *Volatile Food (VF)*. Arah komponen CI mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh potensi meningkatnya permintaan masyarakat seiring jelang Idul Adha, ketergantungan terhadap gula pasir impor yang cukup tinggi sedangkan harga gula pasir global diperkirakan terus meningkat

seiring dengan Brazil sebagai produsen terbesar gula pasir mengalihkan hilirisasinya ke Ethanol dan India yang sudah menutup keran ekspor, hingga potensi berlanjutnya peningkatan harga emas dunia (*safe haven*). Selanjutnya, peningkatan harga pada komponen VF didorong oleh peningkatan permintaan jelang Idul Adha, prakiraan berlanjutnya konflik geopolitik yang berdampak pada gangguan produksi dan distribusi pangan strategis. Disisi lain, arah komponen AP mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh potensi kenaikan harga angkutan udara akibat HBKN Idul Adha yang juga didukung dengan libur panjang sekolah dan berlanjutnya dampak transmisi kenaikan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok.

Tekanan inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II 2024 diperkirakan disebabkan oleh kenaikan harga yang terjadi pada beberapa kelompok.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diperkirakan masih akan menjadi salah satu penyumbang inflasi Sumatera Utara. Tekanan ini diduga dapat terjadi dengan masih terjaganya konsumsi masyarakat ditengah prakiraan pasokan yang cukup untuk triwulan II 2024. Pasokan yang cukup ini didorong dengan adanya rencana panen yang terjadi di berbagai daerah, seperti cabai merah dari Indrapura dan Pakpak Bharat yang mulai panen di bulan Mei, padi yang mulai panen di bulan Juni di beberapa kabupaten sentra di Sumatera Utara. Disamping itu, Sebagian stok/pasokan beras juga digunakan untuk pemenuhan berlanjutnya bantuan beras hingga Juni 2024.

Selanjutnya, Kelompok Transportasi diperkirakan menjadi penyumbang inflasi Sumatera Utara pada triwulan II 2024. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring meningkatnya mobilitas dan permintaan masyarakat menjelang HBKN Idul Adha 2024 yang juga bersamaan dengan hari libur anak sekolah yang berpotensi meningkatkan permintaan angkutan udara lebih tinggi.



Kelompok Pendidikan juga diperkirakan menjadi penyumbang inflasi Sumatera Utara pada triwulan II 2024. Tekanan inflasi pada kelompok ini diperkirakan utamanya bersumber dari kenaikan harga biaya sekolah, buku, dan alat tulis sejalan dengan mulai masuknya tahun ajaran baru.

Terakhir, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga diperkirakan menjadi penyumbang inflasi Sumatera Utara pada triwulan II 2024. Tekanan inflasi pada kelompok ini seiring dengan potensi terjadinya lonjakan permintaan masyarakat pada HBKN Idul Adha dan juga pakaian sekolah anak serta semakin lunturnya dampak *scarring effect* pandemi yang mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan tersebut, secara keseluruhan pada triwulan II 2024, laju inflasi Sumatera Utara diperkirakan mengalami tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2024.





► BOKS 2

## **Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Antar Daerah (KAD) Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Dairi**

---



Berdasarkan rilis BPS, pergerakan inflasi Nasional berada dalam tren penurunan di tengah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2024 tercatat sebesar 0,25% (mtm) sehingga secara tahunan menjadi 3,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,05% (yoy). Sejalan dengan inflasi Nasional, inflasi Sumatera Utara juga mencatatkan deflasi pada bulan April 2024 dengan tingkat deflasi sebesar 0,04% (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 3,96% (yoy). Perkembangan ini tentu tidak terlepas dari sinergi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat, Pemerintah



Sumber: Dokumentasi Bank Indonesia

**Gambar B2.1** Pembahasan Langkah Pengendalian Inflasi Melalui KAD, dipimpin oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara

Daerah, dan mitra strategis lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) salah satunya melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Lebih lanjut, hasil asesmen Bank Indonesia menunjukkan bahwa laju inflasi Sumatera Utara pada tahun 2024 diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional  $2,5\% \pm 1\%$ . Sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran Pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan diharapkan dapat mengarahkan inflasi akhir tahun ke dalam sasaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa risiko pendorong inflasi Sumatera Utara baik yang berasal dari sisi suplai seperti potensi gangguan produksi hortikultura seiring dengan mundurnya masa tanam dan dari sisi demand mengingat permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan cenderung meningkat sejalan dengan perayaan HBKN Idul Adha 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, langkah pengendalian inflasi yang bersifat antisipatif tentunya perlu terus dilakukan oleh TPID Provinsi/Kabupaten/Kota serta berbagai OPD terkait, diantaranya melalui KAD intra wilayah dalam mencukupi ketersediaan pasokan pangan strategis. Pelaksanaan KAD tersebut juga dapat menjadi bagian dari komitmen bersama untuk



Sumber: Dokumentasi Bank Indonesia

**Gambar B2.2** Momen Foto Bersama Pj. Gubernur Sumatera Utara, Bupati Karo, Pj. Bupati Langkat, Pj. Bupati Dairi, dan Seluruh Pihak yang Terlibat

terus mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nyata bagi stabilitas harga pangan, serta mendukung kesejahteraan petani dengan tersedianya kepastian harga dan permintaan pasar.

Dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan KAD, Bank Indonesia akan terus mendorong dan memfasilitasi berbagai program kegiatan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (baik dari sisi hulu maupun hilir) agar dapat meningkatkan produktivitas, kontinuitas, dan kualitas produk tanaman hortikultura yang dihasilkan di Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan dan koridor Bank Indonesia.

Pada hari Senin, 13 Mei 2024 telah dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka Pengendalian Inflasi antara Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Dairi bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Kegiatan

tersebut dihadiri oleh Bp. Hassanudin selaku PJ Gubernur Sumatera Utara, Bp. Suharman Tabrani selaku Deputy Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bupati Karo, Pj Bupati Langkat, Pj Bupati Dairi, Kepala Biro Perekonomian Provsu, dan Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemasok dan pedagang.

Terdapat tiga jenis kesepakatan yang ditandatangani pada acara tersebut:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan Pemerintah Kabupaten Karo tentang Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Penanganan Pengendalian Inflasi
2. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas terkait Pemda Kab. Langkat dan Dinas terkait Pemda Kab. Dairi tentang Fasilitasi Penyediaan dan Pendistribusian Kebutuhan Komoditi Pangan dalam rangka Penanganan Pengendalian Inflasi
3. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas terkait Pemda Kab. Langkat dan Dinas terkait Pemda Kab. Karo tentang Fasilitasi Penyediaan dan Pendistribusian Kebutuhan Komoditi Pangan dalam rangka Penanganan Pengendalian Inflasi

Adapun rincian komoditas pangan yg diperdagangkan dan disepakati dalam KAD tersebut yaitu telur dan ikan dari Langkat serta cabai dari Karo dan Dairi.

Pj Gubernur Sumut mengharapkan KAD ini dapat terlaksana dengan baik sehingga pemenuhan komoditas pangan antar wilayah dapat terpenuhi dan dapat menekan laju inflasi. Selain itu, apresiasi juga disampaikan terhadap upaya penanganan inflasi yang telah dilakukan OPD Provinsi maupun Kab/Kota sehingga April mencatat deflasi 0,04 namun secara tahunan, inflasi Sumut masih relatif tinggi sehingga perlu kerjasama yang lebih solid termasuk mereplikasi hal baik yang sudah dilakukan daerah lain. Kemudian Pj. Gubernur Sumatera Utara turut memberikan himbauan terkait langkah antisipatif pengendalian inflasi ke depan antara lain:

1. Melakukan langkah konkrit penanganan inflasi antara lain, bantuan transportasi, KAD, pasar murah dan sidak pasar sebagaimana arahan Kemendagri pada Rakor setiap senin pagi.
2. Aktif menyampaikan laporan pengendalian inflasi baik secara harian, triwulanan dan secara tahunan agar upaya yang telah dilakukan dapat dimonitoring
3. Meningkatkan produktivitas komoditas tanaman pangan melalui Gerakan Menanam.
4. Mendiagnosa penyebab kenaikan harga agar upaya yang dilakukan tepat sasaran.



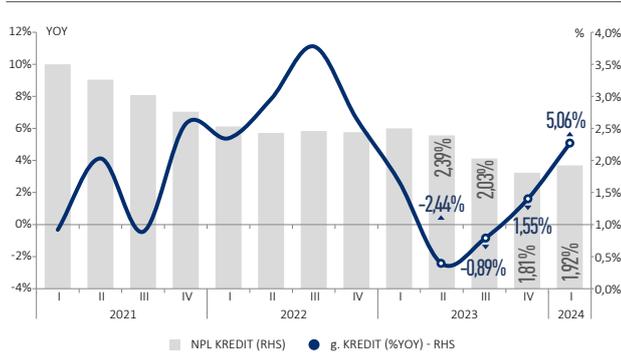


#### Bab IV

## Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

**Penyaluran kredit di Sumatera Utara terakselerasi dengan risiko yang terjaga.** Pada triwulan I 2024, penyaluran kredit di Sumatera Utara tumbuh menguat sebesar 5,06% yoy dari triwulan sebelumnya 1,55% yoy. Hal ini didorong oleh tetap kuatnya pertumbuhan kredit Konsumsi dan Modal Kerja di tengah masih lemahnya kredit Investasi. Kredit Rumah Tangga Sumatera Utara tumbuh solid seiring dengan perayaan Imlek serta berlanjutnya insentif makroprudensial dan fiskal dalam mendorong pembelian perumahan dan kendaraan bermotor. Penyaluran kredit kepada UMKM juga tetap solid dan berimbang antara kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Kinerja kredit korporasi di sektor konstruksi, industri dan perdagangan tumbuh kuat seiring berlanjutnya investasi sektor swasta dan tingginya permintaan jelang HBKN Idul Fitri. Meski demikian, kredit di sektor pertanian masih tertahan seiring likuiditas sektor swasta yang masih cukup ample. Di satu sisi, risiko kredit cenderung stabil di tengah kesehatan perbankan yang terjaga. Secara keseluruhan, intermediasi perbankan terjaga dalam kondisi sehat dengan LDR sebesar 81,9% di tengah suku bunga yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.





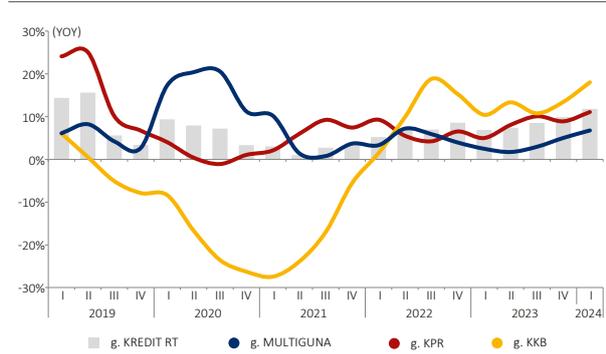
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.1** Perkembangan Kredit dan NPL Sumatera Utara

## 4.1 PEMBIAYAAN DAERAH

**Penyaluran kredit di Sumatera Utara terakselerasi dengan risiko yang terjaga.** Pada triwulan I 2024, penyaluran kredit di Sumatera Utara tumbuh menguat sebesar 5,06% yoy dari triwulan sebelumnya 1,55% yoy dengan risiko yang terjaga tercermin dari *Non Performing Loan (NPL)* yang rendah sebesar 1,92% – (Grafik 4.1). Hal ini didorong oleh tetap kuatnya pertumbuhan kredit Konsumsi dan Modal Kerja di tengah masih lemahnya kredit Investasi. Kredit Rumah Tangga Sumatera Utara tumbuh solid seiring dengan berlanjutnya insentif makroprudensial dan fiskal dalam mendorong pembelian perumahan dan kendaraan bermotor. Penyaluran kredit kepada UMKM juga tetap solid dan berimbang antara kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Kinerja kredit korporasi di sektor konstruksi, industri dan perdagangan tumbuh kuat seiring berlanjutnya investasi sektor swasta dan tingginya permintaan jelang HBKN Idul Fitri. Meski demikian, kredit di sektor pertanian masih tertahan seiring likuiditas sektor swasta yang masih cukup *ample*. Di satu sisi, risiko kredit cenderung stabil di tengah kesehatan perbankan yang terjaga.

Secara keseluruhan, intermediasi perbankan terjaga dalam kondisi sehat dengan LDR sebesar 81,9% di tengah suku bunga yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

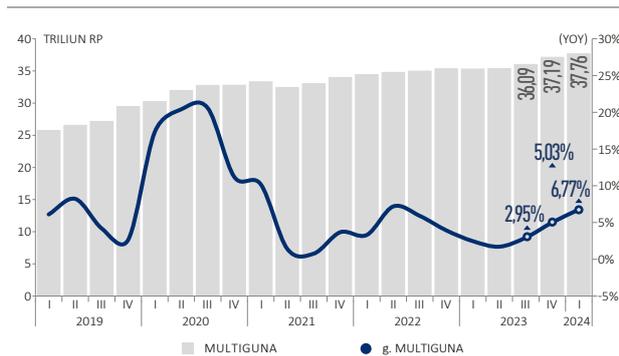
**Grafik 4.2** Perkembangan Kredit Rumah Tangga

### 4.1.1 Pembiayaan Rumah Tangga (RT)

**Pada triwulan I 2024 kredit rumah tangga tumbuh terakselerasi seiring dengan berlanjutnya insentif makroprudensial dan fiskal dalam mendorong pembelian perumahan dan kendaraan bermotor.** Realisasi kredit rumah tangga pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp79,32 triliun atau tumbuh 11,81% (yoy) – (Grafik 4.2). Pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang sebesar 9,86% (yoy) ini didorong oleh tingginya pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 18,00% (yoy) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 11,07% (yoy) serta tetap kuatnya pertumbuhan kredit multiguna sebesar 6,77% (yoy).

**Kinerja kredit rumah tangga ditopang oleh peningkatan kredit multiguna.** Dengan pangsa yang mendominasi kredit RT ( $\pm 47\%$ ), kredit multiguna tercatat tumbuh 6,77% (yoy) pada triwulan I 2024, meningkat dari sebelumnya 5,03% pada triwulan IV 2023 – (Grafik 4.3). Hal ini didorong oleh solidnya konsumsi di Sumatera Utara seiring dengan perayaan Imlek.

**Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) terakselerasi pada triwulan I 2024.** Pertumbuhan KKB meningkat dari triwulan IV 2023 yang tercatat 13,44% (yoy) menjadi 18,00% (yoy) pada triwulan I 2024. Berlanjutnya insentif makroprudensial berupa LTV 0% disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang mengakselerasi pembelian kendaraan bermotor



**Grafik 4.3** Perkembangan Kredit Multiguna

dengan melalui kredit. Selain itu, munculnya merk-merk di mobil berbasis bahan bakar maupun listrik seperti Hyundai, Wuling, Morris Garage (MG), VinFast, dan Build Your Dreams (BYD) disertai dengan promosi yang gencar dan insentif fiskal (PPN) terutama pada pembelian Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) mendorong masyarakat untuk mencoba dan melakukan penggantian kendaraan – (Tabel 4.1).

**KPR juga tumbuh tinggi terutama pada kelas menengah atas.** Pertumbuhan KPR pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 11,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat 8,89% (yoy). Hal ini didorong LTV 100% yang disertai dengan insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 50% untuk hunian maupun rumah komersial dengan harga Rp2-5 miliar.

KPR	Growth (%yoy)		Pangsa (%)		Kontribusi	
	Q4'23	Q1'24	Q4'23	Q1'24	Q4'23	Q1'24
Rumah Tinggal s.d. Tipe 21	25,6%	-74,6%	2,7%	0,9%	0,7%	-0,6%
Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70	6,4%	-2,5%	53,2%	47,2%	57,3%	53,3%
Rumah Tinggal Tipe Diatas 70	12,5%	15,7%	35,5%	35,2%	37,6%	35,1%
Flat atau Apartemen s.d. Tipe 21	-13,8%	-7,8%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Flat atau Apartemen Tipe 22 s.d. 70	26,6%	28,9%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%
Flat atau Apartemen Tipe Diatas 70	10,0%	17,2%	1,2%	1,2%	1,4%	1,4%
Rumah Toko atau Rumah Kantor	2,2%	146,4%	6,2%	14,4%	6,7%	6,2%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Tabel 4.1** Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor

KKB	Growth (%)		Pangsa (%)		Kontribusi	
	Q4'23	Q1'24	Q4'23	Q1'24	Q4'23	Q1'24
Mobil Roda Empat	15,6%	20,1%	82,6%	83,0%	12,9%	16,7%
Sepeda Bermotor	12,3%	19,4%	14,9%	14,7%	1,8%	2,8%
Truk dan Kendaraan Bermotor Roda Enam	-36,0%	-40,9%	2,0%	1,8%	-0,7%	-0,7%
Kendaraan Bermotor Lainnya	57,1%	67,5%	0,5%	0,6%	0,3%	0,4%

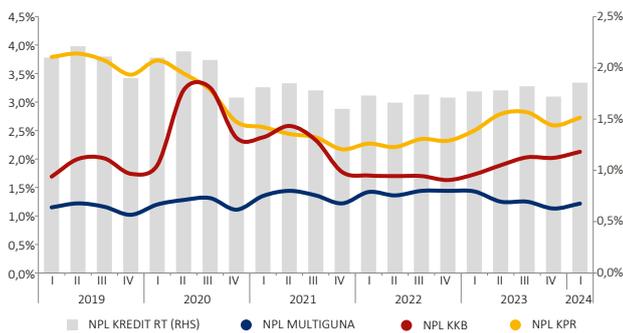
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan realisasi terkini, akselerasi KPR terutama terlihat pada Rumah Tinggal Tipe diatas 70 yang tumbuh dari 12,5% yoy menjadi 15,7% yoy; Flat atau Apartemen Tipe 22 s.d 80 yang tumbuh dari 26,6% (yoy) menjadi 28,9% (yoy) serta Flat atau Apartemen Tipe diatas 70 yang terakselerasi dari 10,0% (yoy) menjadi 17,2% (yoy). Hal ini sejalan dengan insentif PPN DTP yang diperkirakan menyasar properti segmen menengah. Selain itu, PPN DTP juga diberikan untuk pembelian rumah komersial dengan nilai di bawah Rp 5 miliar. Hal ini juga mendorong pertumbuhan kredit Rumah Toko atau Rumah Kantor dari 2,2% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 146,4% (yoy) pada triwulan I 2024 - (Tabel 4.2).

**Kualitas kredit Rumah Tangga yang tercermin dari besarnya Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah tetap berada di bawah 5%.** NPL kredit Rumah Tangga sedikit meningkat dalam batas yang wajar pada triwulan laporan, dari 1,72% pada triwulan IV 2023 menjadi 1,86% pada triwulan laporan. Peningkatan NPL terjadi pada seluruh segmen baik kredit KPR, KKB dan multiguna. NPL kredit KPR naik dari 2,59% pada triwulan IV 2023 menjadi 2,72% pada triwulan laporan, NPL KKB naik dari 2,02% pada triwulan IV 2023 menjadi 2,13% pada triwulan laporan dan NPL multiguna naik dari 1,13% pada triwulan IV 2023 menjadi 1,22% pada triwulan laporan – (Grafik 4.4).

### 4.1.2 Pembiayaan Korporasi

**Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2024 terus berada dalam jalur pemulihan.** Kontraksi pertumbuhan penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2024 semakin terbatas yakni sebesar -0,5%

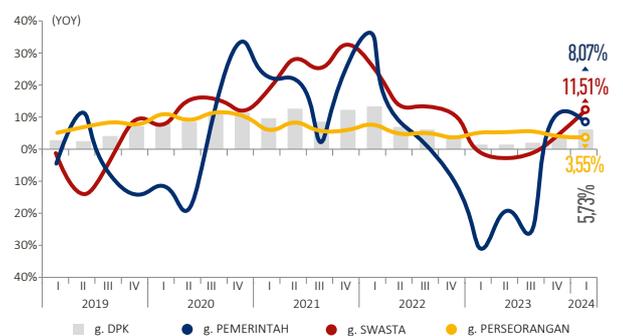


Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.4** NPL Kredit Rumah Tangga

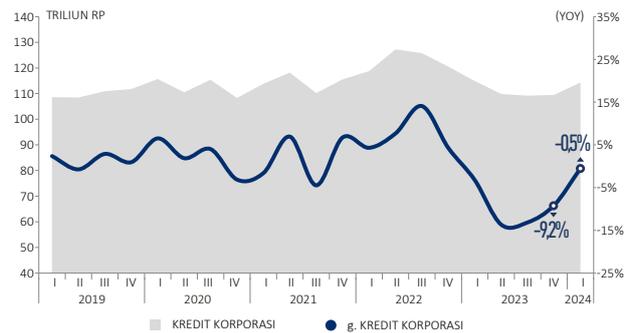
(yoy) setelah triwulan sebelumnya terkontraksi cukup dalam sebesar -9,2% (yoy) pada triwulan IV 2023 juga – (Grafik 4.5).

Terbatasnya perbaikan pertumbuhan kredit korporasi dikarenakan likuiditas sektor swasta yang masih cukup baik hal ini tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) swasta yang masih tumbuh tinggi terutama pada nilai diatas Rp5 miliar. Jika ditinjau dari sisi sektoral, kredit pertanian yang mayoritas didominasi oleh perusahaan berbasis kelapa sawit masih tumbuh negatif. Hal ini terkait dengan tingginya likuiditas korporasi swasta pada sektor tersebut seiring dengan peningkatan harga CPO yang sangat besar pada tahun 2022 akibat dampak konflik Ukraina-Rusia yang mendorong langkanya ketersediaan barang substitusi minyak sawit (minyak bunga matahari) dan pada gilirannya mendorong kenaikan harga minyak kelapa sawit. Dengan kondisi tersebut korporasi eksportir kelapa sawit diperkirakan masih mendanai ekspansi dengan likuiditas yang ada – (Grafik 4.6).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.6** Pertumbuhan DPK Sumatera Utara berdasarkan Sektor

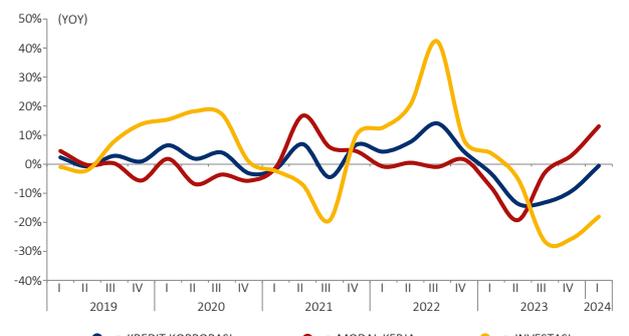


Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.5** Pertumbuhan Kredit Korporasi

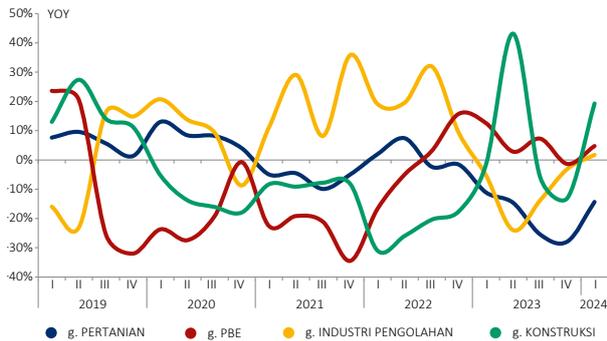
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja dan investasi berada dalam *path* perbaikan – (Grafik 4.7). Pada triwulan I 2024, kredit modal kerja korporasi terakselerasi dari 3,1% (yoy) menjadi 13,0% (yoy) pada triwulan I 2024. Peningkatan ini utamanya didorong oleh sektor perdagangan seiring dengan perayaan Imlek dan peningkatan konsumsi jelang HBKN Idul Fitri. Di satu sisi, kredit investasi juga berada dalam tren pemulihan meski masih tumbuh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Masih melimpahnya likuiditas di sektor swasta sehingga kegiatan investasi diperkirakan masih didanai dari likuiditas perusahaan. Di tengah perbaikan kredit koperasi, kualitas kredit koperasi masih tetap terjaga, tampak dari tingkat NPL kredit koperasi yang tetap rendah sebesar 1,3% pada triwulan I 2024.

Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan kredit terlihat pada sektor konstruksi, perdagangan, dan industri pengolahan sedangkan sektor



Sumber: Bank Indonesia, diolah

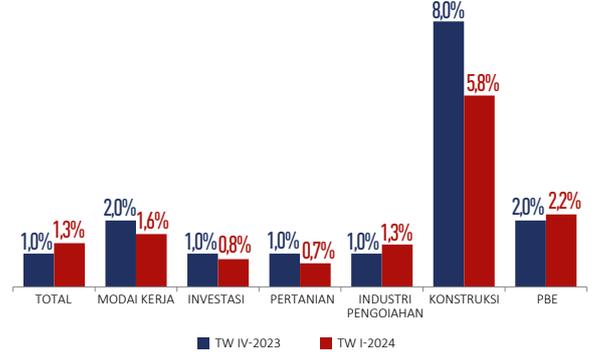
**Grafik 4.7** Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan



**Grafik 4.8** Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha

**pertanian masih tertahan – (Grafik 4.8).** Kredit Industri Pengolahan pada triwulan I 2024 masih tumbuh sebesar 1,7% (yoy) mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, kredit korporasi di sektor Konstruksi pada triwulan I 2024 tumbuh tinggi 19,3% (yoy) pulih signifikan dari sebelumnya terkontraksi sebesar -13,0% (yoy). Pemulihan juga terlihat pada sektor perdagangan, besar dan eceran (PBE) yang tercatat tumbuh 4,8% (yoy) pada triwulan I 2024 dari sebelumnya mengalami kontraksi -1,4% (yoy). Di sisi lain, penyaluran kredit korporasi pada sektor utama lainnya yakni pertanian masih terbatas yakni -14,3% (yoy) sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -25,6% (yoy). Tingginya likuiditas di sektor tersebut mendorong sektor swasta untuk mengutamakan pemanfaatan dana kas atau setara kas yang dimiliki untuk mendanai ekspansi perusahaan.

**Selanjutnya, dilihat berdasarkan rasio kredit yang bermasalah, NPL kredit korporasi tetap terjaga pada level yang rendah.** Pada triwulan I 2024, NPL kredit korporasi tercatat sebesar 1,3% atau cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi sektoral, sektor yang mengalami penurunan NPL yang signifikan adalah konstruksi dari 8% menjadi 5,8% pada triwulan laporan. Terbatasnya pertumbuhan kredit yang disertai penurunan NPL di sektor pertanian mengkonfirmasi bahwa terbatasnya intermediasi pada sektor tersebut tidak terkait dengan faktor kehati-hatian. Di sisi lain, masih terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan NPL meski tidak terlalu

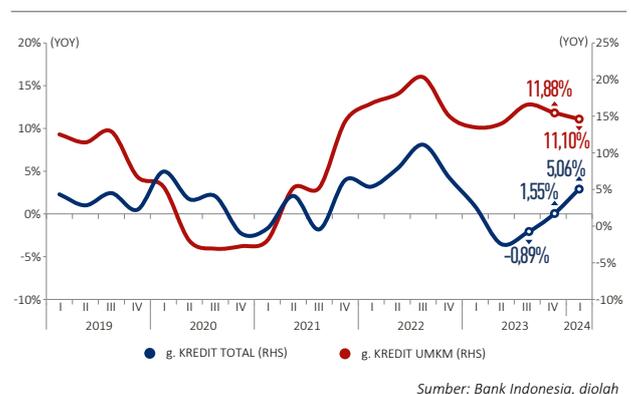


**Grafik 4.9** NPL Kredit Korporasi

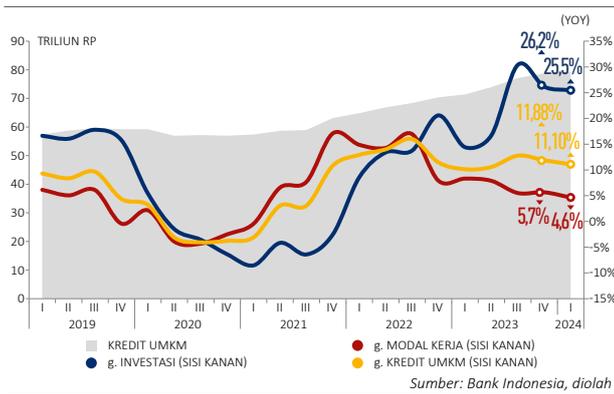
besar, seperti sektor industri pengolahan dan PBE – (Grafik 4.9).

## 4.2 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

**Sejalan dengan perbaikan kredit secara total, kredit UMKM masih tercatat tumbuh tinggi.** Kredit yang disalurkan untuk UMKM pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp79,30 triliun, dengan pertumbuhan secara tahunan sebesar 11,10% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 11,88% (yoy) – (Grafik 4.10). Berdasarkan jenis kreditnya, kredit modal kerja yang mendominasi pangsa kredit UMKM hingga 68% masih menunjukkan tren penurunan menjadi 4,6% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit investasi sedikit termoderasi dari 26,2% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 25,5% (yoy) pada triwulan I 2024 – (Grafik 4.11).



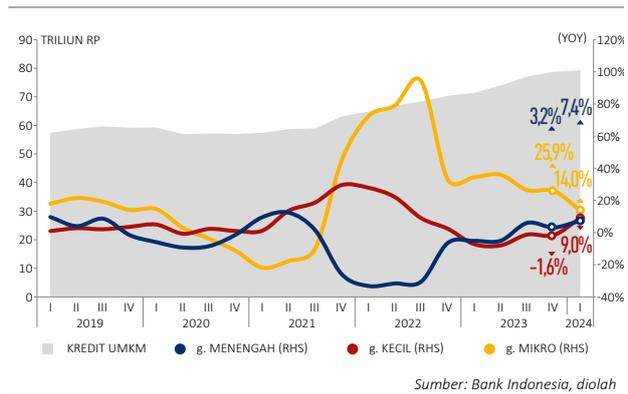
**Grafik 4.10** Pertumbuhan Kredit UMKM



**Grafik 4.11** Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Kredit

Ditinjau dari segmennya, pertumbuhan kredit UMKM di triwulan I 2024 cenderung berimbang. Secara nominal, pangsa kredit terbesar berasal dari segmen mikro sebesar 49,88%, diikuti oleh segmen kecil 27,80% dan menengah 22,32%. Pertumbuhan penyaluran kredit pada segmen usaha cenderung berimbang pada triwulan I 2024. Pertumbuhan kredit kelompok mikro pada triwulan I 2024 meningkat menjadi 2,42% (yoy) setelah sebelumnya pada triwulan IV 2023 sebesar 1,96% (yoy) – (Grafik 4.12). Selanjutnya, kredit kelompok kecil menunjukkan perbaikan menjadi sebesar 3,82% (yoy) dari triwulan sebelumnya mencapai 3,68% (yoy). Sedangkan kredit menengah melemah terbatas dengan pertumbuhan pada triwulan laporan sebesar 5,17% (yoy) dari triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,32% (yoy).

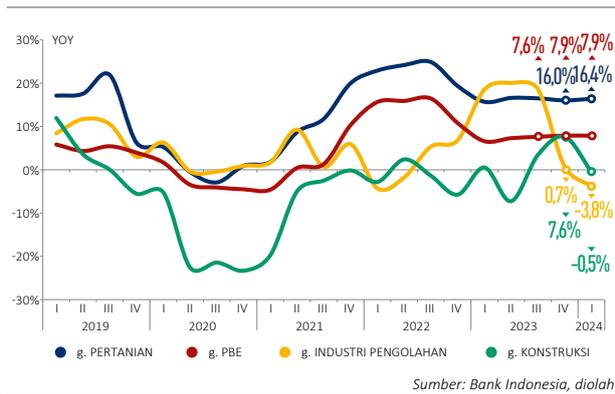
**Penyaluran kredit UMKM mengalami pertumbuhan di kedua sektor utama yakni Konstruksi dan PBE – (Grafik 4.13).** Penyaluran kredit UMKM di sektor pertanian tumbuh tetap tinggi sebesar 16,4% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 16,0% (yoy). Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas panen dan produksi Tandan Buah Segar (TBS) masih berlangsung seiring cuaca yang kondusif. Penyaluran kredit di sektor PBE juga tetap tinggi yakni sebesar 7,9% (yoy). Di sisi lain, kinerja kredit UMKM di sektor konstruksi dan industri pengolahan mengalami pelemahan.



**Grafik 4.12** Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Segmen UMKM

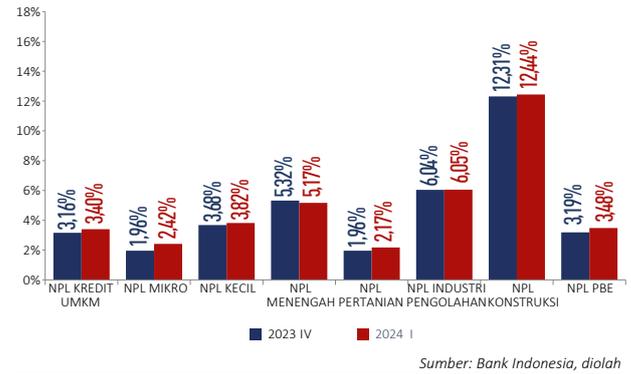
Selanjutnya, rasio kredit bermasalah UMKM menunjukkan sedikit peningkatan menjadi sebesar 3,40% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,16%. Kredit UMKM segmen mikro, yang memiliki *share* tertinggi mencapai 50%, mencatatkan NPL yang rendah meski sedikit meningkat dari 1,96% menjadi 2,42% pada triwulan berjalan. NPL di segemen kecil juga meningkat terbatas dari 3,68% menjadi 3,82% pada triwulan berjalan. Di satu sisi, NPL kredit UMKM menengah tergolong tinggi yakni 5,32% pada triwulan IV 2023 meski sudah sedikit menurun menjadi 5,17% pada triwulan I 2024. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, rasio kredit bermasalah LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, dan LU PBE masih berada pada kondisi aman (dibawah 5%). Namun demikian, perkembangan NPL LU konstruksi masih perlu diperhatikan ke depannya karena memiliki risiko kredit diatas 5% – (Grafik 4.14). Kondisi ini sejalan dengan hasil FGD dengan perbankan di Kota Medan yang menyatakan bahwa LU Konstruksi merupakan sektor prioritas pembiayaan dengan risiko tinggi dengan dampak ekonomi yang besar.

**Bank Indonesia melalui kebijakannya senantiasa terus berupaya mendorong optimalisasi realisasi kredit baik kredit secara keseluruhan maupun UMKM.** Dalam upaya meningkatkan pembiayaan perbankan dalam mendukung pemulihan ekonomi



**Grafik 4.13** Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

nasional, Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/5/PBI/2022 memberikan insentif bagi bank yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas, dan/atau perbankan yang memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berupa pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) harian sampai dengan sebesar 100 bps yang berlaku efektif sejak 1 Maret 2022. Adapun kewajiban pemenuhan RPIM yang tercantum dalam PBI Nomor 24/3/PBI/2022 dilakukan untuk posisi setiap akhir bulan Desember dan untuk pertama kali pada posisi Desember 2022 dengan penetapan target RPIM sesuai dengan penilaian mandiri bank tersebut. Dalam hal RPIM Bank pada posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih, target RPIM yang ditetapkan paling sedikit sebesar pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.



**Grafik 4.14** Perkembangan NPL Kredit UMKM

**Di tingkat regional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia juga mendorong pengembangan UMKM melalui pemenuhan target Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).** Adapun target pengembangan tersebut di antaranya pengembangan UMKM *go marketplace*, UMKM *go cashless*, fasilitasi UMKM *go export*, dan pemberdayaan kelompok UMKM wanita. Selain dari target TPAKD, Kantor Perwakilan Bank Indonesia turut mengembangkan UMKM binaan Bank Indonesia melalui pembinaan, pendampingan, dan *business matching*, serta pembukuan melalui pelatihan pelaporan keuangan melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) sehingga mempermudah UMKM memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.





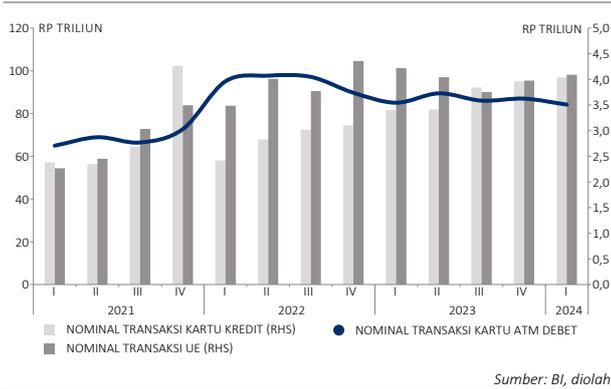


## Bab V

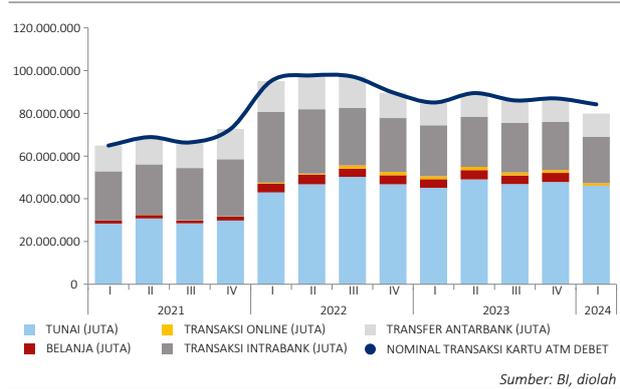
# Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan I 2024, transaksi sistem pembayaran terus terakselerasi khususnya pada pembayaran nontunai sejalan dengan meningkatnya akseptasi keuangan digital Masyarakat Sumatera Utara. Hal tersebut terkonfirmasi dari terus meningkatnya transaksi nontunai seperti kartu kredit tumbuh 18,60 (yoy), Uang Elektronik 16,38% (yoy), penyaluran bantuan sosial nontunai yang masih berjalan dengan lancar, serta akselerasi perluasan implementasi *Quick Response Code* Indonesia yang masih berlanjut. Dari sisi transaksi antar negara di Provinsi Sumatera Utara juga masih berlanjut yang tercermin dari masih tumbuhnya transaksi KUPVA maupun PJP LR sejalan dengan mobilitas Masyarakat yang meningkat pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Upaya perluasan implementasi nontunai terus dilakukan melalui kolaborasi program yang dilakukan bersama mitra startegi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Jasa Pembayaran baik bank dan nonbankseperti salah satunya melalui program *road to FEKDI: SEMESTA FEST* Tahun 2024.





**Grafik 5.1** Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debit, Kartu Kredit, dan UE  
*Sumber: BI, diolah*



**Grafik 5.2** Alokasi Penggunaan Kartu ATM Debit  
*Sumber: BI, diolah*

## 5.1 SISTEM PEMBAYARAN MENUNJUKKAN TREN PENINGKATAN

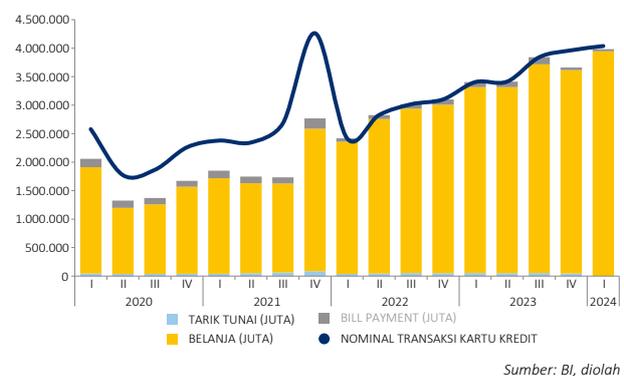
Pada triwulan I 2024, transaksi sistem pembayaran nontunai masih menunjukkan trend peningkatan penggunaan khususnya pada instrumen pembayaran Kartu Kredit dan Uang Elektronik. Peningkatan nominal transaksi kartu kredit dan Uang Elektronik tersebut sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat Sumatera Utara, khususnya menjelang Ramadhan Tahun 2024 (Grafik 5.1). Selain itu, meningkatnya penggunaan nontunai sejalan dengan preferensi masyarakat dalam menggunakan fasilitas kanal pembayaran yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal). Pada triwulan I 2024, secara nominal transaksi Uang Elektronik (UE) mengalami peningkatan 16,38% (yoy). Senada dengan Uang Elektronik transaksi, nominal transaksi kartu kredit juga meningkat sebesar 18,60% (yoy). Peningkatan kedua instrument tersebut mengindikasikan bahwa intensitas penggunaan Uang Elektronik dan APMK di masyarakat masih cukup tinggi, meskipun mulai mengalami perlambatan.

Pada transaksi transaksi kartu ATM/Debit di triwulan I 2024 mengalami perbaikan meski masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Tercatat nominal transaksi ATM Debit mengalami perbaikan menjadi -1,03% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar -3,05% (yoy). Perbaikan nominal transaksi kartu ATM debit terlihat pada transaksi online, transfer antarbank dan intrabank. Berdasarkan proporsinya, nominal transaksi kartu

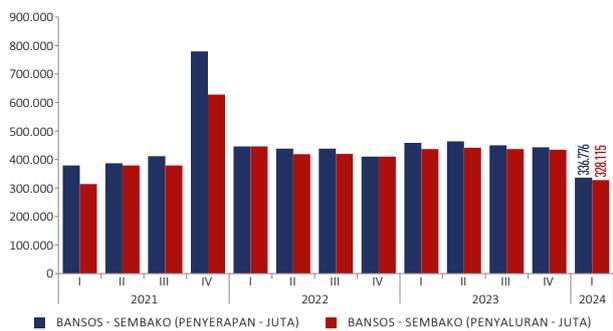
ATM/Debit masih mendominasi transaksi tunai dan transfer antar bank di Sumatera Utara (Grafik 5.2).

Pertumbuhan penggunaan kartu kredit tetap kuat seiring peningkatan daya beli dan perubahan preferensi masyarakat menuju nontunai. Pada triwulan I 2024, pertumbuhan nominal transaksi kartu kredit di Sumatera Utara yang masih menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 18,60% (yoy). Lebih lanjut, pada nominal transaksi kartu kredit menunjukkan beberapa peningkatan diantaranya pada transaksi belanja yaitu meningkat menjadi 21,20% pada triwulan I 2024 (Grafik 5.3).

Daya beli masyarakat bawah yang tetap kuat ditopang oleh penyerapan bantuan sosial (bansos) yang sesuai dengan rencana. Penyaluran program sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran bantuan sembako atau Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) berjalan lancar. Pada triwulan I (Januari-Desember) 2024, penyaluran BPNT tercatat



**Grafik 5.3** Alokasi Penggunaan Kartu Kredit  
*Sumber: BI, diolah*



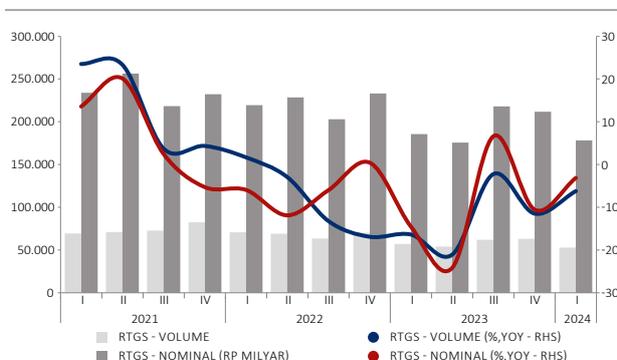
Sumber: Kementerian Sosial, diolah

**Grafik 5.4** Perkembangan BPNT

Rp336,77 miliar dengan tingkat penyerapan 97,43% atau sebesar Rp328,12 miliar (Grafik 5.4). Hingga triwulan I 2024, mekanisme penyaluran BPNT di Sumatera Utara masih dilakukan melalui dua metode, yaitu metode tunai (PT. Pos) dan nontunai (Himbara dan BSI).

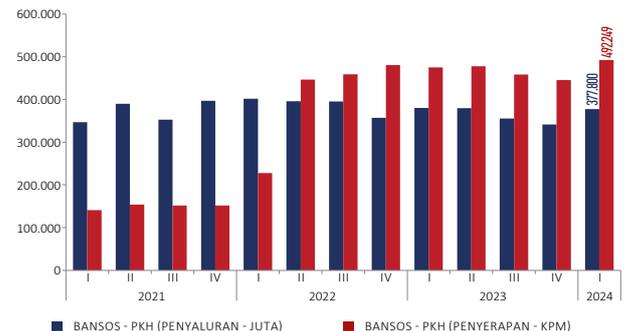
Sejalan dengan program BPNT, penyaluran pada Program Keluarga Harapan (PKH) juga berjalan lancar. Penyaluran PKH pada tahap I 2024 tercatat sebesar Rp377,80 Miliar, sementara dari sisi jumlah KPM penyerapan tercatat sebanyak 492,25 ribu KPM atau dengan tingkat penyerapan 99,40% yang menunjukkan penyerapan PKH masih berjalan dengan baik (Grafik 5.5).

**Di sisi lain, transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) pada triwulan I 2024 menunjukan peningkatan transaksi dibandingkan periode sebelumnya.** Nominal transaksi sistem RTGS



Sumber: BI, diolah

**Grafik 5.6** Perkembangan RTGS

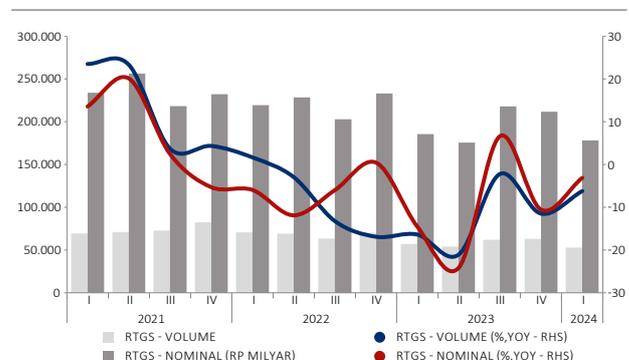


Sumber: Kementerian Sosial, diolah

**Grafik 5.5** Perkembangan PKH

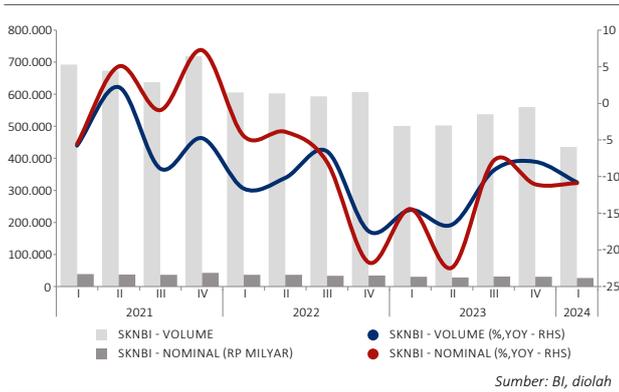
mengalami peningkatan pada triwulan I 2024, meskipun secara yoy pertumbuhannya masih tertahan sebesar -3,13% (yoy). Kondisi ini membaik dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat pertumbuhan negatif sebesar -6,20%. Sejalan dengan nominal transaksi, volume transaksi RTGS pada triwulan I 2024 tercatat masih mengalami penurunan sebesar -6,20% (yoy) atau lebih baik apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2023 sebesar -11,49% (yoy) (Grafik 5.6).

**Penggunaan infrastruktur SKNBI pada Triwulan I 2024 kembali tertahan.** Pada triwulan I 2024, pertumbuhan volume transaksi SKNBI menunjukkan tren peningkatan menjadi sebesar -13,08% (yoy), sejalan dengan nominal transaksi SKNBI yang menunjukkan penurunan (-12,27%, yoy) (Grafik 5.8). Penurunan tersebut di indikasikan oleh normalisasi pasca perayaan HBKN dan Natal tahun 2023.

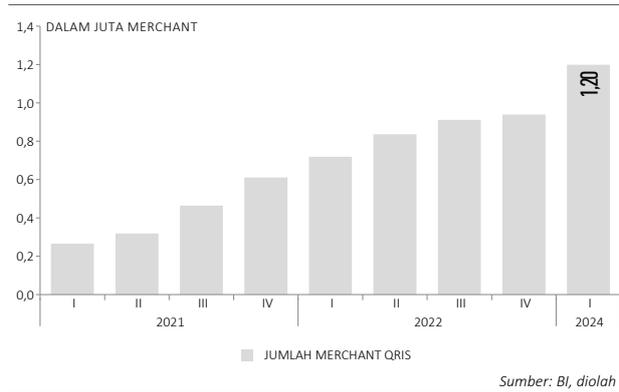


Sumber: BI, diolah

**Grafik 5.6** Perkembangan RTGS



Grafik 5.7 Perkembangan SKNBI



Grafik 5.8 Perkembangan Merchant QRIS

## 5.2 PROGRAM ELEKTRONIFIKASI BERJALAN LANCAR

### Perkembangan transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* terus terakselerasi.

Peningkatan penggunaan uang elektronik ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah *merchant* QRIS di Sumatera Utara. QRIS merupakan standardisasi pembayaran melalui metode *QR Code* atau kode baca cepat dari Bank Indonesia sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan aman.

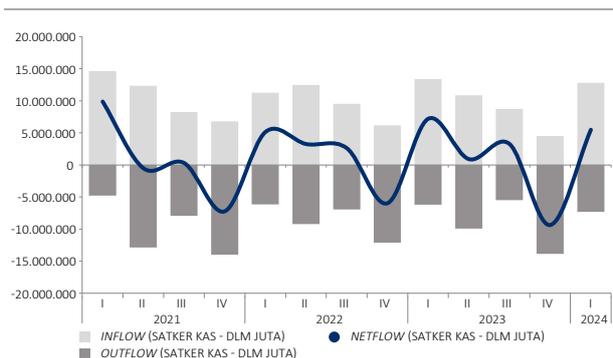
Pada triwulan I 2024, jumlah *merchant* QRIS di Sumatera Utara sebanyak 1,20 juta *merchant* atau tumbuh sebesar 24,30% (yoy). Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara memiliki target 395 ribu pengguna baru dan 60 juta volume transaksi, dimana realisasi sampai dengan triwulan I 2024 masing masing sebesar 24,54% dan 64,76% dari target. Edukasi dan sosialisasi pembayaran digital intensif dilakukan guna mendorong akseptasi Masyarakat melalui berbagai event strategis seperti *Semesta FEST: Road to FEKDI 2024*, kolaborasi event bersama perbankan dan kegiatan edukasi lainnya bersama PJP Bank dan NonBank, Pemerintah Daerah, Akademisi, Komunitas, dan lainnya.

**Guna mendukung percepatan transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, program elektronifikasi di Sumatera Utara terus diperluas.** Perluasan dilakukan ke beberapa sektor seperti moda transportasi, pariwisata, hingga transaksi keuangan pemerintah. Elektronifikasi Transaksi

Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi belanja dan pendapatan Pemerintah Daerah dari tunai menjadi *nontunai*. ETPD bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis melalui pemanfaatan teknologi serta inovasi di bidang sistem pembayaran.

Secara semesteran perkembangan digitalisasi daerah tercermin pada Indeks ETPD. Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya. Implementasi ETPD terus diperluas baik dari sisi perluasan elektronifikasi transaksi maupun pemanfaatan kanal pembayaran digital menjadi faktor yang mendorong peningkatan angka Indeks ETPD di Wilayah Sumatera Utara.

Adapun skor IETPD pada periode Semester II 2023 menunjukkan perbaikan. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh wilayah di Sumatera Utara telah berada pada kategori digital. Hal tersebut meningkat dibandingkan Indeks ETPD Semester I 2023 yang menunjukkan bahwa terdapat 29 Pemerintah Daerah pada Tahap Digital dan 4 Pemerintah Daerah pada Tahap Maju. Selanjutnya, implementasi ETPD terus diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi



Sumber: BI, diolah

**Grafik 5.9** Perkembangan *Inflow* - *Outflow*

pengelolaan keuangan daerah. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan TP2DD di daerah diantaranya pelaksanaan *Capacity Building* TP2DD se wilayah Sumatera Utara, Rapat Koordinasi TP2DD, *High Level Meeting* TP2DD, implementasi Kartu Kредu Indonesia (KKI) dan lainnya.

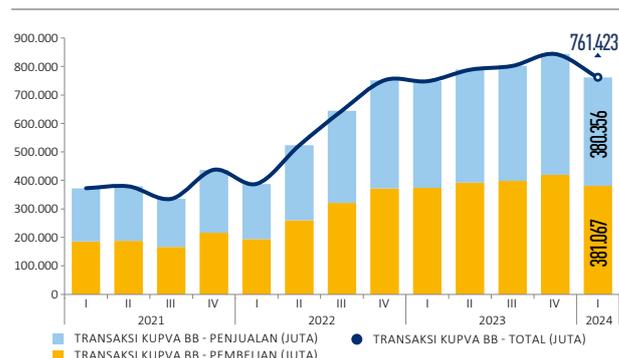
KPwBI Provinsi Sumatera Utara melakukan berbagai upaya dalam mendorong perluasan ETPD Sumatera Utara diantaranya (1) Studi Tiru TP2DD Sumatera Utara kepada TP2DD DKI Jakarta, Kota Bogor dan Jawa Barat, (2) *Capacity Building Championships* 2024, (3) Pelaksanaan rapat koordinasi dan *High Level Meeting* kepada Pemerintah Daerah.

### 5.3 ALIRAN UANG KARTAL MENGALAMI *NET OUTFLOW*

**Pada triwulan I 2024, arus kas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menunjukkan *net inflow* pada angka Rp5,47 triliun.** Kondisi tersebut seiring dengan normalisasi pasca HBKN Natal dan Tahun Baru 2023. Sementara itu, transaksi *inflow* mengalami peningkatan dari Rp4,4 triliun pada triwulan IV 2023 menjadi Rp12,8 triliun pada triwulan I 2024 (Grafik 5.9).

### 5.4 ALIRAN TRANSFER DANA LINTAS NEGARA TETAP KUAT

Dukungan pasar keuangan, termasuk pasar valuta asing domestik yang sehat, diperlukan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah



Sumber: BI, diolah

**Grafik 5.10** Perkembangan Transaksi KUPVA BB

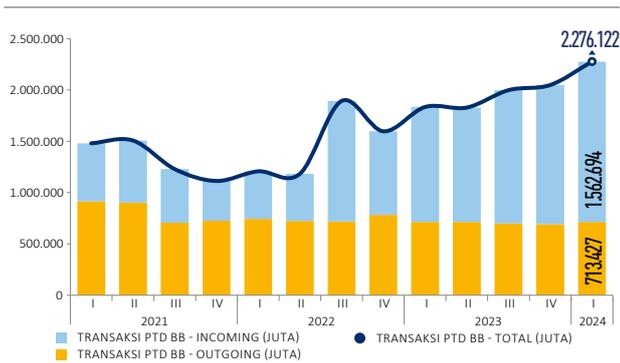
dan perekonomian. Oleh karena itu, aturan transaksi valas terhadap Rupiah antara penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dengan pihak lain diselaraskan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Pada triwulan I 2024, terdapat 39 KUPVA BB berizin di Sumatera Utara. Transaksi KUPVA BB tercatat sebesar Rp761,4 miliar atau tumbuh 1,9% (yoy) (Grafik 5.10). Meskipun mencatat pertumbuhan (yoy) yang positif, total transaksi triwulan I 2024 tercatat lebih rendah Rp82,7 miliar dibandingkan total transaksi triwulan IV 2023. Adapun transaksi jual-beli KUPVA BB masih didominasi oleh mata uang MYR, SGD, dan USD.

Transfer dana merupakan kegiatan pemindahbukuan sejumlah dana kepada penerima yang diawali dengan perintah pengiriman yang disebut perintah transfer dana, hingga dana diterima oleh penerima. Bank Indonesia juga mengatur proses perizinan, penyelenggaraan transfer dana, dan penyampaian laporan oleh penyelenggara. Tujuannya yaitu untuk menjamin keamanan dan kelancaran transfer dana. Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana wajib memperoleh izin Bank Indonesia.

Pada triwulan I 2024, terdapat 8 Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP-LR) berizin di Sumatera Utara, dengan total kegiatan transaksi dana mencapai Rp2,27 triliun atau meningkat 28% (yoy) dengan nominal transaksi dana yang masuk (*incoming*)





Sumber: BI, diolah

**Grafik 5.11** Perkembangan Transaksi PJP-LR

sebesar Rp713,42 miliar, sementara transaksi dana yang keluar (*outgoing*) sebesar Rp1,56 triliun (Grafik 5.11). Peningkatan tersebut didorong oleh penambahan jumlah penyelenggara pada triwulan I 2024 yang memperluas pangsa pasar pengiriman dana serta adanya *shifting* dalam kepengurusan yang berdampak pada peningkatan kinerja PJP-LR. Adapun mayoritas transaksi *incoming* berasal dari negara Malaysia. Di sisi lain, mayoritas transaksi *outgoing* menuju negara Singapura.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



► BOKS 3

## **SEMESTA FEST 2024 (Semarak Ekonomi Syariah dan Keuangan Digital Festival) Mendorong Peningkatan Akseptasi Nontunai di Sumatera Utara**



Sejalan dengan beberapa *event* strategis di KPwBI Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja, dan sebagai bentuk komitmen dalam menggaungkan semangat KIS (Kolaborasi, Inovasi dan Sinergi) antar unit kerja, serta berdasarkan diskusi yang dilakukan antara Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif dan Syariah (FPPU KIS) dan Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (FIKSP) mengusulkan program kolaborasi pada penyelenggaraan kegiatan *Road to Festival* Ekonomi Syariah dan *Road to Festival* Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) Sumatera Utara tahun 2024 melalui *event* **SEMESTA FEST 2024**.

Program tersebut bertujuan untuk mendorong akseptasi keuangan digital khususnya di Sumatera Utara sejalan dengan Upaya Pencapaian target QRIS : 395 ribu pengguna baru dan 60 juta volume transaksi sejalan dengan program nasional 55 juta pengguna QRIS dan 2,5 miliar transaksi serta meningkatkan pemahaman serta wawasan terkait perkembangan digitalisasi serta inovasi layanan keuangan digital. Adapun kegiatan dilaksanakan pada 20 sampai dengan 24 Maret 2024 di dua lokasi Pusat Perbelanjaan Sun Plaza Mall dan Centre Point Medan dengan kegiatan: Bazaar Kuliner Ramadhan, *Talkshow* Keuangan Digital, PeKA, CBP, berbagai perlombaan, THR (Transaksi Hemat dan beRkah) Pakai QRIS, serta hiburan lainnya.



Gambar B3.1 Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi



Gambar B3.2 Bazaar Kuliner

Program edukasi dan *user experience* QRIS juga dilakukan melalui kegiatan interaktif seperti kegiatan **Lomba Scan QRIS terbanyak** yang diikuti 250 Peserta yang mengikuti lomba Scan QRIS terbanyak dengan *Top Score* 130 Transaksi dengan waktu 15 Menit. Program **THR (Transaksi Hemat dan Berkah) Pakai QRIS** yang merupakan program *sweeteners* kepada pengunjung untuk bertransaksi menggunakan QRIS yang mana setiap pengunjung bertransaksi menggunakan QRIS dengan nominal minimal Rp. 30 Ribu akan mendapatkan 1 Kupon Undian, yang berkolaborasi bersama PJP Bank Mandiri. Serta salah satu inovasi dalam rangka edukasi dan sosialisasi terkait keuangan dilakukan dilakukan melalui **Stand up Comedy** yang menghadirkan Komika Medan Ilham Abaay untuk dapat bercerita mengenai kemudahan bertransaksi secara nontunai yang dibalut dengan konten hiburan dan jenaka.

Adapun *output* atas pelaksanaan tersebut diantaranya (a) Tercatat selama penyelenggaraan Kegiatan Terdapat 2.791 Peserta Edukasi Keuangan Digital dengan Rata-rata tingkat pemahaman 91,67%, (b) Selama kegiatan berlangsung tercatat penjualan sebesar Rp815,39 juta dengan volume transaksi penjualan mencapai 5.486 volume transaksi QRIS, (c) dan mendorong peningkatan dan pemahaman masyarakat terkait pembayaran nontunai.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



Foto : Mesjid Rata Medan, Sumatera Utara  
Sumber : Shutterstock



## Bab VI

# Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

**Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian.** Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat yang tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2024 menjadi 5,10% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,24%. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 8,15% dari 8,33% pada bulan September 2022. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio Gini pun turut membaik. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian.

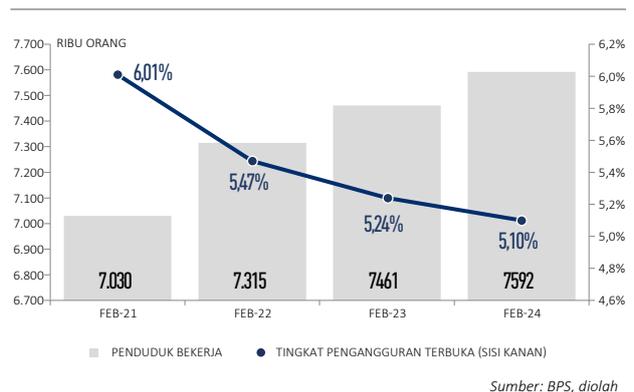


**Kondisi ketenagakerjaan Sumatera Utara pada Februari 2024 mengalami perbaikan.** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara pada Februari 2024 tercatat 5,10% atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,24%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan tetap tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat 70,30% pada Februari 2024, tetap tinggi jika dibandingkan dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 70,60%. Peningkatan serapan tenaga kerja terbesar terjadi pada LU Perdagangan Besar Eceran, LU Konstruksi, dan LU Administrasi Pemerintahan dengan peningkatan masing-masing sebesar 2,18%, 0,66%, dan 0,60%.

**Jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan mengalami penurunan.** Angka kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2023 sebesar 8,15% dari jumlah penduduk, menurun dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 8,33%. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah penduduk miskin juga berkurang, dari 1,26 juta orang pada September 2022 menjadi 1,24 juta orang pada Maret 2023.

**Ketimpangan pengeluaran penduduk yang tercermin melalui rasio Gini mengalami penurunan.** Rasio Gini Sumatera Utara pada Maret 2023 sebesar 0,309, lebih rendah dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,326. Sejalan dengan kondisi tersebut, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan.

## 6.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN SUMATERA UTARA MENGALAMI PERBAIKAN

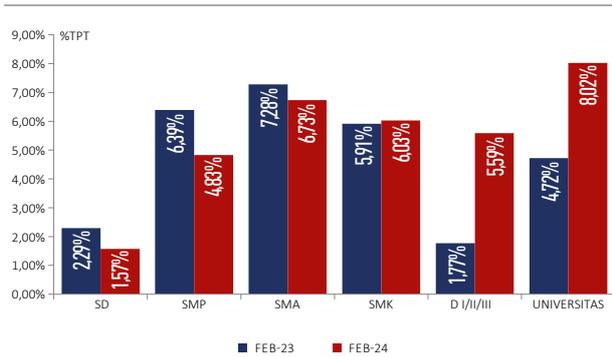


**Grafik 6.1** Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara

**Tingkat pengangguran di Sumatera Utara pada Februari menurun, tercermin dari indikator TPT yang turun dibanding tahun lalu menjadi 5,10% - (Grafik 6.1).** Kondisi TPT pada periode laporan yang mengalami penurunan mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Meski demikian, angka TPT Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan angka TPT Nasional yang saat ini tercatat 4,82%. Lebih lanjut, dibandingkan provinsi lainnya, Sumatera Utara menempati posisi ke-12 persentase TPT tertinggi dari total 38 provinsi.

**Penurunan TPT didorong oleh menurunnya TPT di daerah tempat tinggal.** Pada Februari 2024, TPT di wilayah perkotaan berada pada angka 6,51%, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,78%, dengan penurunan sebesar 0,61% poin. Sementara itu, TPT di wilayah perdesaan pada Februari 2024 sebesar 3,31%, juga lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,44%, dengan penurunan sebesar 0,28% poin.

**Penurunan TPT paling besar terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) - (Grafik 6.2).** Tingkat pengangguran terbuka pada lulusan SMP pada Februari 2024 sebesar 4,83%, menurun dibandingkan Februari 2023 sebesar 6,39%. Sejalan dengan perkembangan tersebut, tingkat pengangguran terbuka pada lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) juga mengalami penurunan dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan,



Sumber: BPS, diolah

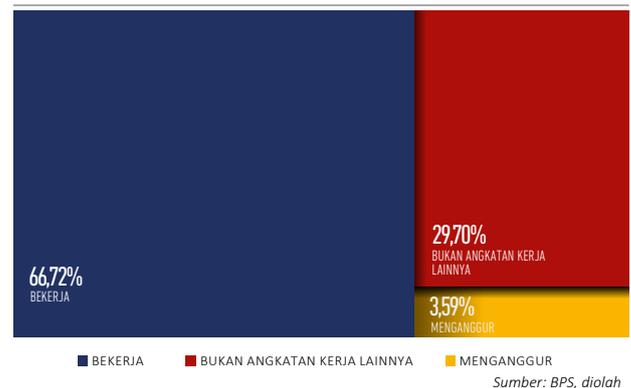
**Grafik 6.2** TPT Menurut Jenjang Pendidikan

jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma, dan Universitas mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja pada Februari 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2023.** Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara meningkat sebesar 126 ribu orang, dari 7,87 juta orang per Februari 2023 menjadi 8,00 juta orang per Februari 2024. Sama halnya dengan angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja naik sebanyak 131 ribu orang menjadi 7,59 juta orang pada Februari 2024 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,46 juta orang. Adapun pangsa penduduk bekerja di Sumatera Utara adalah sebesar 66,72% - (Grafik 6.3).<sup>1</sup>

**TPAK Sumatera Utara Februari 2024 mengalami sedikit penurunan.** Angka TPAK pada Februari 2024 sebesar 70,30% sedikit menurun dibandingkan Februari 2023 sebesar 70,60%. TPAK<sup>2</sup> adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Meskipun demikian, jumlah penduduk usia kerja yang tercatat meningkat dari 11,15 juta orang pada Februari 2023 menjadi 11,38 juta orang pada Februari 2024 - (Grafik

1 TPT secara spesifik mengukur proporsi individu yang aktif mencari pekerjaan dan siap bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja, menyoroti dinamika pasar kerja aktif. Sedangkan pengertian "penduduk menganggur" mencakup semua individu tanpa pekerjaan, tanpa mempertimbangkan apakah mereka sedang mencari pekerjaan atau tidak.  
2 TPAK adalah indikator yang lebih luas yang tidak hanya menunjukkan jumlah orang yang bekerja, tetapi juga mereka yang bersedia dan mampu bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan, mencerminkan kondisi pasar kerja secara keseluruhan.

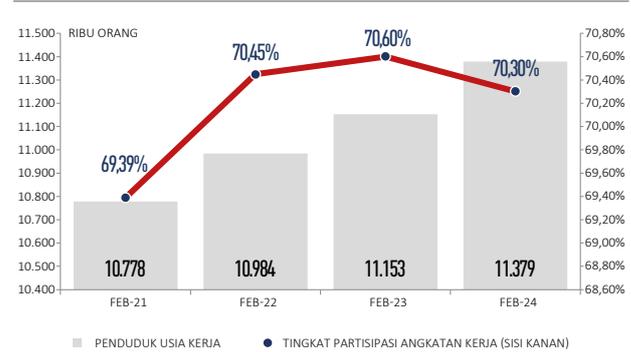


Sumber: BPS, diolah

**Grafik 6.3** Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

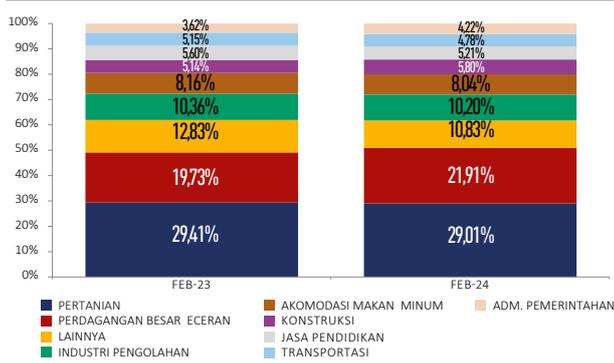
6.4). Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja tidak serta diiringi oleh jumlah serapan tenaga kerja.

**Meningkatnya kondisi perekonomian pada tahun 2024 berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja pada sebagian besar LU.** Pada Februari 2024, LU yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja dibandingkan tahun lalu di antaranya pada LU Perdagangan Besar Eceran, LU Konstruksi, serta LU Administrasi Pemerintahan - (Grafik 6.5). Peningkatan serapan tenaga kerja pada ketiga LU tersebut sejalan dengan kenaikan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan I 2024, khususnya pada LU Adm. Pemerintahan - (Grafik 6.6). Meningkatnya daya beli



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 6.4** Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan TPAK



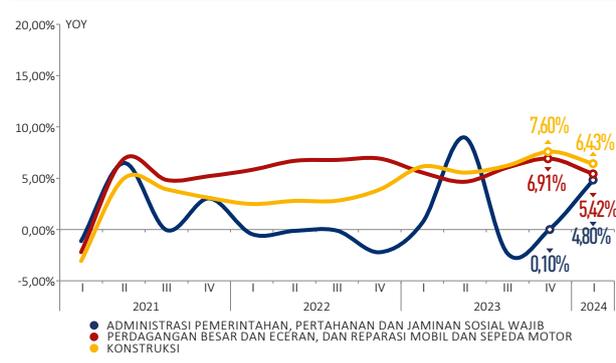
Sumber: BPS, diolah

**Grafik 6.5** Pangsa Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha

masyarakat dan membaiknya aktivitas perekonomian menjadi faktor pendorong pertumbuhan PDRB, yang kemudian berimplikasi pada serapan tenaga kerja yang meningkat.

Pada LU Perdagangan Besar Eceran, pangsa serapan tenaga kerja pada Februari 2024 sebesar 21,91%, meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 19,73% seiring dengan membaiknya aktivitas perekonomian. Selanjutnya pangsa serapan tenaga kerja pada LU Konstruksi meningkat dari 5,14% pada Februari 2023 menjadi 5,80% pada Februari 2024. Lebih lanjut pada LU Administrasi Pemerintahan, pangsa serapan tenaga kerja pada Februari 2024 sebesar 4,22%, meningkat dari periode sama tahun sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 3,62%, Perbaikan serapan tenaga kerja pada LU Administrasi Pemerintahan sejalan dengan pertumbuhan PDRB LU Administrasi Pemerintahan pada triwulan I 2024 yang didorong oleh tingginya belanja pemerintah seiring dengan dilaksanakannya Pemilu.

**Di sisi lain, serapan tenaga kerja pada LU Pertanian mengalami penurunan, meski tetap menjadi dominasi serapan tenaga kerja terbesar di Sumatera Utara.** Pangsa serapan tenaga kerja LU Pertanian pada Februari 2024 sebesar 29,01%, turun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 29,41% – (Grafik 6.5). Penurunan serapan tenaga kerja pada LU Pertanian mengindikasikan penurunan minat penduduk bekerja pada LU tersebut, yang berpotensi menjadi permasalahan struktural jangka panjang terutama dalam ketahanan pangan, mengingat potensi utama Sumatera Utara adalah sektor pertanian.

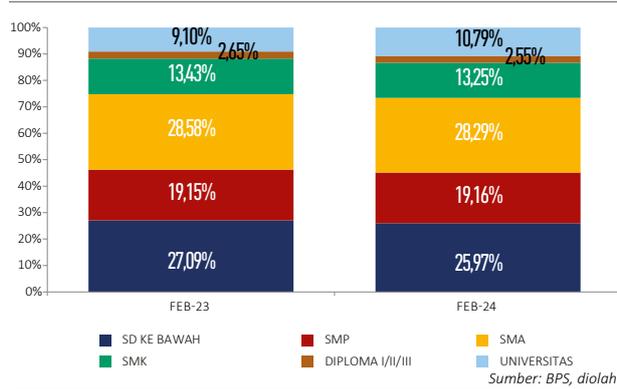


Sumber: BPS, diolah

**Grafik 6.6** Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

**Dari sisi tingkat pendidikan, tenaga kerja berpendidikan atas dan tinggi mendominasi struktur tenaga kerja di Sumatera Utara.** Pangsa jumlah pekerja berpendidikan atas dan tinggi atau tenaga kerja yang menempuh pendidikan minimal SMA/SMK di Sumatera Utara adalah sebesar 54,88% pada Februari 2024, meningkat dibandingkan pada Februari 2023 sebesar 53,76%. Namun demikian, tenaga kerja jenjang pendidikan atas dan tinggi ini tidak seluruhnya mampu terserap di industri. Hal ini terkonfirmasi dari masih tingginya tingkat pengangguran terbuka untuk jenjang pendidikan tersebut. Sementara untuk tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah memiliki pangsa 46,24%, dengan rincian tenaga kerja berpendidikan SMP sebanyak 19,16% dan SD ke bawah sebanyak 25,97% dari total tenaga kerja – (Grafik 6.7). Berdasarkan profil tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut, diperlukan peningkatan kerja sama antar dunia pendidikan dengan perusahaan (*link and match*) sehingga dapat menghasilkan pekerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar di Sumatera Utara.

**Indikator lain kondisi ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja dengan jam kerja tidak penuh yang meningkat dari 2,50 juta orang per Februari 2023 menjadi 2,77 juta orang per Februari 2024.** Pekerja tidak penuh adalah pekerja yang bekerja 1-34 jam per minggu. Namun, penduduk yang bekerja lebih atau sama dengan 35 jam kerja per minggu atau biasa disebut sebagai pekerja penuh, pada Februari 2024 ini mengalami penurunan menjadi 4,82 juta orang dari tahun sebelumnya sebesar 4,96 juta orang – (Tabel 6.1). Peningkatan jumlah pekerja mengindikasikan



**Grafik 6.7** Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan

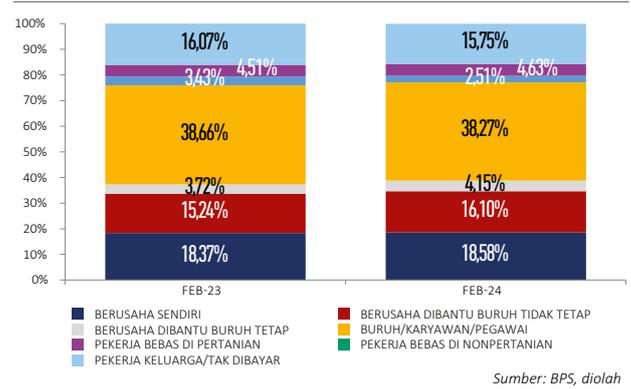
kondisi perekonomian yang membaik terutama pada lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja khususnya pekerja tidak penuh yang semakin meningkat.

**Tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mendominasi komposisi status pekerjaan utama tenaga kerja di Sumatera Utara.** Dari sisi status pekerjaan utama, tenaga kerja di Sumatera Utara didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh/ karyawan/pegawai dengan pangsa sebesar 38,27%. Namun demikian, minat berwirausaha pada tenaga kerja di Sumatera Utara juga cukup tinggi, tercermin dari pangsa tenaga kerja yang berusaha sendiri sebesar 18,58%, menempati posisi kedua pangsa tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan utama terbesar di Sumatera Utara - (Grafik 6.8).

**Tabel 6.1** Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/ Tidak Penuh)

Klasifikasi Pekerja	Jumlah Pekerja (Ribuan Orang)					Selisih	(yoy)
	Feb-21	Feb-22	Feb-23	Feb-24			
<b>Pekerja Penuh (≥35 jam per minggu)</b>	<b>4.668</b>	<b>4.601</b>	<b>4.959</b>	<b>4.818</b>	<b>(141)</b>	<b>-2,84%</b>	
<b>Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam per minggu)</b>	<b>2.362</b>	<b>2.714</b>	<b>2.502</b>	<b>2.775</b>	<b>273</b>	<b>10,91%</b>	
-Setengah Penganggur	607	631	518	685	167	32,24%	
-Pekerja Paruh Waktu	1.755	2.083	1.984	2.090	106	5,34%	
<b>Jumlah</b>	<b>7.030</b>	<b>7.315</b>	<b>7.461</b>	<b>7.593</b>	<b>132</b>	<b>1,77%</b>	

Sumber: BPS, diolah



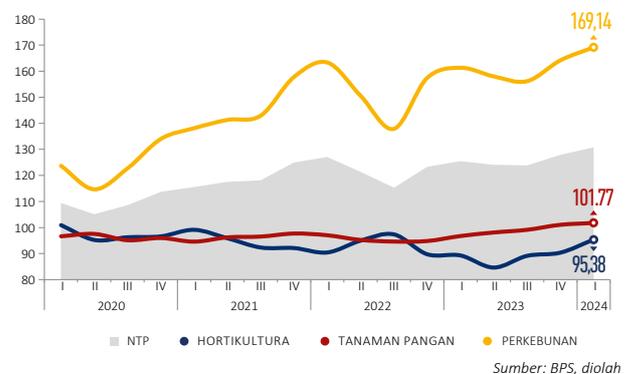
**Grafik 6.8** Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama

## 6.2 KESEJAHTERAAN

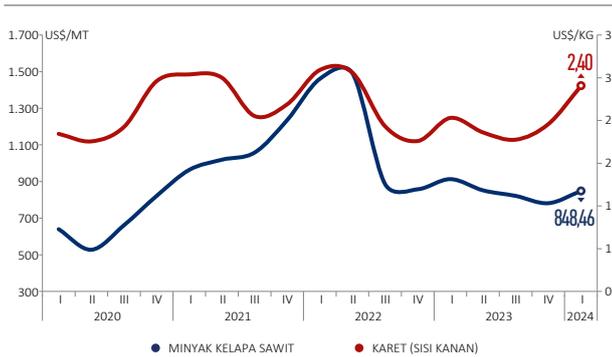
### 6.2.1. Nilai Tukar Petani

**Pada triwulan I 2024, kesejahteraan petani di Sumatera Utara mengalami kenaikan.** Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara pada triwulan I 2024 sebesar 130,80 atau meningkat 2,92 basis poin dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang sebesar 127,88 – (Grafik 6.9).

**Kenaikan NTP pada triwulan I 2024 didorong utamanya peningkatan NTP pada beberapa subLU.** NTP subLU Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Sumatera Utara pada triwulan I 2024 tercatat mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 169,14 atau naik 5,02 basis poin dari sebelumnya 164,12 di triwulan IV 2023 – (Grafik 6.9). Tren pulihnya harga karet dan kelapa sawit selama triwulan I 2024 menjadi faktor pendorong kenaikan NTPR – (Grafik 6.10). Sejalan dengan NTPR, NTP tanaman pangan



**Grafik 6.9** Perkembangan Nilai Tukar Petani



Sumber: Bloomberg, diolah

**Grafik 6.10** Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan

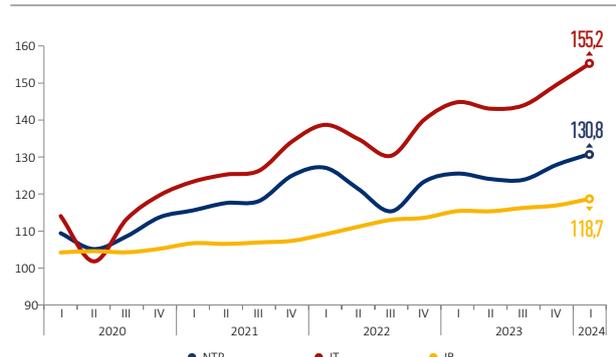
mengalami kenaikan sebesar 0,71 basis poin dari 101,06 di triwulan IV 2023 menjadi 101,77 di triwulan I 2024. Hal yang sama juga terjadi pada NTP subLU hortikultura yang mengalami kenaikan 5,01 basis poin menjadi 95,38 dari triwulan sebelumnya sebesar 90,36 – (Grafik 6.9).

**Sejalan dengan tren NTP, tingkat penerimaan petani turut mengalami kenaikan dari periode sebelumnya.** Pada triwulan I 2024, indeks yang diterima petani (IT) sebesar 155,2, sementara indeks yang dibayarkan petani (IB) sebesar 118,7, sehingga secara umum petani Sumatera Utara pada triwulan I 2024 mengalami kondisi surplus – (Grafik 6.11). Meski secara keseluruhan NTP Sumatera Utara berada di atas level 100, NTP di atas 100 hanya dialami oleh petani yang bekerja di subLU Perkebunan dan Tanaman Pangan seiring dengan meningkatnya harga komoditas kopi dan kelapa sawit. Sementara itu, subLU hortikultura tetap meneruskan tren NTP di bawah 100 yang sudah berlangsung setidaknya sejak 2017. Hal ini berbeda dengan level NTP nasional, baik subLU Perkebunan, Tanaman Pangan, maupun Hortikultura berada di atas 100.

### 6.2.2. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Mengalami Penurunan

**Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berkurang.** Angka kemiskinan<sup>3</sup> di Sumatera Utara pada Maret 2023 sebesar 8,15% dari jumlah penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 8,33%. Hal ini

<sup>3</sup> Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan



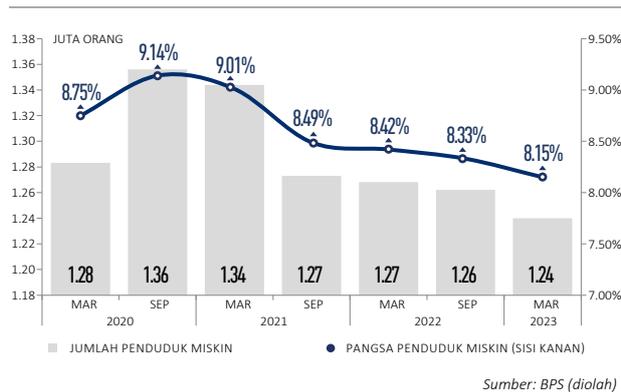
Sumber: BPS (diolah)

**Grafik 6.11** IT dan IB Sumatera Utara

terkonfirmasi dari penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,26 juta orang pada September 2022 menjadi 1,24 juta orang pada Maret 2023 – (Grafik 6.12). Adapun angka kemiskinan di Sumatera Utara tersebut lebih rendah daripada nasional sebesar 9,36%.

**Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan mengalami penurunan, sementara di pedesaan justru mengalami kenaikan.** Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebanyak 710 ribu orang atau turun sebesar 0,4% dari triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 710 ribu orang atau meningkat 0,07% secara triwulanan seiring dengan meningkatnya TPT pedesaan. Tingkat kemiskinan di pedesaan yang sebesar 8,03% lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan yang sebesar 8,23% - (Grafik 6.13). Hal ini seiring dengan lebih tingginya biaya hidup di perkotaan dibandingkan pedesaan.

**Komoditas makanan menjadi penyumbang utama garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan.** Komoditas makanan menyumbang garis kemiskinan terbesar, dengan andil 74,77% di perkotaan dan 77,99% di pedesaan. Terdapat 5 (lima) komoditas utama pada komponen makanan dengan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, yakni beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun komoditas pada kelompok bukan makanan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan Sumatera Utara adalah perumahan, bensin, pendidikan, dan listrik (Tabel 6.2).



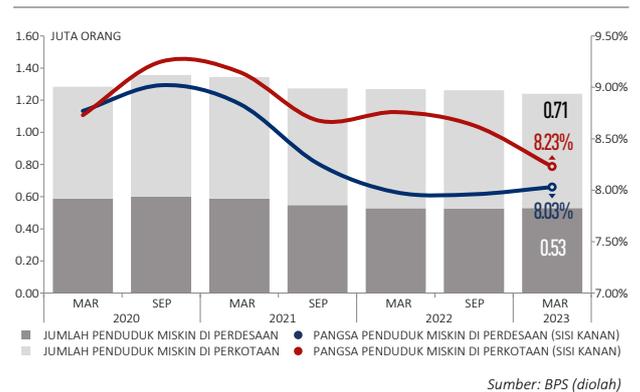
**Grafik 6.12** Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara

**Berkurangnya jumlah penduduk miskin sejalan dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan.** Sepanjang September 2022 hingga Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan (P1) turun dari 1,41 menjadi 1,26. Penurunan P1 terjadi di perdesaan dan perkotaan. Di sisi lain, indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun dari 0,339 menjadi 0,324 – (Grafik 6.14). Penurunan P2 terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Turunnya P1 mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin yang mampu mengikuti peningkatan garis kemiskinan, atau dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Selanjutnya turunnya indeks P2 mengindikasikan

**Tabel 6.2** Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan

Perkotaan		Perdesaan	
Jenis Komoditas	Sumbangan	Jenis Komoditas	Sumbangan
<b>Makanan</b>	<b>74,77%</b>	<b>Makanan</b>	<b>77,99%</b>
Beras	20,76%	Beras	29,79%
Rokok kretek filter	12,63%	Rokok kretek filter	9,94%
Tongkol/tuna/cakalang	4,35%	Tongkol/tuna/cakalang	3,43%
Daging Ayam Ras	3,89%	Telur Ayam Ras	3,22%
Telur Ayam Ras	3,82%	Cabai Merah	2,88%
Cabai Merah	3,09%	Daging Ayam Ras	2,71%
<b>Bukan Makanan</b>	<b>25,23%</b>	<b>Bukan Makanan</b>	<b>22,29%</b>
Perumahan	6,12%	Perumahan	5,69%
Bensin	3,91%	Bensin	3,01%
Listrik	2,98%	Pendidikan	1,79%
Pendidikan	2,37%	Listrik	1,70%
Perlengkapan Mandi	1,25%	Perlengkapan Mandi	1,26%
Angkutan	1,01%	Sabun Cuci	0,91%

Sumber: BPS, diolah

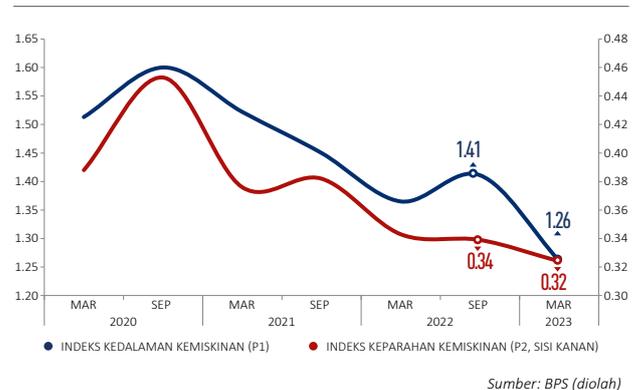


**Grafik 6.13** Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan

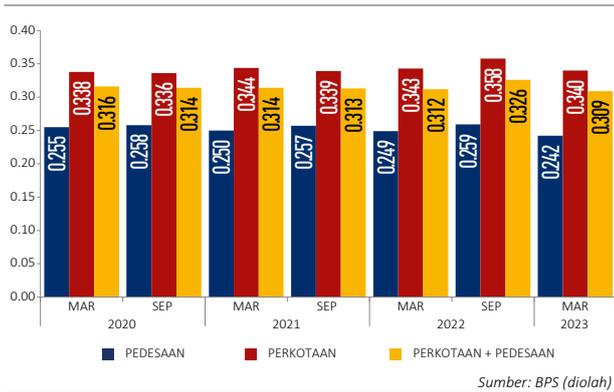
berkurangnya ketimpangan pengeluaran konsumsi antara penduduk miskin, atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran konsumsi semakin baik atau merata.

### 6.2.3. Ketimpangan Pendapatan Mengalami Penurunan

**Ketimpangan pendapatan penduduk mengalami penurunan, sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin.** Ketimpangan pendapatan dinyatakan melalui rasio gini dengan interval 0 - 1. Rasio Gini mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin dalam. Rasio Gini Sumatera Utara pada Maret 2023 adalah sebesar 0,309, lebih rendah daripada September 2022 yang sebesar 0,326 – (Grafik 6.15). Rasio ini menunjukkan ketimpangan di Sumatera Utara pada Maret 2023 yang sedikit lebih rendah daripada ketimpangan pada September 2022. Rasio Gini Sumatera Utara juga tercatat masih lebih rendah daripada rasio Gini nasional yang sebesar 0,388.



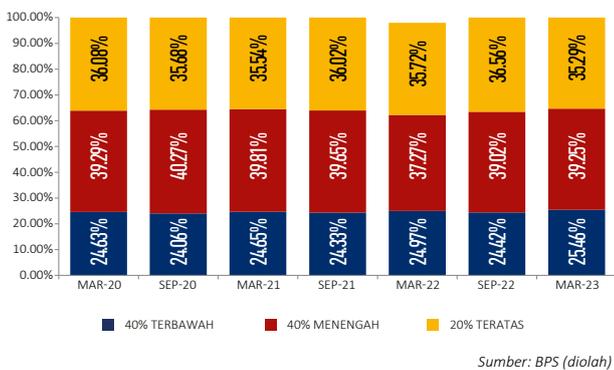
**Grafik 6.14** Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan



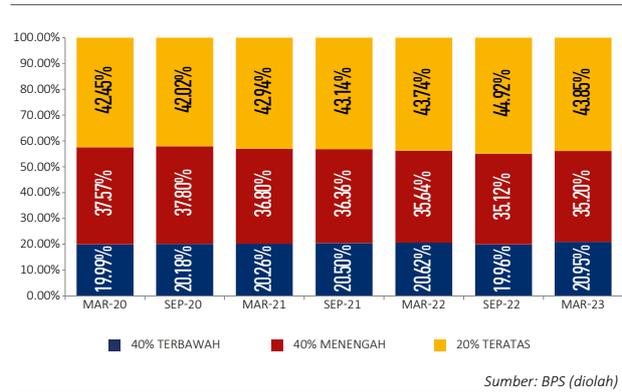
**Grafik 6.15** Perkembangan Rasio Gini

**Ketimpangan di perkotaan lebih besar dari pedesaan.** Pada Maret 2023, rasio Gini di wilayah perkotaan Sumatera Utara mencapai angka 0,340, menurun dari periode September 2022 yang sebesar 0,358 dan lebih besar dibandingkan rasio Gini di pedesaan, yakni 0,242 – (Grafik 6.15).

**Berdasarkan distribusi pengeluaran, ketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan di Sumatera Utara berada dalam kategori rendah.** Pangsa pengeluaran kelompok 40% terbawah penduduk perkotaan di Sumatera Utara yang sebesar 20,95% menunjukkan ketimpangan yang rendah<sup>4</sup> - (Grafik 6.16). Porsi ini sedikit meningkat dari September 2022 yang sebesar 19,96%. Untuk menekan rasio Gini, pengeluaran per kapita kelompok 40% terbawah perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan bantuan pendapatan melalui program bantuan sosial kepada masyarakat ekonomi produktif, terutama untuk membangun usaha kembali pascapandemi.



**Grafik 6.16** Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan



**Grafik 6.15** Perkembangan Rasio Gini

**Sementara itu, ketimpangan pengeluaran penduduk pedesaan di Sumatera Utara juga masuk dalam kategori rendah dengan pangsa 40% kelompok masyarakat berpendapatan terbawah mencapai 25,46% - (Grafik 6.17).** Porsi ini meningkat dari September 2022 dengan pangsa sebesar 24,42%. Selanjutnya pangsa 40% kelompok masyarakat berpendapatan menengah di wilayah pedesaan naik menjadi 39,25%. Sementara itu, 20% kelompok masyarakat berpendapatan teratas menurun menjadi 35,29%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan ketimpangan pengeluaran penduduk di wilayah pedesaan Sumatera Utara semakinimbang dibandingkan penduduk di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah pedesaan yang relatif lebih serupa dibandingkan di wilayah perkotaan.

**Secara umum, pembangunan modal manusia dapat mendukung pemerataan dalam distribusi**

<sup>4</sup> Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, tingkat ketimpangan dalam kategori rendah apabila di atas 17%.

**Grafik 6.18** Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional



Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	73,00	73,10	73,39	73,67
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,31	13,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,54	9,58	9,71	9,82
Pengeluaran per Kapita	Rp Ribu	10.420,00	10.499,00	10.848,00	11.049,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	73,62	73,84	74,51	75,13
Pertumbuhan IPM (yoy)	%	3,43	0,30	0,91	0,83

Sumber: BPS (diolah)

**pendapatan.** Ketimpangan pendapatan dapat ditekan melalui pemberian kemudahan akses penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar, di antaranya adalah akses pendidikan dan akses kesehatan, yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan memberikan kemudahan akses penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, maka IPM yang berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia akan membaik.

**Pada tahun 2023, IPM Sumatera Utara menjadi 75,13 atau meningkat dari 2022 yang sebesar 74,51 – (Tabel 6.3).** Peningkatan IPM didorong oleh perbaikan seluruh komponen. Pada tahun 2023, IPM Sumatera Utara berada di atas IPM Nasional yang sebesar 74,39 – (Grafik 6.18).







## Bab VII

# Prospek Perekonomian Daerah

**Pada tahun 2024, ekonomi Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat pada rentang 4,5-5,3% (yoy), meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global dan konflik geopolitik.** Dari sisi pengeluaran, perekonomian Sumatera Utara untuk keseluruhan tahun 2024 diprakirakan tetap kuat didukung pemulihan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi PMTB. Sementara itu, rebound ekonomi Tiongkok yang tidak setinggi perkiraan akibat permasalahan struktural pada perekonomian Tiongkok, masih berlanjutnya konflik geopolitik, serta masih lemahnya aktivitas sektor manufaktur di negara-negara tujuan ekspor diperkirakan dapat menahan laju kinerja ekspor Sumatera Utara di 2024. Dari sisi lapangan usaha, akselerasi kinerja lapangan usaha (LU) Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan diprakirakan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan normalisasi harga bahan baku (pupuk), serta permintaan domestik yang tetap kuat melalui implementasi program biofuel B35 dan B40 yang mendukung industri kelapa sawit. Selain itu, terdapat kecenderungan tren penurunan suku bunga perbankan di level global seiring semakin terkendalinya laju inflasi global, yang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi. Beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai seperti konflik geopolitik yang berkepanjangan sehingga menghambat aktivitas perdagangan internasional dan belum pulihnya perekonomian negara mitra dagang utama Sumatera Utara seperti Tiongkok. **Di sisi lain, stabilitas inflasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran target  $2,5 \pm 1\%$  (yoy),** dengan fokus pada sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sumatera Utara



## 7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

### 7.1.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2024

**Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat pada tahun 2024 dengan dukungan permintaan domestik yang resilien di tengah risiko eksternal.** Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2024 diperkirakan berada pada rentang kisaran 4,5-5,3% (yoy).

**Dari sisi eksternal,** ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Setelah *rebound* awal yang kuat dari kedalaman pandemi COVID-19, ekonomi global diperkirakan pulih terbatas pada tahun 2024. Kondisi ini sejalan dengan revisi proyeksi dari *World Economic Outlook* bulan April 2024 yang memproyeksikan perekonomian global tahun 2024 bias atas 0,1% – (Tabel 7.1). Namun demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi global tersebut masih berada di bawah rata-rata tahunan historis (2000–2019) sebesar 3,8% (yoy). Beberapa faktor menghambat pemulihan tersebut, antara lain konsekuensi jangka panjang dari pandemi, konflik geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah, penarikan insentif fiskal di tengah utang yang tinggi, dan peristiwa cuaca ekstrem. Namun, permintaan domestik yang tetap resilien sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan berlanjutnya penyaluran program perlindungan sosial diperkirakan dapat menjaga kinerja lapangan usaha utama di Sumatera Utara di 2024. Selain itu, tingkat inflasi yang diperkirakan terkendali juga berpotensi turut menjaga tingkat keyakinan konsumen dan menopang daya beli masyarakat.

#### 7.1.1.1 Komponen Pengeluaran

**Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh dari tahun sebelumnya.** Hal ini didukung dengan ekspektasi ekonomi domestik yang tetap kuat, yang terkait erat dengan peningkatan pendapatan rumah tangga akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), kenaikan gaji ASN, serta berlanjutnya program perlindungan sosial pemerintah seperti bantuan pangan nontunai (BPNT) / kartu

sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kenaikan UMP dan gaji ASN serta program perlindungan sosial ini diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Selain itu, tingkat inflasi yang terkendali diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Kemudian, terdapat potensi penurunan suku bunga global pada 2024 yang dapat menstimulasi permintaan kredit dalam mendorong konsumsi.

Meskipun demikian, ketidakpastian pemulihan ekonomi global dapat berdampak pada meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan aktivitas konsumsi. Pengurangan permintaan global dapat menurunkan harga komoditas ekspor Sumatera Utara dan mempengaruhi pendapatan bagi petani, pekerja industri, dan bisnis yang terkait. Hal ini berpotensi menurunkan pendapatan rumah tangga dan daya beli, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi rumah tangga.

**Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan turut terakselerasi seiring penyelenggaraan Pemilu 2024 dan kapasitas fiskal yang lebih baik.** Prospek ekonomi Nasional yang lebih baik di 2024, yang tecermin dari resiliennya permintaan domestik, memberikan optimisme bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan target penerimaannya. Pendapatan tersebut antara lain diharapkan berasal dari peningkatan pajak terkait kendaraan bermotor serta pajak dari sektor perhotelan dan restoran, yang merupakan indikator penting dari kegiatan ekonomi lokal. Dengan naiknya pendapatan ini, rencana belanja pemerintah daerah diprediksi akan menjadi lebih ekspansif.

Selain itu, perhelatan Pemilu 2024 diperkirakan turut mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, untuk berbagai keperluan, seperti logistik Pemilu, pembayaran petugas Pemilu, kampanye informasi dan edukasi pemilih, serta keamanan. Selain itu, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Sumatera Utara dapat turut menjadi penggerak konsumsi pemerintah, terutama dari sisi belanja modal.



**Tabel 7.1**      **Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia**

Negara	%, yoy					
	2022	2023	2024*	2024**	2025*	2025**
Dunia	3,5	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2
Negara Maju	2,6	1,6	1,5	1,7	1,8	1,8
Amerika Serikat	2,1	2,5	2,1	2,7	1,7	1,9
Kawasan Euro	3,5	0,4	0,9	0,8	1,7	1,5
Jepang	1,0	1,9	0,9	0,9	0,8	1,0
Britania Raya	4,1	0,1	0,6	0,5	1,6	1,5
Negara Berkembang	4,0	4,3	4,1	4,2	4,2	4,2
Tiongkok	3,0	5,2	4,6	4,6	4,1	4,1
India	7,2	7,8	6,5	6,8	6,5	6,5
ASEAN	5,5	4,1	4,7	4,5	4,4	4,6

Sumber: World Economic Outlook IMF, diolah;  
\*) proyeksi Januari 2024; \*\*) proyeksi April 2024

**Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan turut meningkat pada tahun 2024.** Di level global, tingkat suku bunga negara-negara maju yang diperkirakan mulai menurun di 2024 berpotensi meningkatkan kredit investasi dan mendukung kinerja investasi di 2024. Selain itu, mulai berlakunya peraturan-peraturan turunan UU Cipta Kerja secara efektif di 2024 dan implementasi aplikasi OSS-RBA yang terus dioptimalkan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi aktivitas pelaku ekonomi dan meningkatkan realisasi investasi. Bank Indonesia juga turut berperan dengan stakeholder terkait yang tergabung dalam *North Sumatra Invest* terus melakukan kegiatan promosi investasi dan mengelola persepsi positif terkait Sumatera Utara guna mendorong dan menarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara serta menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif.

Walaupun demikian, situasi ekonomi global yang saat ini masih dibayangi oleh ketidakpastian yang signifikan dan kondisi pasar keuangan global yang diperkirakan akan tetap volatil diperkirakan dapat berdampak pada kinerja investasi. Selain itu, perhelatan Pemilu 2024 dan proses transisi pemerintahan di tingkat Nasional dan daerah berpotensi meningkatkan sikap kehati-hatian para investor dalam melakukan investasi.

**Kinerja ekspor pada tahun 2024 diperkirakan melambat sejalan dengan perkiraan perlambatan permintaan dunia.** *Rebound* ekonomi Tiongkok yang tidak setinggi perkiraan akibat permasalahan

struktural pada perekonomian Tiongkok, masih berlanjutnya konflik geopolitik, serta masih lemahnya aktivitas sektor manufaktur di negara-negara tujuan ekspor diperkirakan berdampak pada kinerja ekspor Sumatera Utara di 2024. Lemahnya permintaan pada negara-negara tujuan ekspor tersebut diperkirakan turut berdampak pada terbatasnya peningkatan harga komoditas ekspor utama di pasar global yang selanjutnya ditransmisikan pada risiko menurunnya surplus neraca perdagangan Sumatera Utara. Meski demikian, masih terdapat peluang meningkatkan kinerja ekspor, terutama pada negara-negara yang memiliki ekonomi yang juga resilien di 2024 seperti India dan negara-negara ASEAN.

### 7.1.1.2 Komponen Lapangan Usaha

**LU Pertanian diperkirakan mengalami perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya.** Walaupun masih terdapat potensi El Nino di 2024, dampaknya terhadap produksi pangan diperkirakan tidak signifikan. Selain itu, serangkaian kebijakan pemerintah yang diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan upaya normalisasi harga bahan baku (pupuk) yang disertai peningkatan alokasi pupuk subsidi diharapkan dapat mempercepat pemulihan LU Pertanian. Peningkatan kebutuhan kelapa sawit untuk mendukung program biofuel dan penguatan kesejahteraan petani tercermin dari NTP yang tetap tinggi dan kuat diharapkan dapat turut mendorong kinerja LU Pertanian. Namun demikian, harga komoditas di pasar internasional yang diperkirakan belum sepenuhnya pulih dan masih tingginya biaya produksi dapat berpotensi menahan laju kinerja LU Pertanian.

**Kinerja LU Industri Pengolahan dan Perdagangan diperkirakan tetap kuat seiring dengan kuatnya permintaan domestik.** Implementasi program hilirisasi industri kelapa sawit untuk kebutuhan campuran bahan bakar (B35) yang berlaku sejak 1 Agustus 2023 diprediksi mendorong kinerja LU Industri Pengolahan di 2024. Sedangkan pada LU Perdagangan, kombinasi konsumsi masyarakat yang kuat dan adopsi teknologi digital dalam perdagangan diperkirakan akan terus berkembang terutama pada generasi muda, membuka peluang bagi peningkatan



efisiensi dan jangkauan pasar sehingga dapat berdampak positif pada kinerja LU Perdagangan. Namun demikian, eskalasi ketegangan geopolitik dapat memicu peningkatan harga energi dan bahan baku yang berikutnya dapat meningkatkan biaya produksi sehingga dapat menahan laju kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan.

### **Di sisi lain, pertumbuhan LU Konstruksi dan LU Perdagangan diperkirakan termoderasi di 2024.**

Selesaiannya pembangunan infrastruktur PSN di tahun 2024 a.l. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematangsiantar, Bendungan Lau Simeme, dan Kereta Api Rantau Prapat-Kota Pinang, pembatalan PSN Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran dan Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat, serta penggunaan fasilitas eksisting untuk *venue* PON XIII Aceh-Sumut 2024 diperkirakan dapat memengaruhi kinerja LU Konstruksi. Selain itu, berlanjutnya konflik geopolitik di Timur Tengah diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga energi, yang dapat mendorong harga transportasi sehingga dapat berdampak pada permintaan masyarakat.

## **7.1.2 Risiko Pertumbuhan Ekonomi**

Di tengah tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2024, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diwaspadai.

### **Pertama, ketidakpastian pemulihan ekonomi global dapat berdampak pada perekonomian domestik.**

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berasal dari permintaan luar negeri sehingga perkembangan kondisi ekonomi global akan turut memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Utara. Ketidakpastian pasar keuangan global masih tetap tinggi, dipengaruhi oleh berlanjutnya konflik geopolitik diperkirakan berpotensi memperpanjang gangguan rantai pasokan global dan kenaikan harga energi dan pangan. Ketidakpastian global ini juga dapat meningkatkan sikap kehati-hatian investor (*wait and see*) yang berisiko menghambat kinerja investasi dan perdagangan eksternal. Selain itu, terjadinya gelombang panas akibat perubahan iklim di sejumlah negara (El Nino) diperkirakan berpotensi mengganggu laju pemulihan ekonomi global dan permintaan terhadap komoditas ekspor unggulan Sumatera Utara.

Dari sisi industri, kesiapan industri domestik dalam merespons permintaan menjadi perhatian utama dalam memanfaatkan momentum di Selain itu, kondisi ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Sumatera Utara dan semula diharapkan sebagai motor penggerak ekonomi global pasca COVID-19 diperkirakan tumbuh lebih lemah dari prakiraan sebelumnya di tahun 2024. Hal ini disebabkan berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti kinerja sektor properti yang terus turun, utang rumah tangga yang meningkat, dan penurunan ekspor. Lemahnya aktivitas ekonomi pada negara tujuan ekspor tersebut diperkirakan menahan kenaikan harga komoditas ekspor Sumatera Utara terutama CPO. Meski demikian, masih terdapat peluang peningkatan kinerja ekspor, terutama pada India dan negara-negara ASEAN yang diperkirakan memiliki kinerja ekonomi yang resilien di 2024.

### **Kedua, risiko tekanan inflasi domestik yang tinggi**

seiring dengan masih tingginya harga energi dan pangan dan berlanjutnya gangguan rantai pasokan. Gangguan suplai pangan global diperkirakan dapat mendorong berlanjutnya kebijakan proteksionisme pangan dan diteruskan pada peningkatan tekanan inflasi domestik. Dari aspek konsumsi, permintaan yang kian pulih ke depan di tengah suplai yang belum stabil dapat berpengaruh pada lonjakan harga sehingga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.

Peningkatan produksi untuk komoditas yang belum mencapai swasembada perlu menjadi prioritas dalam pengendalian inflasi pangan. Perluasan kerjasama antardaerah dan penguatan infrastruktur diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran distribusi yang pada akhirnya turut menjaga ketersediaan pasokan. Ekspektasi masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam menjaga tingkat inflasi di tengah kondisi ekonomi yang diliputi ketidakpastian.

### **Ketiga, perekonomian Sumatera Utara belum terdistribusi secara merata, masih terpusat di Pantai Timur, khususnya kawasan Mebidangro<sup>1</sup>.**

Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pembangunan infrastruktur yang sebagian besar

<sup>1</sup> Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Tanah Karo



terkonsentrasi pada kawasan pelabuhan dan kawasan industri di wilayah tersebut. Infrastruktur yang belum optimal dapat menghambat potensi aglomerasi industri antarwilayah karena biaya logistik yang tinggi dan berdampak negatif pada daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional. Pengembangan aglomerasi industri diperlukan untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah yang lebih besar. Produksi komoditas sejenis yang bersaing dari negara lain juga menuntut peningkatan kualitas produksi. Hilirisasi industri pengolahan dalam pengembangan aglomerasi industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas utama. Adapun penciptaan aglomerasi industri memerlukan peran investor. Dengan demikian, ketentuan terkait insentif dan kemudahan investasi serta penerbitan regulasi turunan UU Cipta Kerja perlu untuk segera diselesaikan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

**Keempat, masih terbatasnya pengembangan infrastrukturekonomi hijau.** Di tengah isu perubahan iklim yang semakin mengemuka, pembangunan yang seimbang dengan tetap mengedepankan aspek lingkungan sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di daerah yang mengandalkan sumber daya alam. Sumatera Utara sendiri masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau. Sumatera Utara perlu merespon terhadap kecenderungan global yang semakin peduli terhadap pentingnya implementasi ekonomi hijau untuk pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat ketergantungan perekonomian Sumatera Utara terhadap eksternal, hal ini dapat berpengaruh terhadap daya saing produk Sumatera Utara di pasar internasional. Selain itu, masih terbatasnya peluang pembiayaan hijau dan ketersediaan infrastruktur pendukung di ekonomi hijau dikarenakan biaya transisi yang tinggi untuk beralih ke industri hijau. Selain itu, pelaku usaha juga masih memiliki informasi dan pengetahuan yang terbatas mengenai taksonomi hijau dan persyaratan untuk dapat memenuhi taksonomi hijau tersebut.

**Kelima, Sumatera Utara masih menghadapi tantangan ketimpangan tingkat akseptansi sistem**

**pembayaran digital.** Tren digitalisasi memengaruhi sendi-sendi perekonomian, jika dirancang dengan benar, dapat meningkatkan output perekonomian. Potensi tersebut belum dapat dioptimalkan karena transaksi nontunai masih didominasi oleh kota-kota besar. Hal tersebut tecermin dari jumlah merchant QRIS di Kota Medan yang mencapai hampir 526 ribu atau 46% dari total merchant Sumatera Utara. Dari sisi nominal dan volume transaksi QRIS, Kota Medan mendominasi hingga 71% dan 75% dari total transaksi Sumatera Utara.

Tantangan disparitas akseptansi keuangan digital disebabkan oleh tiga elemen utama yaitu belum meratanya literasi keuangan digital termasuk untuk mengatasi risiko siber, infrastruktur jaringan telekomunikasi, dan masih terbatasnya inovasi industri keuangan di daerah.

## 7.2 PROSPEK INFLASI

### 7.2.1 Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2024

**Laju inflasi Sumatera Utara pada tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali dan tetap berada pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%.** Sinergi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk menjaga inflasi berada pada rentang sasaran. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan anggaran pengendalian inflasi yang tepat guna dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat memainkan peran yang lebih penting dalam pengendalian inflasi di 2024.

Dari sisi global, tekanan inflasi pada 2024 diperkirakan akan mereda dibanding tahun 2023, meski masing-masing negara memiliki laju disinflasi yang berbeda. IMF memproyeksikan negara-negara maju diperkirakan akan mengalami penurunan inflasi rata-rata tahunan sebesar 2,7 poin persentase pada tahun 2023, sekitar dua kali lipat dari penurunan yang diproyeksikan (1,3 poin persentase) untuk negara-negara berkembang. Perbedaan ini mencerminkan paparan setiap negara yang berbeda terhadap guncangan pada harga komoditas dan nilai tukar, khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang lebih rentan



terhadap kedua jenis guncangan tersebut. Pada saat yang sama, laju inflasi di negara maju masih di atas sasaran (2%), dipengaruhi perekonomian yang kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Selain itu, eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global.

Dari sisi domestik, rencana kenaikan batas atas harga tiket pesawat, peningkatan harga bahan bakar sebagai imbas konflik di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan komponen *administered prices*. Selain itu, depresiasi nilai tukar seiring dengan kebijakan suku bunga tinggi di negara maju berpotensi menimbulkan *imported inflation* yang didorong naiknya harga komoditas impor. Terkait harga komoditas, kecenderungan negara-negara produsen komoditas seperti Brazil dan India yang menutup keran ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat memberikan tekanan inflasi.

**Merespons hal tersebut, bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi sembari terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di berbagai sektor.** Koordinasi pengendalian inflasi antarwilayah akan tetap diperkuat, di antaranya melalui sinergi yang erat dengan *stakeholders* terkait terutama dalam mendukung GNPIP agar inflasi Sumatera Utara dapat terjaga di sasaran inflasi nasional 2024.

Berbagai program pengendalian harga telah dipersiapkan oleh TPID dalam mendukung GNPIP serta menghadapi prospek peningkatan inflasi tahun 2024 di antaranya dalam bentuk perluasan MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) seperti antara Kab. Langkat, Kab. Karo, dan Kab. Dairi yang resmi ditandatangani pada 13 Mei 2024 lalu dengan komoditas telur ayam ras, ikan, dan cabai merah. Kemudian juga akan dilakukan perluasan klaster pangan (terutama pada komoditas cabai merah dan bawang merah) serta mendorong implementasi *urban farming*. Selain itu, program pengendalian inflasi di Sumatera Utara ke depannya juga diarahkan untuk lebih preventif

dengan mendeteksi secara dini fluktuasi harga-harga komoditas strategis melalui mekanisme *Early Warning System*.

## 7.2.2 Risiko Tekanan Inflasi Meningkat

Risiko tekanan inflasi, antara lain adalah 1) tekanan inflasi dan inflasi inti global masih tinggi sejalan dengan terus berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan keketatan pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa, di tengah pelemahan permintaan global; 2) peningkatan permintaan domestik secara signifikan (*pent-up demand*) sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung; 3) kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antardaerah dan antarwaktu yang tidak dapat dikelola optimal; 4) kenaikan biaya saprodi impor sebesar 40%-60% yang berisiko memengaruhi biaya produksi kelompok bahan makanan, khususnya komoditas hortikultura; 5) perubahan iklim yang menyebabkan cuaca buruk yang dapat menekan jumlah produksi pangan; serta 6) kenaikan harga pakan ternak yang berisiko mendorong kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Lebih lanjut, untuk memitigasi risiko tersebut, Bank Indonesia tetap memperkuat sinergi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah, juga TPID, agar inflasi dapat terjaga dalam sasaran  $2,5 \pm 1\%$  di tahun 2024.

## 7.3 REKOMENDASI

Dengan berbagai tantangan yang ada, Sumatera Utara perlu memperkuat sinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi. Untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi, berbagai strategi penguatan perlu dilakukan:

**1) Pertama, memperkuat kolaborasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dalam TPID - GNPIP terutama untuk merumuskan langkah antisipatif yang efektif terkait pengendalian inflasi.** Sinergi tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi 5 (lima) arahan Presiden dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan ke depan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan kebangkitan ekonomi



nasional. Beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui: i) perluasan KAD terintegrasi; ii) optimalisasi penyerapan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pengendalian inflasi; iii) implementasi sistem deteksi dini harga komoditas pangan strategis; dan iv) hilirasi produk komoditas pangan strategis penyumbang inflasi.

Upaya pengendalian inflasi melalui kerangka 4K dapat dilakukan melalui penguatan peran BUMD Sumatera Utara dalam pengendalian harga komoditas pangan, dengan mengacu pada *best practices* dan *success story* di beberapa wilayah. Sebagai contoh, dukungan penuh pemda melalui perencanaan program dan alokasi anggaran, termasuk optimalisasi peran BUMD Pangan menjadi salah satu *key success factor* dalam pengendalian inflasi di DKI Jakarta. Lebih lanjut, Program Ketahanan Pangan dalam upaya pengendalian inflasi DKI Jakarta dilakukan dengan kolaborasi antara OPD dan BUMD Pangan, dengan OPD sebagai *demand creator* dan BUMD Pangan (Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya) sebagai penyedia pasokan melalui KAD, dan penyalur pangan bersubsidi serta pangan murah.

- 2) Kedua, penguatan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung terciptanya aglomerasi industri yang memberikan peningkatan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah.** Penciptaan aglomerasi industri membutuhkan ketersediaan regulasi daerah, pemetaan potensi masing-masing daerah, investor yang mampu mendukung proses pengembangan industri, dan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai. Sementara itu, penguatan iklim investasi dapat dilakukan dengan mendorong kesiapan daerah dalam implementasi OSS-RBA, percepatan penerbitan Peraturan Daerah yang mendukung, dan membantu promosi investasi melalui peningkatan kolaborasi *North Sumatra Invest* (NSI) antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, dan DPMPSTSP Provinsi Sumatera Utara yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Selain itu, NSI akan lebih berperan dalam mendorong ketersediaan peluang investasi

di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dan mendorong proyek-proyek investasi yang ada di Sumatera menjadi *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) sehingga semakin menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

- 3) Ketiga, perlu kesiapan industri untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Hal ini melibatkan hilirasi industri untuk komoditas-komoditas ekspor dalam mengantisipasi lemahnya permintaan bahan mentah dari negara-negara tujuan ekspor di 2024.** Proses hilirasi ini perlu difokuskan pada peningkatan nilai tambah komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, dan produk pertanian lainnya, melalui pengembangan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Selain itu, hilirasi ini harus didukung dengan peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain melalui pembukaan pendidikan kejuruan/vokasi oleh Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan swasta dan BUMD, untuk menciptakan kesesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja (*link and match*). Lebih lanjut, peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi krusial untuk mempercepat proses hilirasi industri di Sumatera Utara.
- 4) Keempat, mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan hijau.** Sinergi antara Pemerintah Daerah, industri, dan lembaga keuangan sangat penting dalam mendorong sektor ini. Ketersediaan proyek berbasis hijau perlu didorong oleh Pemerintah Daerah, dengan dukungan dari regulator dan industri keuangan dari sisi akses pembiayaan hijau. Selain itu, dalam rangka mengembangkan ekonomi hijau di sektor pertanian, Pemerintah Daerah di Sumatera Utara perlu memprioritaskan inisiatif untuk mendorong pelaku usaha di sektor pertanian, antara lain dalam komoditas ekspor, untuk mengadopsi implementasi praktik berkelanjutan, antara lain dengan sertifikasi standar lingkungan seperti sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*). Mengingat kompleksitas isu lingkungan dalam sektor



pertanian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati, terutama meminimalisasi efek samping implementasi praktik berkelanjutan dengan mendukung pelaku bisnis kecil di sektor ini, baik dari sisi peningkatan kapasitas maupun pembiayaan hijau. Berdasarkan riset Pambekti dan Lestari (2023) yang dipresentasikan dalam 4th Sumatranomics, pembiayaan hijau terbukti secara signifikan dapat membantu pelaku bisnis pertanian untuk mengadopsi praktik berkelanjutan di Pulau Sumatera. Sebagai contoh, dengan pembiayaan hijau, petani dapat memasang panel surya atau sistem energi terbarukan lainnya yang membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional yang cenderung merusak lingkungan. Sinergi Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan otoritas lainnya dapat dilakukan dalam menyediakan insentif pengembangan ekonomi hijau di sektor pertanian, seperti dalam penyusunan regulasi insentif bagi pengembangan ekonomi hijau maupun mengarahkan perbankan dalam meningkatkan kredit kepada UMKM pertanian dalam rangka memenuhi standar lingkungan. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan reputasi dan akses pasar bagi produk pertanian Sumatera Utara di panggung internasional dalam mendukung ekonomi hijau.

**5) Kelima, penguatan sinergi untuk mendukung upaya pemerataan akseptansi digital sistem pembayaran sejalan dengan penguatan dan kebangkitan ekonomi Sumatera Utara.** Bank Indonesia senantiasa memperluas edukasi guna meningkatkan literasi keuangan digital termasuk penguatan perlindungan konsumen bersama regulator lainnya, Pemerintah Daerah, dan industri keuangan di daerah sejalan mendukung capaian perluasan QRIS 2024. Bersama dengan penguatan peran TP2DD, Pemerintah Daerah dapat turut mendukung monitoring penyediaan jaringan telekomunikasi khususnya pada daerah 3T melalui pemanfaatan PSN Satelit SATRIA-1 di masing-masing daerah. Lebih daripada itu, perluasan

transaksi nontunai ini juga perlu didukung oleh inovasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penguatan kerjasama TP2DD dengan pihak lainnya, serta penekanan peran penting dari Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dalam kaitan ini, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga perlu dipastikan tetap berjalan dengan baik melalui monitoring elektronifikasi moda transportasi, bantuan sosial nontunai, dan destinasi wisata super prioritas.

Bank Indonesia hadir sebagai fasilitator dan katalisator memperkuat ekosistem digital sejalan dengan penguatan ekonomi di daerah. Guna mendukung tercapainya tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), perbankan, asosiasi sistem pembayaran fintech maupun *e-commerce*, serta komunitas di daerah untuk senantiasa memperluas berbagai program digitalisasi sistem pembayaran kepada masyarakat.

**6) Keenam, mengoptimalkan peran *local champion* sebagai *role model* dalam implementasi *best practices* dan melaksanakan *capacity building* serta pendampingan yang terfokus kepada pelaku UMKM.** *Local champion* adalah pelaku UMKM yang berdedikasi tinggi dan terbuka terhadap perubahan demi kemajuan kelompoknya. Diharapkan *local champion* dapat menjadi *role model* untuk mendorong perubahan *mindset* tidak hanya di kelompoknya, tetapi juga di kelompok-kelompok lainnya. Selain itu, kami juga memandang perlunya penguatan sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam berbagai program kegiatan pameran dan *capacity building* UMKM, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun Pemerintah Daerah. Di samping itu, dalam pengembangan ekonomi syariah, HEBITREN diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi pesantren.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **LAMPIRAN**

# Daftar Istilah

## **Administered Prices**

Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya bahan bakar, penerangan, dan air serta transportasi ataupun harga barang/jasa yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah misalnya tembakau dan minuman beralkohol.

## **Barang Modal (Capital Goods)**

Barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi, biasanya bernilai guna lebih dari 1 tahun.

## **Bahan Baku (Raw Material)**

Barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri.

## **BI 7 Day Reverse Repo Rate**

Suku bunga referensi yang mencerminkan sikap atau arah kebijakan moneter yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya dan diumumkan kepada publik.

## **BI-RTGS**

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, merupakan proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed / gross settlement*) dan bersifat real time (*electronically processed*), di mana rekening peserta dapat didebit/ dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

## **CPO (Crude Palm Oil)**

Minyak nabati yang dihasilkan oleh buah-buahan dari kelapa sawit.

## **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka (*deposito*).

## **Ekspor dan Impor**

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar daerah.

## **Indeks Keyakinan Konsumen**

Indeks yang dihasilkan oleh Survei Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian, baik saat ini maupun masa mendatang.

## **Indeks Kondisi Ekonomi**

Salah satu indeks pembentuk Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan persepsi konsumen akan kondisi perekonomian pada saat ini.

## **Inflasi IHK**

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

## **Inflasi Inti**

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.

## **Inflow**

Aliran masuk uang kartal ke Kantor Bank Indonesia.

## **Kredit**

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## **Kredit Investasi**

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik dan pembelian mesin.

## **Kredit Modal Kerja**

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi.

## **Kredit Konsumsi**

Kredit bagi perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), dan lain-lain seperti Kredit tanpa agunan.

## **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM memiliki prospek bisnis yang baik (*feasible*) tapi belum memiliki kemampuan mengembalikan (*bankable*). Dana KUR berasal dari bank pelaksana, namun dijamin sebagian besarnya oleh Pemerintah.

## **Liaison**

uatu kegiatan pengumpulan data statistik dan informasi yang dilaksanakan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha mengenai perkembangan dan arah kegiatan usaha.

## **Loan to Value (LTV)**

Sebuah dasar atau metode yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur berdasarkan aset yang dijadikan jaminan.

## **Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)**

Persentase kredit/pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit. Terminologi NPL untuk bank konvensional sementara NPF untuk bank syariah.

## **NTP (Nilai Tukar Petani)**

Rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

## **Outflow**

Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia.

## **PDRB Riil**

Produk Domestik Bruto Regional yang nilainya menggunakan harga konstan. Hal ini untuk menghilangkan pengaruh inflasi dalam mengukur pertumbuhan antar waktu.



### **Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)**

SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *Retail Value Payment System (RVPS)* atau transaksi bernilai kecil (*retail*) yaitu transaksi di bawah Rp100 juta.

### **Survei Konsumen**

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang dilakukan secara bulanan untuk mengetahui persepsi atau tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian.

### **Survei Penjualan Eceran**

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk merefleksikan pergerakan dari penjualan eceran dan dilakukan secara bulanan.

### **Uang Kartal**

Alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan dan dijamin oleh Bank Indonesia, baik berupa kertas maupun logam.

### ***Volatile Food***

Komoditas yang termasuk kelompok bahan makanan, kecuali subkelompok ikan diawetkan dan bahan makanan lainnya, yang pergerakan naik turunnya harga cukup besar (*volatile*).

### ***Year on year (yoy)***

Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi satu titik waktu (misal bulan atau triwulan) terhadap posisi satu titik waktu yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan untuk menghilangkan efek seasonal yang biasanya terjadi di titik waktu tertentu (misal bulan Ramadhan, tahun ajaran baru, dsb).





## Tim Penyusun

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Sumatera Utara**

### **Pengarah**

I G P Wira Kusuma

### **Editor**

**Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter  
Deputi Kepala Perwakilan**

Yura Djalins

### **Ekonom Ahli Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi**

Wahyu Yuwana Hidayat

### **Kontributor**

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara  
Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi**

Aegina Siswana Surbakti

Tutut Tiana

Minda Putri Dwinanda

Adela Khairunnisa Nugraha

Alysha Putri Salsabila

### **Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Fungsi Implementasi Pengawasan dan SP-PUR**

Eka Putra Budi Nugroho

Fika Akhmad

Zulpan Riski Amanda

Chatherine Nathasya Agnes Tobing

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi

Telp. 061-4150500

Fax. 061-4534760

Publikasi ini dapat diakses secara online pada :

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi**

Jl. Balaikota No.4, Kesawan  
Kota Medan, Sumatera Utara

